



PROFIL GENDER DAN ANAK KOTA SAMARINDA 2024

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA



PROFIL GENDER DAN ANAK KOTA SAMARINDA

Dr. Andi Indrawati, S.E.M.M.Ak

Catur Kumala Dewi, S.E.M.M

Ekawati, SH., M.Hum

Diana Imawati, S.Psi., M.Psi

Siti Khumaidatul Umaroh, S.Pd.I., M.A



Tahta Media Group

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

- Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PROFIL GENDER DAN ANAK KOTA SAMARINDA

Penulis:

Dr. Andi Indrawati, S.E.M.M.Ak
Catur Kumala Dewi, S.E.M.M
Ekawati, SH., M.Hum
Diana Imawati, S.Psi., M.Psi
Siti Khumaidatul Umaroh, S.Pd.I., M.A

Desain Cover:

Andi Syakiah Annisa, ST

Editor:

Erni Agus Wulan Ariani, SE
Ahmad Irwansyah, SE
Rachma Winda, S.KOM

Proofreader:

Tahta Media

Ukuran:

xvi, 262, Uk: 15,5 x 23 cm

QRCBN : 62-415-7735-135

Cetakan Pertama:

Februari 2025

Hak Cipta 2025, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2025 by Tahta Media Group
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP
(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)
Anggota IKAPI (216/JTE/2021)





KATA SAMBUTAN



Assalamualaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera untuk kita semua

Dengan rasa syukur dan hormat, kami menyampaikan puji dan terima kasih kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan rahmat dan petunjuk-Nya dalam setiap langkah kehidupan

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan upaya terus menerus yang dilakukan pemerintah dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik. Upaya pembangunan ini ditujukan untuk kepentingan seluruh penduduk tanpa membedakan jenis kelamin tertentu. Persoalan penting yang menghalangi upaya peningkatan kualitas hidup adalah pendekatan pembangunan yang mengabaikan isu tentang kesetaraan dan keadilan gender.

Untuk mendukung keberhasilan pembangunan tersebut maka sangat dibutuhkan dukungan data dan penganggaran yang berpihak pada isu gender. Data terpilah gender merupakan urusan wajib non pelayanan dasar sesuai dengan dengan UU Nomor 23 tahun 2014 pada sub urusan ke empat yaitu Sistem Data Gender dan Anak dalam Peraturan Nomor 4 Tahun 2023 memberikan panduan tentang penyelenggara satu data gender dan anak yang harus dikumpulkan dan sumber-sumber data yang relevan.

Mengacu pada pada pedoman ini dan menyadari pentingnya data yang terperinci, kami dengan bangga mempersembahkan Buku Gender tahun 2024 dengan harapan akan membantu para pengambil keputusan untuk mengidentifikasi perbedaan dalam kondisi perkembangan perempuan dan laki-laki, mengevaluasi dampak dari berbagai inisiatif pembangunan, mengidentifikasi masalah yang harus diatasi, dan memilih solusi yang paling efektif demi kesejahteraan semua warga.

Akhir kata, terima kasih kepada pihak yang terlibat dalam penyusunan dan penerbitan buku ini. Kami berharap buku ini akan menjadi alat yang bermanfaat dalam perjalanan menuju kesejahteraan sosial yang lebih baik dan lebih adil.

Dr. Ibnu Araby, M.M.Pd

*Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Kota Samarinda*





KATA SAMBUTAN



Salam Sejahtera untuk kita semua

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya buku "Profil Gender dan Anak" Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Isu Gender telah menjadi komitmen pemerintah baik di pusat maupun di daerah, Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di kota Samarinda telah mengalami kemajuan dengan terbentuknya kelembagaan PUG di Satuan Kerja Perangkat Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Pembangunan dengan paradigma baru yang menjadikan manusia sebagai pusat perhatiannya, memerlukan strategi PUG untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. PUG merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat, agar dapat memperoleh manfaat dari berbagai kebijakan, program, kegiatan yang dibuatnya untuk menyumbang kemajuan sosial, ekonomi, politik, dan budaya daerah yang melaksanakannya.

Pemerintah Kota Samarinda mulai menyadari bahwa perempuan yang jumlahnya sebesar 417.991 dari penduduk kota Samarinda adalah sebuah potensi pembangunan yang tidak boleh disia-siakan. Kualitas pembangunan tidak hanya ditentukan oleh tingkat partisipasi dan keterlayanan masyarakat secara umum, tetapi juga analisis terhadap keadilan dan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Hal ini juga menjadi target yang ingin dicapai dalam SDGs. Goal ke-5 SDGs adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak.

drg. Deasy Evriyani, M.Si

*Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Samarinda*





KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera untuk kita semua

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya buku "Profil Gender dan Anak" Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Penyusunan buku ini memiliki manfaat secara internal dan eksternal. Secara internal buku ini bermanfaat dalam menginisiasi penyediaan dan pengelolaan data terpilah berdasarkan gender dan anak sebagai komitmen untuk mendukung pembangunan yang responsif gender dan perlindungan hak anak.

Guna menyusun buku ini kami melakukan serangkaian aktivitas mulai diskusi, penggalan bukti-bukti, penelitian bukti- bukti data atau dokumen, dan melakukan metadata pada semua OPD yang terkait dalam mendukung pembangunan nasional khususnya di kota Samarinda

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian buku ini. Kami menyadari bahwa buku ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Untuk itu kami sangat terbuka atas saran, kritik, dan masukan dalam perbaikan penyusunan buku selanjutnya. Akhirnya kami berharap buku ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Erni Agus Wulan Arioni, SE

*Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Samarinda*



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Maksud Dan Tujuan	6
1.3. Sumber Data	7
BAB II KAJIAN LITERATUR	10
2.1. Gender Dan Kesetaraan Gender	10
2.2. Pengarusutamaan Gender Dan Pembangunan	12
2.3. Isu-Isu Gender	15
2.4. Satu Data Gender Dan Anak	16
2.5. Data Terpilah	18
BAB III METODE PENGUMPULAN DATA	23
3.1. Teknik Pengumpulan Data	23
3.2. Jenis Data Dan Sumber Data Per Sub Urusan	23
3.3. Jenis Data Dan Sumber Data Per Indikator Dan Sumber Data	26
BAB IV GAMBARAN UMUM	68
4.1. Kondisi Geografis	68
4.2. Gambaran IPM, IPG, Dan IGD	82
BAB V DATA SATU GENDER	89
5.1. Kualitas Hidup Perempuan	89
5.2. Perlindungan Perempuan	132
5.3. Kualitas Keluarga	136
5.4. Pemenuhan Hak Anak	146
5.5. Perlindungan Khusus Anak	198
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	213
6.1. Kesimpulan	213
6.2. Saran	213
DAFTAR PUSTAKA	215



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Gender dan Anak Menurut PPPA bahwa Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Satu Data Gender Dan Anak.....	24
Tabel 2 Data Gender dan Anak Menurut PPPA bahwa Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Satu Data Gender Dan Anak dan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	74
Tabel 3 Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kota Samarinda.....	70
Tabel 4 Persentase Luas Kecamatan terhadap Luas Kabupaten/Kota	70
Tabel 5 Jumlah Kelurahan dan Rukun Tetangga menurut Kecamatan di Kota Samarinda	72
Tabel 6 Letak, Batas, dan Luas Kota Samarinda.....	73
Tabel 7 Nama dan Panjang Sungai di Kota Samarinda.....	74
Tabel 8 Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Meteorologi APT Pranoto (Suhu dan Udara).....	75
Tabel 9 Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Meteorologi APT Pranoto (Kecepatan Angin dan Tekanan Udara)	76
Tabel 10 Pengamatan Unsur Iklim dari Jumlah Curah Hujan	77
Tabel 11 Jumlah Anggota DPRD Kota Samarinda menurut Masa Jabatan dan Jenis Kelamin Masa Jabatan Tahun 2019-2023	78
Tabel 12 Jumlah PNS menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Samarinda.....	80
Tabel 13 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Jabatan dan Jenis Kelamin.....	80
Tabel 14 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kota Samarinda	81
Tabel 15 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Indikator di Kota Samarinda	83

Tabel 16 Indeks Pembangunan Gender	84
Tabel 17 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	85
Tabel 18 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Dimensi Penyusunnya	86
Tabel 19 Jumlah Kebijakan dalam Rangka Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif.....	90
Tabel 20 Jumlah Kebijakan dalam Rangka Peningkatan Proporsi Perempuan sebagai Pengambil Keputusan di lembaga Eksekutif	91
Tabel 21 Jumlah Kebijakan dalam Rangka Peningkatan Proporsi Perempuan di Posisi Manajerial.....	92
Tabel 22 Angka Partisipasi Kasar (APK)	96
Tabel 23 Persentase Angka Putus Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin	96
Tabel 24 Persentase Penduduk Usia Kerja 15 tahun ke atas menurut Tingkat Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan	97
Tabel 25 Akses Penggunaan Internet pada Perempuan	99
Tabel 26 Jumlah Perempuan menjadi Tenaga Pendidik/Guru	99
Tabel 27 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Samarinda	106
Tabel 28 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Samarinda Tahun 2023	107
Tabel 29 Anggota DPRD Berdasarkan Partai dan Jenis Kelamin.....	108
Tabel 30 Jumlah Persentase Keterwakilan Perempuan sebagai Pengambilan Keputusan di Lembaga Eksekutif.....	109
Tabel 31 Persentase Penduduk menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan di Kota Samarinda.....	114
Tabel 32 Data Jumlah Anggota Koperasi berdasarkan jenis kelamin kota Samarinda Tahun 2023	115
Tabel 33 Jumlah dan Persentase Perempuan Miskin Ekstrem yang Terbentuk	115
Tabel 34 Perkawinan Anak	116



Tabel 35 Jumlah Fasilitas Kegiatan Budaya. Kreatifitas dan Rekreatif	116
Tabel 36 Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin Perkelurahan Kota Samarinda Tahun 2023	119
Tabel 37 Jumlah dan Persentase Perangkat Daerah yang telah Melembagakan dan Melaksanakan PUG	120
Tabel 38 Jumlah Kebijakan dan Peraturan Perundangan tentang Pengarusutamaan Gender tingkat Nasional.....	120
Tabel 39 Jumlah Kebijakan dan Peraturan Perundangan tentang Pengarusutamaan Gender Tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota.....	121
Tabel 40 Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai rencana pencapaian PUG	122
Tabel 41 Jumlah Kelompok Kerja (POKJA) PUG di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Terbentuk.....	123
Tabel 42 Jumlah Kelompok Kerja (POKJA) PUG di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Aktif	123
Tabel 43 Jumlah dan Persentase Perangkat Daerah yang terwakili dalam Kelompok Kerja (POKJA) PUG di Provinsi dan Kabupaten/Kota	124
Tabel 44 Jumlah Dan Persentase Focal Point Perangkat Daerah....	125
Tabel 45 Jumlah dan Persentase perencana perangkat daerah yang terlatih dan tersertifikasi untuk melaksanakan PPRG	125
Tabel 46 Jumlah SDM (inspektur pembantu dan auditor) pada Inspektorat yang sudah terlatih PUG.....	126
Tabel 47 Jumlah fasilitator PUG yang telah mendapat Sertifikat Pelatihan sebagai Fasilitator	127
Tabel 48 Jumlah Gender Champion di Kabupaten/ Kota	127
Tabel 49 Jumlah dan Persentase alokasi anggaran Dinas PPPA atau sejenisnya untuk Fasilitasi PUG	128
Tabel 50 Persentase Perangkat Daerah (diluar lembaga drivers) Kabupaten/Kota yang sudah memiliki alokasi anggaran untuk Kegiatan Pelembagaan PUG.....	129



Tabel 51 Jumlah Lembaga Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha yang termasuk dalam Pokja PUG	130
Tabel 52 Jumlah Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat (PUSPA) yang Terbentuk dan di Sahkan.....	130
Tabel 53 Jumlah Lembaga Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha yang terlibat dalam kegiatan PUG dan PPPA	131
Tabel 54 Korban Perempuan dan Anak Perempuan UPTD.....	134
Tabel 55 Angka Perceraian	136
Tabel 56 Jumlah Surat Nikah /Buku Nikah yang Dikeluarkan menurut Kecamatan di Kota Samarinda	137
Tabel 57 Jumlah dan Presentasi Rumah Tidak Layak Huni Samarinda	139
Tabel 58 Persentase Penduduk menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan di Kota Samarinda.....	140
Tabel 59 Indikator Kemiskinan di Kota Samarinda.....	142
Tabel 60 Persentase Kepala Rumah Tangga dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah Tahun 2023.....	142
Tabel 61 Cakupan Penerima Program Indonesia Sehat.....	143
Tabel 62 Pernikahan Dengan Usia <19 TH per Kecamatan	144
Tabel 63 Jumlah dan Persentase Lansia Terlantar	145
Tabel 64 Peraturan Perundangan/Perda terkait PHA.....	146
Tabel 65 Kebijakan teknis (perencanaan dan penganggaran) PHA	149
Tabel 66 Jumlah Kebijakan SDM dan Pengorganisasian PHA.....	156
Tabel 67 Kebijakan Partisipasi Anak, Masyarakat, Dunia Usaha dan Media dalam PHA.....	158
Tabel 68 Jumlah dan Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak sesuai Standar	159
Tabel 69 Jumlah Gugus Tugas Kota Layak Anak yang Terbentuk ..	160
Tabel 70 Jumlah Gugus Tugas Kota Layak Anak yang Aktif.....	160
Tabel 71 Jumlah Kota yang telah menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA.....	160
Tabel 72 Jumlah Kota yang memiliki Data dan Informasi Profil Anak	161



Tabel 73 Jumlah Kecamatan Layak Anak (KELANA).....	161
Tabel 74 Jumlah Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELA).....	162
Tabel 75 Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	164
Tabel 76 Jumlah Media Promosi tentang Kota Layak Anak.....	168
Tabel 77 Jumlah Lembaga Masyarakat (LM) yang berperan dalam mewujudkan Kota	170
Tabel 78 Jumlah Dunia Usaha (DU) yang berperan dalam Mewujudkan Kota Layak Anak	173
Tabel 79 Jumlah Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Daerah yang terbentuk.....	175
Tabel 80 Jumlah Media yang Berperan dalam Mewujudkan Kota Layak Anak	175
Tabel 81 Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran.....	178
Tabel 82 Jumlah PDDK Usia 0-18 Tahun (Kurang 1 hari) Memiliki Akte Lahir Tahun 2023.....	179
Tabel 83 Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA).....	180
Tabel 84 Jumlah Forum Anak Menurut Kecamatan/Kelurahan.....	181
Tabel 85 Persentase Perkawinan Anak	185
Tabel 86 Persentase Anak Perempuan Usia 15-19 Tahun yang telah Menikah	185
Tabel 87 Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memiliki PUSPAGA atau (Pusat Pembelajaran Keluarga)	186
Tabel 88 Jumlah SDM pada Puspaga, LK3, LPKS, PPKS, BKB/BKR/Sejenisnya telah dilatih Konvensi Hak Anak.....	186
Tabel 89 Data Perpustakaan dan TBM Kota Samarinda Tahun 2024	187
Tabel 90 Jumlah Ketersediaan Taman Kota Dengan Akses Wifi Di Kota Samarinda Tahun 2023	188
Tabel 91 Jumlah dan Persentase sekolah yang memiliki rute aman dan selamat (RASS) di Kota Samarinda Tahun 2023	189
Tabel 92 Jumlah Ketersediaan Titik Zona Selamat di sekolah	189



Tabel 93 Jumlah Bayi (0-59) yang Diukur untuk Data Stunting Tahun 2023	193
Tabel 94 Persentase Anak yang Merokok.....	195
Tabel 95 Data Puskesmas Ramah Anak Kab/ Kota	196
Tabel 96 Presentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum	196
Tabel 97 Jumlah Presentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi yang Layak Tahun 2023	197
Tabel 98 Jumlah Presentase Sekolah Ramah Anak (SRA) Tahun 2023	197
Tabel 99 Jumlah Kasus dan Korban Kekerasan Seksual pada Anak	199
Tabel 100 Jumlah Kasus dan Korban Kekerasan Fisik pada Anak...	201
Tabel 101 Jumlah Kasus dan Korban Kekerasan Emosional pada Anak	202
Tabel 102 Jumlah Kasus Pengaduan Kekerasan Anak.....	204
Tabel 103 Persentase Anak Korban Penelantaran.....	205
Tabel 104 Persentase Anak Penyandang Disabilitas yang Terlayani	206
Tabel 105 Jumlah Klien Balai Rehabilitas Tanah Merah Berdasarkan Jenis Kelamin Per Kecamatan	206
Tabel 106 Jumlah dan Persentase pengguna NAPZA Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023	207
Tabel 107 Jumlah dan Persentase pengguna NAPZA Berdasarkan Usia	208
Tabel 108 Anak Berkonflik Dengan Hukum Tahun 2023	208
Tabel 109 Persentase Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) (khusus pelaku) yang terselesaikan	210
Tabel 110 Presentase Angka Korban Penculikan, Penjualan, dan/atau Perdagangan	210
Tabel 111 Persentase Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang...	211



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Kota Samarinda	69
Gambar 2 Jumlah Kelurahan dan Rukun Tetangga menurut Kecamatan di Kota Samarinda	71
Gambar 3 Persentase Luas Wilayah Kecamatan terhadap Luas Kota Samarinda	73
Gambar 4 Rata-rata Suhu Menurut Bulan di Kota Samarinda	75
Gambar 5 Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda menurut Masa Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2023	78
Gambar 6 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin.....	79
Gambar 7 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin	81
Gambar 8 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	89
Gambar 9 Harapan Lama Sekolah (Tahun)	93
Gambar 10 Rata-rata Lama Sekolah (TLS) menurut Jenis Kelamin (Tahun).....	93
Gambar 11 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin.....	94
Gambar 12 Angka Partisipasi Murni (APM) Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	95
Gambar 13 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun keatas menurut Karakteristik dan Ijazah Tertinggi yang Dimiliki	97
Gambar 14 Persentase Penduduk Usia 25 Tahun keatas dengan Pendidikan SMA keatas menurut Jenis Kelamin (Persen)....	98
Gambar 15 Umur Harapan Hidup (UHH).....	100
Gambar 16 Perempuan Penderita HIV/AIDS	101
Gambar 17 Angka Kematian Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas di Kota Samarinda	102
Gambar 18 Jumlah Ibu Nifas yang Mendapatkan Vitamin A	103
Gambar 19 Persentase Pertolongan Persalinan di Kota Samarinda	104

Gambar 20 Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan di Kota Samarinda.....	105
Gambar 21 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Samarinda.....	106
Gambar 22 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Samarinda	107
Gambar 23 Jumlah Jaksa di Kejaksaan Negeri Tahun 2023.....	110
Gambar 24 Jumlah Hakim dan Panitera di Pengadilan Negeri.....	111
Gambar 25 Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Dewasa dan Anak di Kota Samarinda	112
Gambar 26 Jumlah Perempuan Pengurus dan Petugas Lapas Kota Samarinda Tahun 2023	113
Gambar 27 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan, TPPO, dan Pelanggaran Hak-Hak Perempuan Lainnya yang Melapor ke Lembaga Layanan.....	133
Gambar 28 Jumlah Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)/trafficking	135
Gambar 29 Jumlah Data Perceraian per Kecamatan di Kota Samarinda	137
Gambar 30 Persentase Penduduk Usia 0-18 Tahun (Kurang 1 Hari) per Kecamatan yang Memiliki Akte Kelahiran.....	138
Gambar 31 Jumlah Balita Gizi Buruk Tahun 2023	139
Gambar 32 Persentase Penduduk menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan di Kota Samarinda.....	141
Gambar 33 Persentase Penduduk Miskin di Kota Samarinda	141
Gambar 34 Cakupan Penerima Program Indonesia Pintar Tahun 2023	143
Gambar 35 Pernikahan dengan Usia <19 Th per Kecamatan Kota Samarinda.....	145
Gambar 36 Persentase Kepemilikan Akta Lahir	178
Gambar 37 Jumlah PDDK Usia 0-18 Tahun	180
Gambar 38 Jumlah Pengurus Forum Anak Berdasarkan Jenis Kelamin per Kecamatan	184



Gambar 39 Jumlah Perpustakaan di Kota Samarinda.....	188
Gambar 40 Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan di Kota Samarinda.....	190
Gambar 41 Jumlah Kematian Bayi Tahun 2023	190
Gambar 42 Jumlah Kematian Neonatal Tahun 2023	191
Gambar 43 Jumlah Kematian Post Neonatal Tahun 2023.....	191
Gambar 44 Jumlah Kematian Balita 2023	192
Gambar 45 Prevalensi Balita-Balita Berat Badan Kurang pada Puskesmas Kota Samarinda	192
Gambar 46 Jumlah Bayi (0-59) yang Diukur untuk Data Stunting..	194
Gambar 47 Pemberian ASI Eksklusif pada Bayi Usia < 6 Bulan	194
Gambar 48 Presentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan IMD (Inisiasi Menyusui Dini).....	195
Gambar 49 Jumlah Kasus dan Korban pada Anak yang Memerlukan Perlindungan yang Terlayani sesuai Standar	198
Gambar 50 Jumlah Kasus dan Korban Kekerasan Perlakuan Salah Lainnya	199
Gambar 51 Jumlah Kasus dan Korban Kekerasan Seksual pada Anak	200
Gambar 52 Jumlah Kasus dan Korban Kekerasan Fisik pada Anak.	201
Gambar 53 Jumlah Kasus dan Korban Kekerasan Psikis (Emosional) pada Anak.....	203
Gambar 54 Jumlah Kasus dan Korban Pengaduan Kekerasan Anak	204
Gambar 55 Jumlah Laporan Pengaduan Anak Korban Kekerasan Ditindak Lanjuti	205
Gambar 56 Persentase Narapidana Anak Kota Samarinda.....	209
Gambar 57 Persentase Tahanan Anak Kota Samarinda.....	209





BAB I

PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan terjaminnya kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan pembangunan nasional. Beragamnya tujuan dan hambatan kemajuan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat merupakan faktor yang perlu diperhatikan dalam mengidentifikasi peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu kunci pembangunan yang efektif. Dalam proses ini diperlukan perencanaan yang menempatkan masyarakat berperan aktif sebagai subjek pembangunan. Baik perempuan maupun laki-laki harus menjadi aktor dan bertindak layaknya manusia. Pengarusutamaan gender dalam strategi pembangunan kemudian akan digunakan untuk mewujudkan gagasan ini menjadi kenyataan. Perhatian terhadap isu gender ini sejalan dengan pergeseran paradigma pembangunan dari pendekatan keamanan dan kestabilan (*security*) menuju pendekatan kesejahteraan dan keadilan (*prosperity*) atau dari pendekatan produksi ke pendekatan kemanusiaan dalam suasana yang lebih demokratis dan terbuka. Terjadinya perubahan paradigma pembangunan seperti ini, menjadi dasar untuk mengatasi persoalan gender.

Gender merupakan karakteristik sosial yang membedakan antara perempuan dan laki-laki dalam peran, status relasi yang didapat dengan cara belajar yang memiliki sifat beragam dan dinamis sesuai budaya dan status sosial. Terbentuknya stigma perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan oleh karena disosialisasikan dan dikonstruksikan secara sosial atau kultural melalui proses perkembangan pola berfikir masyarakat. Kesenjangan gender di Indonesia relatif masih sangat tinggi. Secara nyata tampak dari kondisi ketimpangan gender masih terjadi pada berbagai aspek bidang pembangunan seperti di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, budaya dan bidang politik.



Tingkat pendidikan perempuan masih tertinggal jauh dengan jenjang pendidikan yang di capai laki-laki. Ketertinggalan perempuan dalam bidang ekonomi terlihat dari kemiskinan yang dialami oleh perempuan yang ditunjukkan dengan rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan. Maraknya kasus tindak kekerasan serta rendahnya indeks pembangunan dan pemberdayaan gender adalah indikator ketertinggalan perempuan dibidang sosial dan budaya. Sedangkan masih terbatasnya perempuan yang menjadi anggota legislatif merupakan indikasi masih rendahnya partisipasi perempuan dalam bidang politik. Kondisi ini menggambarkan bahwa permasalahan gender masih menjadi isu strategis yang memerlukan penanganan serius.

Dokumen perencanaan pembangunan saat ini juga telah memasukkan isu kesetaraan gender sebagai satu hal penting untuk menghapus berbagai macam diskriminasi gender. Di tingkat global, salah satu upaya tersebut adalah mencantumkan gender sebagai salah satu tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2015-2030, tepatnya dalam tujuan SDGs kelima, yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan. di tingkat nasional, kesetaraan dan keadilan gender merupakan salah satu tujuan pembangunan yang tercantum dalam RPJPN 2005-2025, sekaligus menjadi poin dalam tiga isu strategis RPJMN 2015-Ketiga isu tersebut adalah meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan, meningkatkan perlindungan bagi perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dan meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan.

Data gender menjadi elemen pokok bagi terselenggaranya PUG. Data gender dapat membantu para pengambil keputusan antara lain untuk: 1) mengidentifikasi perbedaan (kondisi/perkembangan) keadaan perempuan dan laki-laki, dalam dimensi tempat dan waktu; 2) mengevaluasi dampak dari intervensi pembangunan terhadap



perempuan dan laki-laki; dan 3) mengidentifikasi masalah, membangun opsi dan memilih opsi yang paling efektif untuk kemaslahatan perempuan dan laki-laki yang responsif terhadap masalah, kebutuhan, pengalaman perempuan dan laki-laki.

Pengarusutamaan Gender (gender mainstreaming) merupakan sebuah upaya untuk menghilangkan hambatan hambatan yang menyebabkan tidak tercapainya kesetaraan dan keadilan gender (marginalisasi, stereotype, subordinansi, kekerasan dan beban ganda). Secara internasional Pemerintah Indonesia telah meratifikasi kesepakatan global PBB pada *Convention on the Elimination of all form of discrimination against women*, dimana berkewajiban untuk menghapus diskriminasi dan pemajuan kesetaraan dan keadilan gender baik yang bersifat sementara maupun berkesinambungan.

Sesuai dengan Inpres nomor 9/2000 tentang Pengarusutamaan gender (PUG) adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, dan program pembangunan nasional. Pelaksanaan PUG diintruksikan kepada seluruh kementerian maupun lembaga pemerintah dan non pemerintah di pemerintah nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota untuk melakukan penyusunan program dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dengan mempertimbangkan permasalahan kebutuhan aspirasi perempuan pada pembangunan dalam kebijakan, program dan kegiatan. Strategi tersebut dapat dilaksanakan melalui sebuah proses yang memasukkan analisa gender kedalam program kerja, pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan kepentingan perempuan dan laki-laki kedalam proses pembangunan

Dalam perspektif gender, penyediaan data, analisis dan pelaporan terpisah menurut jenis kelamin dimaksudkan untuk menyajikan data dan informasi tentang pengalaman khusus dalam kehidupan sebagai perempuan dan pengalaman sebagai laki-laki. Data menurut jenis kelamin ini merupakan data dasar untuk melakukan



analisa gender dan harus dikombinasi dengan variable-variabel lainnya (sesuai dengan keperluannya) seperti umur, pendidikan, status sosial-ekonomi, latar belakang budaya, kecacatan. Data terpilah berdasarkan jenis kelamin juga menjadi inti dalam menghasilkan Gender Statistik yaitu informasi yang mengandung isu gender, sebagai hasil dari analisis gender.

Terbatasnya ketersediaan data gender menimbulkan kesulitan dalam pengukuran kesenjangan pencapaian pembangunan, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, antara lain ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPM merupakan ukuran kualitas hidup berbasis pada kapabilitas dasar penduduk yang diperluas. Sedangkan IPG mengukur hal yang sama tetapi terfokus pada faktor ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Sementara itu IDG mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi dan politik dalam pengambilan keputusan yang pada prinsipnya IDG melihat sejauh mana kapabilitas yang dicapai perempuan dapat dimanfaatkan di berbagai bidang kehidupan.

Menindaklanjuti persoalan di atas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan sebagai upaya memfasilitasi dan meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan ketersediaan data gender menurut jenis kelamin di daerahnya melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Satu Data Gender Dan Anak dan Permen Nomor 03 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Kebijakan ini bertujuan untuk memberi acuan pelaksanaan bagi pemerintah daerah dalam upaya pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis data terpilah secara terpadu sebagai bahan.



1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Tujuannya:

- 1) Dengan Penyelenggaraan Satu data Gender dan Anak mewujudkan tata kelola Data Gender dan Data Anak yang diselaraskan dengan penyelenggaraan Satu Data Indonesia
- 2) Pembangunan Pengarusutamaan Gender dan Anak terutama pada Indikator Data Terpilah di Kota Samarinda.
- 3) Peningkatan Peran Data Pilah Profil Gender dan Anak dalam mendukung Perencanaan, Evaluasi dan Pengambilan Keputusan dalam suatu organisasi
- 4) Meningkatkan Penyediaan Data Pilah Profil Gender dan Anak bagi masyarakat Kota Samarinda
- 5) Meningkatkan Penyediaan Data Gender dan Anak (SIGA) di semua sektor baik pemerintah atau swasta di Kota Samarinda.
- 6) Mendorong keterbukaan, transparansi, dan kualitas Data Gender dan Data Anak dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah yang responsive gender dan peduli anak.

2. Manfaatnya:

- a) Secara teoritis, buku ini dapat menambah pengetahuan tentang gambaran umum situasi kesetaraan gender di Kota Samarinda.
- b) Secara praktis, buku ini dapat digunakan sebagai referensi bagi pengambil kebijakan publik dan pihak-pihak terkait dengan data pembuka wawasan tentang kesetaraan gender untuk mengintegrasikan PUG dalam siklus pembangunan dan bahan kajian untuk proses pembangunan berkelanjutan.



1.3. SUMBER DATA

Data penyusunan buku ini berasal dari hasil kajian data sekunder, observasi, dan wawancara mendalam. Data sekunder dikumpulkan dari beberapa instansi terkait di wilayah Kota Samarinda, yaitu:

- 1) Pengadilan Negeri Kota Samarinda
- 2) Kejaksaan Negeri Kota Samarinda
- 3) Kantor Wilayah Kemenhum dan HAM Kaltim Kota Samarinda
- 4) Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda
- 5) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
- 6) Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
- 7) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
- 8) Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda
- 9) Bapperida Kota Samarinda
- 10) BPS Kota Samarinda
- 11) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
- 12) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
- 13) Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
- 14) Dinas Perkim Kota Samarinda
- 15) Dinas PUPR Kota Samarinda
- 16) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
- 17) Dinas Kesehatan Kota Samarinda
- 18) Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
- 19) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
- 20) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Samarinda
- 21) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
- 22) Dinas Perdagangan Kota Samarinda
- 23) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
- 24) Dinas Perikanan Kota Samarinda
- 25) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
- 26) Bagian Kesra Kota Samarinda



- 27) Bagian Hukum Kota Samarinda
- 28) KPU Kota Samarinda
- 29) Balai Rehabilitasi Tanah Merah Kota Samarinda
- 30) Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kota Samarinda
- 31) UPPA (Unit Pelayanan Perempuan & Anak) Polresta Kota Samarinda
- 32) UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Samarinda
- 33) Puspaga Cinta Syejati Kota Samarinda





BAB II

KAJIAN LITERATUR



BAB II KAJIAN LITERATUR

2.1 GENDER DAN KESETARAAN GENDER

Pengertian gender dengan penafsiran berbeda-beda kerap menimbulkan respon yang tidak proporsional. Secara etimologis, kata gender dalam bahasa Indonesia dipinjam dari bahasa Inggris yang secara harfiah “gender” berarti jenis kelamin. Kata Gender telah digunakan di Amerika tahun 1960an sebagai bentuk perjuangan secara radikal, konservatif, sekuler untuk menyuarakan eksistensi perempuan yang kemudian melahirkan kesadaran gender.

Menurut Eline Sholwalter (1989) sebagaimana dikemukakan Umar (1999: 36) bahwa wacana gender mulai berkembang pada tahun 1977, ketika kelompok feminis London meninggalkan isu lama yang disebut dengan *patriarchal* kemudian menggantikannya dengan isu gender. Sejak itu konsep gender memasuki bahasan dalam berbagai seminar, diskusi maupun tulisan di seputar perubahan sosial dan pembangunan dunia ke tiga. Wood (2001) mendefinisikan gender sebagai suatu konstruksi sosial yang bervariasi lintas budaya, berubah sejalan perjalanan waktu dalam suatu kebudayaan tertentu, bersifat relasional, karena femininitas dan maskulinitas memperoleh maknanya dari fakta dimana masyarakat kita yang menjadikan mereka berbeda.

Adapun di Indonesia istilah gender lazim dipergunakan di Kantor Menteri Negara Peranan Wanita dengan ejaan “jender”, diartikan sebagai interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin yakni laki-laki dan perempuan (Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, 1992 : 2), Gender merupakan istilah yang muncul pada tahun 1990-an setelah muncul gerakan feminisme yang didasari tuntutan akan posisi yang adil terhadap kedudukan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, mengingat ketidakadilan yang dialami baik dari segi struktural maupun kultural (Afandi, 2019). Gender merupakan keseluruhan atribut sosial tentang laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil dari konstruksi sosial dalam masyarakat. Gender



berbeda dengan seks, dimana seks merupakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan secara biologis. Sementara gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara sosial, yakni berkaitan dengan peran, perilaku, tugas, hak, dan fungsi dalam kehidupan bermasyarakat. Gender merupakan dasar menentukan perbedaan kontribusi laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kebudayaan kolektif, yang merujuk pada perbedaan dan relasi sosial antara anak perempuan dan anak laki-laki (Dewi, 2020).

Studi tentang gender bukan hanya sekedar sebuah upaya memahami perempuan atau laki-laki secara terpisah, tetapi bagaimana menempatkan keduanya dalam konteks sistem sosial yang integral. Konstruksi sosial yang cenderung membedakan laki-laki dan perempuan, berdampak tidak hanya pada pengalaman yang berbeda antara keduanya, tetapi terjadi ketidaksetaraan dan ketidakadilan, gender di bidang sosial, ekonomi, politik dan hukum.

Menurut Muhtar dalam Froom (2002:56) gender dapat diartikan sebagai "jenis kelamin sosial atau konotasi masyarakat untuk menentukan peran sosial berdasarkan jenis kelamin". Sedangkan menurut Fakih dalam Analisis Gender dan Transformasi Sosial (2008:8) mendefinisikan gender sebagai "suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural". Pengertian gender yang lebih kongkrit dan lebih operasional dikemukakan oleh Nasarudin Umar (2012) bahwa gender adalah konsep kultural yang digunakan untuk memberi identifikasi perbedaan dalam hal peran, perilaku dan lain-lain antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di dalam masyarakat yang didasarkan pada rekayasa sosial.

Konstruksi sosial dalam masyarakat yang memberikan perlakuan, norma, dan pandangan yang berbeda terhadap laki-laki dan perempuan pada kenyataannya berdampak terhadap adanya diskriminasi gender. Diskriminasi gender ini menimbulkan perbedaan capaian antara laki-laki dan perempuan yang disebut sebagai ketimpangan gender. Lebih lanjut menyebutkan bahwa ketimpangan



ini diperkuat dengan tumbuhnya budaya patriarki yang lebih mengutamakan laki-laki dari perempuan. Budaya patriarki menempatkan laki-laki sebagai pihak yang bertanggungjawab pada peran publik, sedangkan perempuan hanya berkutat pada peran domestik. Sebenarnya perempuan memiliki hak untuk memilih dan menjalani peran domestik maupun publik. Namun, masalah terjadi ketika peran yang dijalani perempuan dicampuri oleh tekanan pihak luar, bahkan pihak terdekat

Sehubungan dengan sejumlah definisi di atas, penting untuk ditekankan bahwa konsep gender berbeda dengan konsep jenis kelamin. Jenis kelamin merujuk pada bentuk dan fungsi biologis yang bersifat kodrati dan tidak dapat dipertukarkan. Sementara itu konsep gender mengacu pada perbedaan-perbedaan dan relasi sosial antara perempuan dan laki-laki yang dibentuk dan dipelajari sehingga dapat berubah seiring perkembangannya. Perbedaan peran gender tidak menjadi masalah sepanjang tidak menimbulkan ketimpangan gender (*gender inequity*). Perbedaan dan ketidaksetaraan ini dapat dimanifestasikan dalam beragam bentuk dan bisa saja berbeda antar negara atau sektor tertentu.

Dari pengertian gender menurut para ahli di atas dapat diambil kesimpulan bahwa gender adalah seperangkat sikap, peran, tanggung jawab, fungsi, hak, dan perilaku yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya atau lingkungan masyarakat tempat manusia itu tumbuh dan dibesarkan. Artinya perbedaan sifat, sikap dan perilaku yang dianggap khas perempuan atau khas laki-laki atau yang lebih populer dengan istilah feminitas dan maskulinitas, terutama merupakan hasil belajar seseorang melalui suatu proses sosialisasi yang panjang di lingkungan masyarakat, tempat ia tumbuh dan dibesarkan.

2.2 PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBANGUNAN

Pengarusutamaan gender adalah strategi yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan



Indonesia dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan.

Pengertian pengarusutamaan gender adalah salah satu strategi pembangunan yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, dana program, proyek dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Integrasi perspektif gender semakin terus digalakkan baik pada tataran kebijakan internasional maupun dalam skala nasional seperti di Indonesia. Komitmen pemerintah dalam memastikan pembangunan manusia Indonesia berbasis gender diperkuat melalui turut sertanya Negara Indonesia dalam memenuhi target pembangunan di tingkat global. Prinsip utama pembangunan manusia adalah memastikan manusia, baik laki-laki maupun perempuan memiliki banyak pilihan dalam kehidupannya, menyadari potensi yang ada pada dirinya, dan kebebasan menjalani kehidupan secara terhormat dan berharga (UNDP, 2015).

Pengintegrasian gender di berbagai bidang pembangunan melalui pengarusutamaan gender belum menunjukkan hasil optimal dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Padahal tata cara pelaksanaannya sudah diatur dalam Permendagri No. 67 Tahun 2011 mengenai Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Permendagri ini diantaranya mengatur kewajiban pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender, yang dituangkan dalam RPJMD, Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja SKPD.

Tujuan diterbitkannya Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah adalah untuk:



- 1) Memberikan acuan bagi aparaturnya Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
- 2) Mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- 3) Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;
- 4) Mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- 5) Meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, tanggungjawab laki-laki; dan perempuan sebagai insan dan sumber dayapembangunan; dan
- 6) Meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan

Optimalisasi peran Pokja PUG dan Gender Focal Point dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Membangun kesadaran kritis setiap Sumber Daya Manusia (SDM)² pada SKPD untuk mewujudkan visi dan misi daerah (provinsi/kabupaten/kota).
- 2) Penguatan kapasitas lembaga driver 3 PUG, agar dapat memfasilitasi seluruh SKPD dalam perencanaan dan penganggaran responsif gender.
- 3) Mendorong seluruh SKPD mengintegrasikan gender dalam proses dan dokumen perencanaan dan penganggarnya.
- 4) Menetapkan indikator makro gender dan target.
- 5) Mengembangkan collaborative governance

Mengutip United Nations (2002), terdapat sejumlah tahapan dalam mengimplementasikan PUG dalam pembangunan. Sebagai langkah pertama, perspektif gender harus dimasukkan dalam perumusan masalah kebijakan/pertanyaan yang harus ditangani.



Definisi masalah akan menentukan ruang lingkup untuk memeriksa isu-isu gender dan untuk mengembangkan pendekatan konstruktif terhadap perbedaan dan ketidaksetaraan gender. Selain itu, perumusan rekomendasi untuk pilihan kebijakan harus mencerminkan informasi dan analisis tentang isu-isu kesetaraan gender yang dihasilkan dari Langkah sebelumnya.

2.3 ISU-ISU GENDER

Isu gender adalah suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan perempuan dan laki-laki atau ketimpangan gender. Kondisi ketimpangan ini diperoleh dengan membandingkan kondisi yang dicita-citakan (kondisi normatif) dengan kondisi gender sebagaimana adanya (kondisi subyektif). (KPPPA, 2012: xviii)

Banyak isu-isu yang muncul kemudian tertuju pada kesetaraan gender yang dialami antara laki-laki dan perempuan. Padahal sebetulnya kesetaraan gender ini tidak melulu tentang perempuan dan laki-laki, kesetaraan gender juga sebenarnya terjadi pada kelompok-kelompok rentan atau kelompok minoritas. Kemunculan persoalan gender ini muncul pada abad ke-19 di Prancis, ketika upah yang didapat oleh laki-laki dan perempuan saat bekerja sangat berbeda. Hal inilah yang kemudian memunculkan ketidakadilan antara perempuan dan laki-laki. Faktor biologis juga dijadikan sebagai titik tolak awal kemunculan gender.

Ketidaksetaraan gender masih menjadi isu besar meskipun sudah mengalami perubahan yang signifikan dalam dekade terakhir. Ketidaksetaraan gender ini ditandai dengan adanya ketimpangan relasi/kondisi (perbedaan, akses, partisipasi, kontrol, manfaat pembangunan) bagi laki-laki dan perempuan yang dipengaruhi oleh budaya dan kebijakan. Relasi/kondisi laki-laki dan perempuan yang timpang ini biasa disebut sebagai **ISU GENDER**.

Isu-isu dan permasalahan yang disebabkan oleh ketimpangan gender. Bagian dari permasalahan adalah diskriminasi terhadap perempuan, terutama dalam hal akses dan penguasaan atas sumber-



sumber kehidupan, kesempatan, status, peran, hak, dan penghargaan. Ciri Isu Gender antara lain:

1. Menyangkut Relasi/Kondisi laki-laki dan Perempuan
2. Adanya ketimpangan kondisi (perbedaan akses, partisipasi, control dan manfaat antara laki-laki dan perempuan;
3. Adanya rasa ketidakadilan yang dialami laki-laki dan perempuan yang dapat membentuk marginalisasi, sub ordinasi, stereotype, beban kerja maupun kekerasan
4. Adanya unsur pengaruh budaya dan kebijakan

Berbagai usaha telah dilakukan, termasuk perubahan terhadap peran serta perempuan di segala bidang kehidupan. Namun tidak dapat dipungkiri, kesetaraan gender yang diharapkan terjadi belum sepenuhnya tercapai. Kesenjangan gender tampak masih terjadi di berbagai bidang pembangunan, misalnya di bidang pendidikan, kesehatan, politik, dan di bidang pemerintahan.

2.4 SATU DATA GENDER DAN ANAK

Pertimbangan melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dan untuk mewujudkan tata kelola serta ketersediaan data gender dan data anak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Satu Data Gender dan Anak;

Menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Satu Data Gender Dan Anak, adapun Ruang lingkup Satu Data Gender dan Anak meliputi Data:

- a. Kualitas Hidup Perempuan;
- b. Perlindungan Perempuan;
- c. Kualitas Keluarga;
- d. Pemenuhan Hak Anak; Dan
- e. Perlindungan Khusus Anak



Penyelenggaraan Satu Data Gender dan Anak dalam kelembagaan Data di tingkat nasional dan daerah dilakukan penyesuaian terhadap penyelenggaraan Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) **Kualitas hidup perempuan** sebagaimana dimaksud dalam Permen Nomor 4 Tahun 2023, Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Permen No 3 Tahun 2023 Pasal 10 memuat data mengenai upaya perbaikan kondisi fisik dan mental perempuan dalam pemenuhan hak dan kebutuhan hidupnya sebagai bagian hak asasi manusia dari berbagai bidang pembangunan, terutama pendidikan, kesehatan, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial budaya, politik, hukum, dan lingkungan hidup.
- (2) **Perlindungan perempuan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b memuat data mengenai segala upaya untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada perempuan serta pemenuhan haknya melalui perhatian yang konsisten, terstruktur, dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.
- (3) **Kualitas keluarga** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c memuat data mengenai kondisi keluarga ditentukan dari dimensi kualitas legalitas dan struktur, kualitas ketahanan fisik, kualitas ketahanan ekonomi, kualitas ketahanan sosial psikologi, dan kualitas ketahanan sosial budaya dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak.
- (4) **Pemenuhan hak anak** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d memuat data anak atas hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, serta hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya.
- (5) **Perlindungan khusus anak** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e memuat data anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi



dan/atau seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak yang menjadi korban pornografi, anak dengan HIV/AIDS, anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, anak korban kejahatan seksual, anak korban jaringan terorisme, anak penyandang disabilitas, anak korban perlakuan salah dan penelantaran, anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya, dan anak dengan masalah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.5 DATA TERPILAH

Data terpisah berdasarkan jenis kelamin (sex-disaggregated data) adalah data kuantitatif atau data kualitatif berdasarkan jenis kelamin yang menggambarkan peran dan kondisi umum mereka dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat. Selain itu, data terpisah berdasarkan jenis kelamin dapat pula berupa data yang menjelaskan insiden khusus yang tidak bisa diperbandingkan antar jenis kelamin seperti Angka Kematian Ibu (AKI), kanker leher rahim, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), korban perdagangan orang (trafficking).

a. Kegunaan Data Terpisah

Data terpisah menurut jenis kelamin berguna untuk:

1. Mengetahui perbedaan keadaan perempuan dan laki-laki berdasarkan tempat dan waktu yang berbeda
2. Melihat hasil intervensi pembangunan terhadap perempuan dan laki-laki
3. Memberi input/masukan untuk melakukan analisis gender
4. Mengidentifikasi masalah, membangun opsi dan memilih opsi yang paling efektif untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender



Pengumpulan data terpilah berdasarkan jenis kelamin diperlukan baik yang bersifat umum maupun Sektoral. Lingkup data terpilah menurut KPP (2009) adalah:

1. Data terpilah dan informasi terpilah berdasarkan jenis kelamin (*sex disaggregated data*) adalah data kuantitatif atau data/informasi kualitatif yang dikumpulkan dan dipresentasikan berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki dan perempuan atau anak laki-laki dan anak perempuan;
2. Data terpilah menurut jenis kelamin adalah variabel-variabel yang sudah terpilah antara laki-laki dan perempuan berdasarkan topik bahasan/hal-hal yang menjadi pendidikan; dan
3. Data dan informasi terpilah menggambarkan peran, kondisi umum dari laki dan perempuan dalam setiap aspek kehidupan, di masyarakat, misalnya angka melek huruf, tingkat pendidikan, kepemilikan usaha, lapangan pekerjaan, perbedaan upah, kepemilikan rumah dan tanah, serta pinjaman dan lainnya

b. Jenis Data Terpilah

Jenis data terpilah menurut jenis kelamin dapat dibedakan ke dalam:

1. Data Time Series, yaitu data yang menggambarkan perbedaan keadaan perempuan dan laki-laki dan atau keadaan insiden khusus berdasarkan perbedaan waktu
2. Data Spasial yaitu data yang menggambarkan perbedaan keadaan
3. perempuan dan laki-laki dan atau keadaan insiden khusus berdasarkan perbedaan wilayah.
4. Data Yang bersifat Khusus yaitu data yang menunjukkan insiden khusus seperti Angka Kematian Ibu (AKI), kekerasan terhadap perempuan, korban HIV/AIDs.



5. Data hasil Kegiatan yaitu data yang menunjukkan hasil kegiatan seperti peserta pelatihan/ kursus.

c. Data bisa disajikan secara:

1. Data statistik kuantitatif, yaitu data berupa angka-angka.
2. Data Kualitatif seperti data yang diperoleh dari observasi, Focus Group Discussion (FGD), wawancara mendalam, atau data hasil riset kualitatif.





BAB III

METODE

PENGUMPULAN

DATA



TEHNIK PENGUMPULAN DATA

WAKTU PELAKSANAAN

Bulan April 2024– Juni 2024



DATA TERPILAH



Jenis Kelamin



Umur



Pendidikan



Status Sosial



Status Ekonomi



Tumbuh Kembang



Kecacatan

sesuai Permen PPPA bahwa Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Satu Data Gender Dan Anak, meliputi, kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, pemenuhan hak anak; dan perlindungan khusus anak.

BAB III METODE PENGUMPULAN DATA

3.1. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Tehnik pengumpulan Data pada buku ini yaitu

1. Waktu pelaksanaan sesuai dengan kesepakatan dengan DPPPA Kota Samarinda yaitu pada Bulan April 2024– Juni 2024. Waktu pelaksanaan ini meliputi penyusunan proposal, pengumpulan data, analisis data, penyusunan laporan dan perbaikan laporan. Studi akan selenggarakan di Kota Samarinda dan dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Samarinda dan instan komponen
2. Data terpilah dengan berbagai variabel selain jenis kelamin dan umur, seperti pendidikan, status sosial, ekonomi, kesehatan, tumbuh kembang, kecacatan dan lain-lain sesuai Permen PPPA bahwa Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Satu Data Gender Dan Anak, meliputi, kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, pemenuhan hak anak; dan perlindungan khusus anak.
3. Penelitian dilakukan dengan deskripsi data dan analisis data pada dua jenis data utama. Jenis data tersebut adalah data terpilah jenis kelamin dan data kelembagaan. Melalui pendekatan penelitian tersebut, Berdasarkan hasil penelitian, akan dapat dikembangkan desain rumusan kebijakan pendidikan, kesehatan dan sektor publik bagi peningkatan kualitas hidup perempuan, anak, dan keluarga, serta masyarakat Kota Samarinda
4. Penyusunan Data Terpilah Gender dan Anak Kota Samarinda Tahun 2024 ini menggunakan sumber data primer (data yang berasal dari kunjungan langsung ke lembaga)

3.2. JENIS DATA DAN SUMBER DATA PER SUB URUSAN

Sesuai Permen PPPA bahwa Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Satu Data Gender Dan Anak, meliputi, data kualitas hidup perempuan,



perlindungan perempuan, kualitas keluarga, pemenuhan hak anak; dan perlindungan khusus anak.

Tabel 1 Data Gender dan Anak Menurut Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Satu Data Gender Dan Anak

No	Sub Urusan	
1	Kualitas Hidup Perempuan	1. Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat kabupaten/kota. 2. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/ kota. 3. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/ kota.
2	Perlindungan Perempuan	1. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota. 2. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Kabupaten/kota. 3. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota. 4. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Kabupaten/kota.



No	Sub Urusan	
3	Kualitas Keluarga	1. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah kabupaten/kota. 2. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kabupaten/kota. 3. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota.
4	Pemenuhan Hak Anak	1. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah kabupaten/kota. 2. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah kabupaten/kota.
5	Perlindungan Khusus Anak	1. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota. 2. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota. 3. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah kabupaten/kota

Sumber: Permen PPPA bahwa Nomor 4 Tahun 2023



3.3. JENIS DATA DAN SUMBER DATA PER INDIKATOR DAN SUMBER DATA

Sesuai Permen PPPA bahwa Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Satu Data Gender Dan Anak, meliputi, data kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, pemenuhan hak anak; dan perlindungan khusus anak.

Tabel 2 Data Gender dan Anak Menurut PPPA bahwa Nomor Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Satu Data Gender dan Anak serta Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkruen Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Sub Urusan	Indikator Kinerja	Sumber Data/ Produsen Data
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kualitas Hidup Perempuan	Impact:	
	Pelebagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat kabupaten/kota.	Indeks Kualitas Keluarga	Badan Pusat Statistik
	Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota.	Outcome:	



No.	Sub Urusan	Indikator Kinerja	Sumber Data/ Produsen Data
(1)	(2)	(3)	(4)
	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota	Berdasarkan Kewenangan PPPA:	
		1. Persentase perangkat daerah yang telah melembagakan dan melaksanakan PUG	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2. Jumlah kebijakan dalam rangka peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		3. Jumlah kebijakan dalam rangka peningkatan proporsi perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Sub Urusan	Indikator Kinerja	Sumber Data/ Produsen Data
(1)	(2)	(3)	(4)
		4. Jumlah kebijakan dalam rangka peningkatan proporsi perempuan di posisi manajerial	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Kesetaraan Gender Bidang Pendidikan	
		1. Harapan Lama Sekolah	Badan Pusat Statistik
		2. Rata-Rata Lama Sekolah	Badan Pusat Statistik
		3. Angka Partisipasi Sekolah (APS)	Badan Pusat Statistik
		4. Angka Partisipasi Murni (APM)	Pendidikan
		5. Angka Partisipasi Kasar (APK)	Pendidikan
		6. Angka Putus Sekolah	Pendidikan
		7. Penduduk Usia Kerja 15 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan	Tenaga Kerja



No.	Sub Urusan	Indikator Kinerja	Sumber Data/ Produsen Data
(1)	(2)	(3)	(4)
		8. Peyandang Disabilitas Berdasarkan Karakteristik Pekerjaan	Kesehatan
		Kesetaraan Gender Bidang Pengetahuan dan Teknologi	
		1. Akses Penggunaan Internet Pada Perempuan	Komunikasi dan Informatika
		3 Jumlah Perempuan menjadi Tenaga Pengajar/Guru	
		Kesetaraan Gender Bidang Kesehatan	
		1. Umur Harapan Hidup (UHH)	Badan Pusat Statistik
		2. Perempuan Penderita HIV/AIDS	Kesehatan
		3. Angka Kematian Ibu Melahirkan	Kesehatan
		4. Jumlah Ibu Nifas yang Mendapatkan Vitamin A	Kesehatan
		5. Persentase Pertolongan	Kesehatan

No.	Sub Urusan	Indikator Kinerja	Sumber Data/ Produsen Data
(1)	(2)	(3)	(4)
		Persalinan di Kota Samarinda Tahun 2022-2023	
		Kesetaraan Gender Bidang Ketenagakerjaan	
		1. Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	Badan Pusat Statistik
		2. Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	Badan Pusat Statistik
		3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Badan Pusat Statistik
		4. Tingkat Pengangguran Terbuka	Badan Pusat Statistik
		5. Setengah Penganggur	Badan Pusat Statistik
		6. Tingkat Kesempatan Kerja	Badan Pusat Statistik
		7. Perempuan Bekerja di Sektor Formal & Informal	Tenaga Kerja
		8. Pekerjaan Rentan	Tenaga Kerja
		9. Pekerja Migran	Tenaga Kerja



No.	Sub Urusan	Indikator Kinerja	Sumber Data/ Produsen Data
(1)	(2)	(3)	(4)
		Kesetaraan Gender Bidang Politik	
		1. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat Pusat dan Kota	Badan Pusat
		2. Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Kesetaraan Gender Bidang Hukum	
		1. Jumlah perempuan menjabat Jaksa dan Pejabat Kejaksaan	
		2. Jumlah perempuan Hakim, Panitera, dan Pejabat Pengadilan	
		3. Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Samarinda	
		4. Tren Jumlah Kasus Kekerasan Dalam	

No.	Sub Urusan	Indikator Kinerja	Sumber Data/ Produsen Data
(1)	(2)	(3)	(4)
		Rumah Tangga (KDRT) Menurut Kecamatan di Kota Samarinda Tahun 2023	
		5. Jumlah Perempuan Pengurus dan Petugas Lapas	
		Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi	
		1. Pengeluaran Per Kapita	Badan Pusat Statistik
		2. Pelaku Usaha Perempuan (wirausaha/ pengusaha)	Koperasi dan UKM
		3. Perempuan Anggota Koperasi	Koperasi dan UKM
		4. Perempuan Miskin Eksrim	Sosial
		Kesetaraan Gender Bidang Sosial Budaya	
		1. Perkawinan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



No.	Sub Urusan	Indikator Kinerja	Sumber Data/ Produsen Data
(1)	(2)	(3)	(4)
		2. Jumlah Fasilitas Kegiatan Budaya, Kreativitas dan Rekreatif	
		3. Jumlah Perempuan menjadi Kepala Keluarga	
		Kelembagaan dan Pelembagaan PUG	
		1. Jumlah Kebijakan dan Peraturan Perundangan tentang Pengarusutamaan Gender tingkat Nasional	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2. Jumlah Kebijakan dan peraturan perundangan tentang pengarusutamaan gender tingkat provinsi dan kabupaten kota	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		3. Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai rencana pencapaian PUG yang disahkan dengan Keputusan atau Edaran	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Sub Urusan	Indikator Kinerja	Sumber Data/ Produsen Data
(1)	(2)	(3)	(4)
		Sekretaris Daerah atau Kepala Badan yang mebidangi urusan penunjang perencanaan	
		4. Jumlah Kelompok Kerja (POKJA) PUG di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terbentuk	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		5. Jumlah Kelompok Kerja (POKJA) PUG di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang aktif	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		6. Persentase Perangkat Daerah yang terwakili dalam Kelompok Kerja (POKJA) PUG di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		7. Persentase focal point perangkat daerah	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



No.	Sub Urusan	Indikator Kinerja	Sumber Data/ Produsen Data
(1)	(2)	(3)	(4)
		8. Persentase perencana perangkat daerah yang terlatih dan tersertifikasi untuk melaksanakan PPRG	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		9. Jumlah SDM (inspektur pembantu dan auditor) pada Inspektorat yang sudah terlatih PUG	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		10. Jumlah fasilitator PUG yang telah mendapat sertifikat pelatihan sebagai fasilitator	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		11. Jumlah Gender Champion di Kabupaten/ Kota	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		12. Persentase alokasi anggaran Dinas PPPA atau sejenisnya untuk Fasilitasi PUG	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



No.	Sub Urusan	Indikator Kinerja	Sumber Data/ Produsen Data
(1)	(2)	(3)	(4)
		13. Persentase alokasi anggaran di Badan yang menangani urusan penunjang perencanaan untuk fasilitasi PUG	Perencanaan
		14. Persentase alokasi anggaran Biro/Badan/Dinas Keuangan Daerah atau sejenisnya untuk Fasilitasi PUG	Keuangan
		15. Persentase alokasi anggaran di Inspektorat untuk Fasilitasi PUG	Pengawasan
		16. Persentase perangkat daerah (diluar lembaga drivers) Kabupaten/Kota yang sudah memiliki alokasi anggaran untuk kegiatan pelebagaan PUG (sosialisasi, Advokasi, KIE, Bimbingan teknis ARG, dll)	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



No.	Sub Urusan	Indikator Kinerja	Sumber Data/ Produsen Data
(1)	(2)	(3)	(4)
		17. Jumlah Lembaga Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha yang termasuk dalam Pokja PUG	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		18. Jumlah Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat (PUSPA) yang terbentuk dan di sahkan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		19. Jumlah Lembaga Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha yang terlibat dalam kegiatan PUG dan PPPA	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		20. Jumlah Data UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Perlindungan Perempuan	Impact:	
	Pencegahan kekerasan terhadap	Rasio Perempuan Korban Kekerasan	Pemberdayaan Perempuan dan

No.	Sub Urusan	Indikator Kinerja	Sumber Data/ Produsen Data
(1)	(2)	(3)	(4)
	perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota.		Perlindungan Anak
	Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Kabupaten/kota.		
	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota.	Outcome:	
		Berdasarkan Kewenangan PPPA:	
		1. Jumlah kebijakan dalam rangka untuk pencegahan	Pemberdayaan Perempuan dan



No.	Sub Urusan	Indikator Kinerja	Sumber Data/ Produsen Data
(1)	(2)	(3)	(4)
		kekerasan terhadap perempuan	Perlindungan Anak
		2. Jumlah perempuan korban kekerasan, TPPO, dan pelanggaran hak-hak perempuan lainnya yang melapor ke lembaga layanan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		3. Persentase perempuan korban kekerasan, TPPO, dan pelanggaran hak-hak perempuan lainnya yang mendapat layanan sesuai standart	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Perlindungan Hak Perempuan	
		1. Cakupan kekerasan fisik yang dilakukan oleh pasangan dan selain pasangan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



No.	Sub Urusan	Indikator Kinerja	Sumber Data/ Produsen Data
(1)	(2)	(3)	(4)
		2. Cakupan kekerasan seksual oleh pasangan dan selain pasangan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		3. Cakupan kekerasan ekonomi oleh pasangan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		4. Cakupan kekerasan emosional (psikis) oleh pasangan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		5. Cakupan kekerasan pembatasan aktivitas oleh pasangan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		6. Jumlah korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)/trafficking	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



No.	Sub Urusan	Indikator Kinerja	Sumber Data/ Produsen Data
(1)	(2)	(3)	(4)
		7. Jumlah korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3.	Kualitas Keluarga	Impact:	
	Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah kabupaten/kota.	Indeks Ketahanan Keluarga (IKK)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam	Outcome:	

No.	Sub Urusan	Indikator Kinerja	Sumber Data/ Produsen Data
(1)	(2)	(3)	(4)
	Daerah Kabupaten/kota.		
	Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota.	Berdasarkan Kewenangan PPPA:	
		1. Kasus KDRT	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2. Angka Perceraian	Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Keluarga Sejahtera	
		1. Persentase keluarga pra keluarga sejahtera	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



No.	Sub Urusan	Indikator Kinerja	Sumber Data/ Produsen Data
(1)	(2)	(3)	(4)
		2. Persentase keluarga sejahtera I	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		3. Persentase keluarga sejahtera II	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		4. Persentase keluarga sejahtera III	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Kualitas Legalitas dan Struktur	
		1. Persentase rumah tangga yang memiliki buku nikah	Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2. Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun yang memiliki Akte Kelahiran	Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		3. Persentase Kepala Rumah Tangga yang tinggal serumah dengan Pasangan	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Sub Urusan	Indikator Kinerja	Sumber Data/ Produsen Data
(1)	(2)	(3)	(4)
		4. Persentase Rumah Tangga dengan Kecukupan Waktu Luang Bersama Keluarga kurang dari 14 jam dalam seminggu	Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		5. Persentase Istri Umur 15-49 Tahun sebagai Penentu Keputusan Penggunaan Pendapatan Keluarga	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Kualitas Ketahanan Fisik	
		1. Persentase Rumah Tangga yang Makan Minimal 14 Kali Seminggu	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2. Persentase Balita Gizi Buruk	Kesehatan
		3. Derajat Kesehatan	Kesehatan
		4. Persentase Kepala Rumah Tangga menderita Penyakit Kronis	Kesehatan



No.	Sub Urusan	Indikator Kinerja	Sumber Data/ Produsen Data
(1)	(2)	(3)	(4)
		5. Persentase Kepala Rumah Tangga Peyandang Disabilitas	Kesehatan
		6. Persentase Rumah Tidak Layak Huni	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Kualitas Ketahanan Ekonomi	
		1. Pengeluaran Per Kapita	Badan Pusat Statistik
		2. Persentase Penduduk Miskin	Badan Pusat Statistik
		3. Persentase Kepala Rumah Tangga dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah	Sosial
		4. Persentase Penduduk Usia 20-24 Tahun dengan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di bawah 12 Tahun	Tenaga Kerja
		5. Cakupan Penerima Program Indonesia Pintar	Pendidikan

No.	Sub Urusan	Indikator Kinerja	Sumber Data/ Produsen Data
(1)	(2)	(3)	(4)
		6. Cakupan Penerima Program Indonesia Sehat	Kesehatan
		7. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Tabungan	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi	
		1. Perempuan Pernah Kawin yang Menikah Sebelum Usia 19 Tahun	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2. Persentase Rumah Tangga dengan Keberadaan Anggota Rumah Tangga yang Menjadi Korban Tindak Pidana	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Kualitas Ketahanan Sosial Budaya	
		1. Persentase Kepala Rumah Tangga Lansia	Kependudukan dan Pencatatan Sipil



No.	Sub Urusan	Indikator Kinerja	Sumber Data/ Produsen Data
(1)	(2)	(3)	(4)
		2. Persentase Lansia Terlantar	Sosial
		3. Tingkat Partisipasi Rumah Tangga dalam Kegiatan Sosial Keagamaan di Lingkungan Sekitar Tempat Tinggal	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4.	Pemenuhan Hak Anak	Impact:	
	Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah kabupaten/kota.	Persentase kabupaten/kota Layak Anak (KLA)	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah kabupaten/kota.	Outcome:	

No.	Sub Urusan	Indikator Kinerja	Sumber Data/ Produsen Data
(1)	(2)	(3)	(4)
		Berdasarkan Kewenangan PPPA:	
		1. Jumlah kebijakan afirmatif dlm pelembagaan PHA	
		a) Peraturan Perundangan/Perda terkait PHA	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		b) Kebijakan teknis (perencanaan dan penganggaran) PHA	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		c) Kebijakan terkait SDM dan pengorganisasian PHA (pokja, gugus tugas dsb)	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		d) Kebijakan Partisipasi Anak, Masyarakat, Dunia Usaha dan Media dalam PHA	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



No.	Sub Urusan	Indikator Kinerja	Sumber Data/ Produsen Data
(1)	(2)	(3)	(4)
		2. Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak sesuai standart	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Kelembagaan	
		1. Jumlah Peraturan/Kebijakan Daerah Tentang Kabupate/Kota Layak Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2. Jumlah Gugus Tugas KLA yang terbentuk	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		3. Jumlah Gugus Tugas KLA yang aktif	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		4. Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Sub Urusan	Indikator Kinerja	Sumber Data/ Produsen Data
(1)	(2)	(3)	(4)
		5. Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki Data dan Informasi Profil Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		6. Persentase Kecamatan Layak Anak (KELANA)	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		7. Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELA)	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		8. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		9. Jumlah Media Promosi tentang KLA	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



No.	Sub Urusan	Indikator Kinerja	Sumber Data/ Produsen Data
(1)	(2)	(3)	(4)
		10. Jumlah Lembaga Masyarakat (LM) yang berperan dalam mewujudkan KLA	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		11. Jumlah Dunia Usaha (DU) yang berperan dalam mewujudkan KLA	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		12. Jumlah Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Daerah yang terbentuk	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		13. Jumlah Media yang berperan dalam mewujudkan KLA	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		14. Jumlah Jaringan Media Peduli Anak (JMPA) yang terbentuk	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Sub Urusan	Indikator Kinerja	Sumber Data/ Produsen Data
(1)	(2)	(3)	(4)
		15. Jumlah Jaringan Lembaga Masyarakat Peduli Anak (JLMPA) yang terbentuk	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Klaster Hak Sipil dan Kebebasan	
		1. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2. Cakupan Anak Usia 0-17 Tahun yang mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran	Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		3. Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memiliki Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		4. Jumlah Provinsi yang Memiliki Telepon Sahabat Anak (TeSA)	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



No.	Sub Urusan	Indikator Kinerja	Sumber Data/ Produsen Data
(1)	(2)	(3)	(4)
		5. Jumlah Forum Anak tingkat Kabupaten/ Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan yang terbentuk	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		6. Jumlah Forum Anak tingkat Kabupaten/ Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan yang aktif	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		7. Jumlah Wilayah yang telah Melakukan Model dan Pelatihan Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (PAPP)	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		8. Jumlah Wilayah yang telah Melakukan Model dan Pelatihan Pelopor dan Pelapor (2P)	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	
		1. Persentase Perkawinan Anak	Pemberdayaan

No.	Sub Urusan	Indikator Kinerja	Sumber Data/ Produsen Data
(1)	(2)	(3)	(4)
			Perempuan dan Perlindungan Anak
		2. Persentase anak perempuan usia 15-19 tahun yang telah menikah	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		3. Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memiliki PUSPAGA atau (Pusat Pembelajaran Keluarga)	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		4. Jumlah Lembaga Pengasuhan Alternatif yang Terstandarisasi, seperti lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA), TPA, TAS, Pesantren/sejenisnya	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		5. Jumlah SDM pada PUSPAGA, LK3, LPKS, PPKS, BKB/BKR/sejenisnya telah dilatih Konvensi Hak Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



No.	Sub Urusan	Indikator Kinerja	Sumber Data/ Produsen Data
(1)	(2)	(3)	(4)
		6. Angka Partisipasi Kasar PAUD	Pendidikan
		7. Persentase Ruang Bermain Anak (RBA) yang terstandarisasi sebagai Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		8. Jumlah Ketersediaan Taman Cerdas di Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		9. Jumlah Ketersediaan Taman Baca di Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		10. Jumlah Ketersediaan Rumah Pintar di Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		11. Jumlah Ketersediaan Perpustakaan Kampung di Kabupaten/Kota	Perpustakaan

No.	Sub Urusan	Indikator Kinerja	Sumber Data/ Produsen Data
(1)	(2)	(3)	(4)
		12. Jumlah Ketersediaan taman kota dengan akses wifi di Kabupaten/Kota	Komunikasi dan Informatika
		13. Persentase Sekolah yang memiliki Rute Aman dan Selamat ke dan dari Sekolah (RASS)	Perhubungan
		14. Jumlah Ketersediaan titik zona selamat sekolah di Kabupaten/Kota	Perhubungan
		Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	
		1. Persentase persalinan di fasilitas kesehatan	Kesehatan
		2. Angka Kematian Bayi	Kesehatan
		3. Angka Kematian Balita	Kesehatan
		4. Angka Kematian Ibu Melahirkan	Kesehatan
		5. Prevalensi Status Gizi Balita	Kesehatan



No.	Sub Urusan	Indikator Kinerja	Sumber Data/ Produsen Data
(1)	(2)	(3)	(4)
		6. Prevalensi Stunting	Kesehatan
		7. Cakupan Pemberian Makanan Pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun	Kesehatan
		8. Persentase ASI Eksklusif pada bayi usia di bawah 6 bulan	Kesehatan
		9. Persentase Ruang ASI yang terdapat di tempat kerja	Kesehatan
		10. Persentase Ruang ASI yang tersebar di fasilitas umum	Kesehatan
		11. Persentase Anak yang Terdeprivasi Dimensi Kesehatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		12. Persentase Anak yang Terdeprivasi Dimensi Fasilitas	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Sub Urusan	Indikator Kinerja	Sumber Data/ Produsen Data
(1)	(2)	(3)	(4)
		13. Persentase Anak yang Terdeprivasi Dimensi Makanan dan Nutrisi	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		14. Persentase Anak yang Merokok	Kesehatan
		15. Persentase Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi (RSSIB)	Kesehatan
		16. Jumlah Konselor ASI	Kesehatan
		17. Persentase Puskesmas Ramah Anak	Kesehatan
		18. Jumlah Kampung Anak Sejahtera (KAS)	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		19. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum yang Layak	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		20. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi yang Layak	Pekerjaan Umum dan



No.	Sub Urusan	Indikator Kinerja	Sumber Data/ Produsen Data
(1)	(2)	(3)	(4)
			Penataan Ruang
		21. Tersedia Kawasan Tanpa Rokok (tidak ada Iklan, Promosi, dan Sponsor Rokok) untuk Semua fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan fasilitas umum, termasuk Ruang Bermain Anak	Kesehatan
		Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	
		1. Angka Partisipasi Sekolah	Pendidikan
		2. Angka Partisipasi Murni	Pendidikan
		3. Angka Partisipasi Kasar	Pendidikan
		4. Angka Putus Sekolah	Pendidikan
		5. Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA)	Pemberdayaan

No.	Sub Urusan	Indikator Kinerja	Sumber Data/ Produsen Data
(1)	(2)	(3)	(4)
			Perempuan dan Perlindungan Anak
		6. Jumlah Pusat Kreativitas Anak (Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif)	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.	Perlindungan Khusus Anak	Impact:	
	Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota.	Rasio Anak Korban Kekerasan, Diskriminasi, Penelantaran dan Perlakuan Salah Lainnya	
	Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat	Outcome:	



No.	Sub Urusan	Indikator Kinerja	Sumber Data/ Produsen Data
(1)	(2)	(3)	(4)
	Daerah kabupaten/kota.		
	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah kabupaten/kota	Berdasarkan Kewenangan PPPA:	
		1. Persentase perangkat daerah yang memiliki dan melaksanakan kebijakan Perlindungan Khusus Anak	
		2. Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang terlayani sesuai standart	
		Klaster Perlindungan Khusus Anak	
		1. Prevalensi Kekerasan Seksual pada Anak	Pemberdayaan

No.	Sub Urusan	Indikator Kinerja	Sumber Data/ Produsen Data
(1)	(2)	(3)	(4)
			Perempuan dan Perlindungan Anak
		2. Prevalensi Kekerasan Fisik pada Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		3. Prevalensi Kekerasan Emosional pada Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		4. Jumlah Kasus Pengaduan Kekerasan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		5. Persentase Anak Bekerja	Tenaga Kerja
		6. Persentase Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak	Tenaga Kerja
		7. Persentase Anak Korban Penelantaran	Sosial



No.	Sub Urusan	Indikator Kinerja	Sumber Data/ Produsen Data
(1)	(2)	(3)	(4)
		8. Persentase Anak Penyandang Disabilitas	Kesehatan
		9. Persentase Anak Penyandang Disabilitas yang Terlayani	Kesehatan
		10. Persentase Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi yang Terlayani	Sosial
		11. Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika Pelajar dan Mahasiswa	Kesehatan
		12. Persentase Anak Korban NAPZA yang Terlayani	Kesehatan
		13. Persentase Anak Korban Pornografi yang Terlayani	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		14. Persentase Anak Korban Terinfeksi HIV/AIDS yang Terlayani	

No.	Sub Urusan	Indikator Kinerja	Sumber Data/ Produsen Data
(1)	(2)	(3)	(4)
		15. Persentase Anak korban bencana dan konflik yang terlayani	
		16. Persentase Anak Berkonflik Dengan Hukum	
		17. Persentase Narapidana Anak	
		18. Persentase Tahanan Anak	
		19. Persentase Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) (khusus pelaku) yang terselesaikan melalui Diversi	
		20. Persentase Anak Korban Jaringan Terorisme yang Terlayani	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		21. Persentase Anak Korban Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



No.	Sub Urusan	Indikator Kinerja	Sumber Data/ Produsen Data
(1)	(2)	(3)	(4)
		Orang Tuanya yang Terlayani	
		22. Presentase anak korban penculikan penjualan, dan/atau perdagangan	
		23. Presentase anak dengan perilaku sosial menyimpang	
		24. Presentase anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya,	

Sumber: Permen PPPA bahwa Nomor 4 Tahun 2023





BAB IV

GAMBARAN

UMUM





SUHU

MIN 21,4 MAX 35,2



KECEPATAN ANGIN

3,7M/ Det



CURAH HUJAN

April 303,3 mm



WILAYAH ADMINISTRATIF KOTA



7 ORG



38 ORG

Kota Samarinda memiliki 45 anggota DPRD yang berasal dari 10 partai politik. Partai politik yang menduduki kursi anggota DPRD terbanyak di Samarinda adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerindra.



2.901 ORANG



4.438 ORANG



Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Samarinda adalah 7.339 orang dengan 2.901 berjenis kelamin laki laki dan 4.438 perempuan. Tingkat pendidikan PNS di Kota Samarinda didominasi oleh lulusan sarjana diikuti lulusan Sarjana/ Doctor/Ph.D. Pegawai Negeri di Kota Samarinda paling banyak berada di golongan IIIA yaitu sebanyak 1.940 orang diikuti golongan IIID sebanyak 1.206 orang.

BAB IV GAMBARAN UMUM

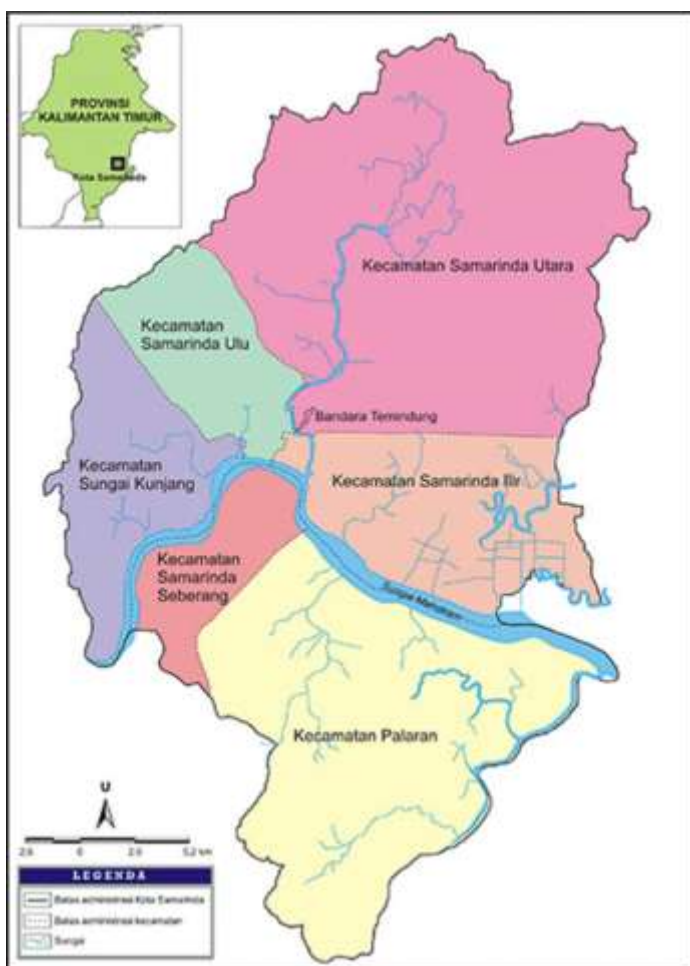
4.1. KONDISI GEOGRAFIS

A. Letak, Luas dan Batas Wilayah

Kota Samarinda merupakan ibukota dari Provinsi Kalimantan Timur. Kota Samarinda berbatasan langsung dengan kabupaten Kutai Kartanegara. Secara astronomis, Kota Samarinda terletak antara 0021'81"-10/09'16" Lintang Selatan dan 116015'16"- 117024'16" Bujur Timur dan dilalui oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa yang terletak pada garis lintang 00. Berdasarkan posisi geografisnya, wilayah Kota Samarinda dikelilingi oleh Kabupaten Kutai Kartanegara. Samarinda dibagi menjadi 10 kecamatan, yaitu Kecamatan Palaran, Samarinda Ilir, Samarinda Kota, Sambutan, Samarinda Seberang, Loa Janan Ilir, Sungai Kunjang, Samarinda Ulu, Samarinda Utara dan Sungai Pinang. Luas wilayah terbesar di Kota Samarinda berada di kecamatan Samarinda Utara dan luas wilayah terkecil berada di Kecamatan Samarinda Kota. Kota Samarinda memiliki jarak terjauh dengan Kabupaten Kutai Barat (Melak) dan memiliki jarak terdekat dengan Kutai Kartanegara (Tenggarong).

Kota Samarinda terdiri dari 10 kecamatan, 59 kelurahan, dan 1989 rukun tetangga. Jumlah kelurahan yang paling banyak yaitu di Kecamatan Samarinda Ulu dan Kecamatan Sungai Pinang. Sejak akhir tahun 2010 kota Samarinda dibagi menjadi 10 kecamatan yaitu kecamatan Palaran, Samarinda Ilir, Samarinda kota, Sambutan, Samarinda Sebarang, Loa Janan Ilir, Sungai Kunjang, Samarinda Ulu, Samarinda Utara dan Sungai Pinang. Sedangkan jumlah desa di kota Samarinda sebanyak 53 desa. Jumlah kelurahan yang paling banyak yaitu di Kecamatan Ulu dan Kecamatan Sungai Pinang.





Sumber: BPS Kota Samarinda, 2023

Gambar 1 Peta Kota Samarinda

Tabel 3 Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kota Samarinda

Kecamatan	Luas Total (km ²)
(1)	(2)
Samarinda Kota	3,6
Samarinda Ulu	51,31
Samarinda Ilir	5,82
Samarinda Utara	232,81
Samarinda Seberang	11,89
Sungai Kunjang	67,62
Sungai Pinang	28,23
Sambutan	92,25
Palaran	191,7
Loa Janan Ilir	31,84
Samarinda	716,97

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Samarinda, 2023

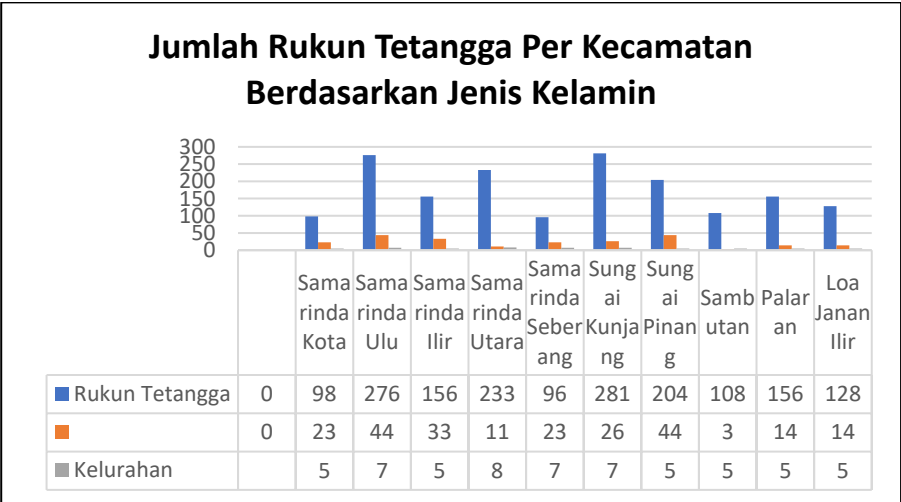
Tabel 4 Persentase Luas Kecamatan terhadap Luas Kabupaten/Kota

Kecamatan	Persentase terhadap Luas Kabupaten/ Kota
(1)	(2)
Samarinda Kota	0,50
Samarinda Ulu	7,16
Samarinda Ilir	0,81
Samarinda Utara	32,47
Samarinda Seberang	1,66
Sungai Kunjang	9,42
Sungai Pinang	3,94
Sambutan	12,87
Palaran	26,74
Loa Janan Ilir	4,44



Kecamatan	Persentase terhadap Luas Kabupaten/ Kota
Samarinda	100,00

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Samarinda, 2023



Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Samarinda, 2023

Gambar 2 Jumlah Kelurahan dan Rukun Tetangga menurut Kecamatan di Kota Samarinda



Tabel 5 Jumlah Kelurahan dan Rukun Tetangga menurut Kecamatan di Kota Samarinda

No	Samarinda Kota	Kelurahan	Rukun Tetangga (RT)		
			Laki	Perempuan	Jumlah
1	Samarinda kota	5	98	23	121
2	Samarinda Ulu	7	276	44	320
3	Samarinda Ilir	5	156	33	189
4	Samarinda utara	8	233	11	244
5	Samarinda Seberang	7	96	23	119
6	Sungai Kunjang	7	281	26	307
7	Sungai Pinang	5	204	44	248
8	Sambutan	5	108	3	111
9	Palaran	5	156	14	170
10	Loa Janan Ilir	5	128	14	142
		59	1736	235	1971

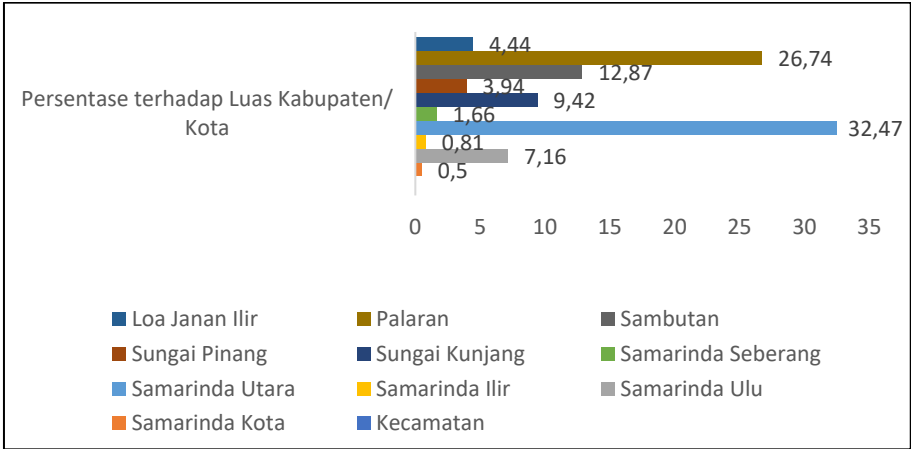
Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Samarinda, 2023



Tabel 6 Letak, Batas, dan Luas Kota Samarinda

Mata Angin	Letak	Batas
(1)	(2)	(3)
Utara/North	117°03'00" Bujur Timur Longitude East	Kabupaten Kutai Kartanegara/ Kutai Kartanegara Regency
Timur/East	117°18'14" Bujur Timur Longitude East	Kabupaten Kutai Kartanegara/ Kutai Kartanegara Regency
Selatan/South	0°19'02" Lintang Selatan Latitude South	Kabupaten Kutai Kartanegara/ Kutai Kartanegara Regency
Barat/West	0°42'34" Lintang Selatan Latitude South	Kabupaten Kutai Kartanegara/ Kutai Kartanegara Regency

Sumber: BPS Kota Samarinda, 2023



Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Samarinda, 2023

Gambar 3 Persentase Luas Wilayah Kecamatan terhadap Luas Kota Samarinda



Tabel 7 Nama dan Panjang Sungai di Kota Samarinda

Kota	Sungai	Panjang (km)
(1)	(2)	(3)
Samarinda	1. Mahakam	20
	2. Karang Mumus	25
	3. Langsung/Karang Asam Kecil	5,5
	4. Pampang Kanan	4,8
	5. Pampang Kiri	2,8
	6. Muang	6,8
	7. Bayur	5,5
	8. Karang Asam Besar	8,53

Sumber: BPS Kota Samarinda, 2023

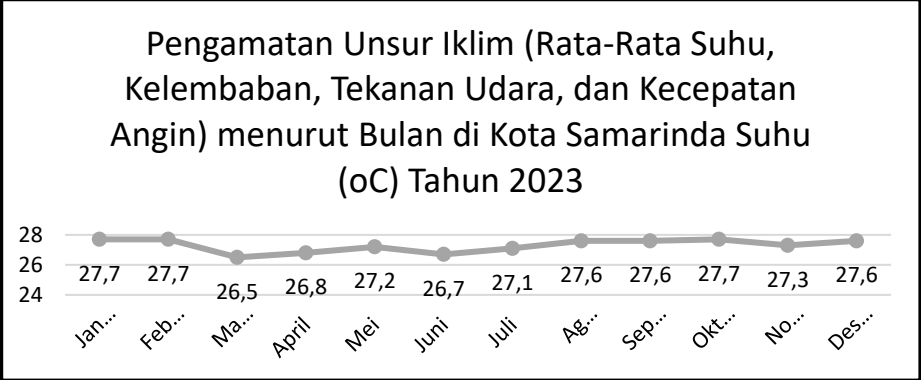
Iklim merupakan suatu kumpulan dari kondisi atmosfer yang meliputi panas, kelembaban dan gerakan udara. Kota Samarinda yang beriklim tropis mempunyai musim yang hampir sama dengan wilayah Indonesia pada umumnya, yaitu adanya Tabel 8 Data Gender dan Anak Menurut *Permen* PPPA Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Satu Data Gender Dan Anak dan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak musim kemarau dan musim penghujan. Selain itu, karena letaknya di daerah khatulistiwa maka iklim di kota Samarinda juga dipengaruhi oleh angin Muson, yaitu angin Muson Barat November-April dan angin Muson Timur Mei-Oktober.

Namun dalam tahun-tahun terakhir ini, keadaan musim kadang tidak menentu. Pada bulan-bulan yang seharusnya turun hujan dalam kenyataannya tidak ada hujan sama sekali, atau sebaliknya pada bulan-bulan yang seharusnya musim kemarau bahkan terjadi hujan lebih panjang.

Sepanjang tahun 2022, suhu tertinggi Kota Samarinda adalah 35,60 C pada bulan Desember, dan kelembaban tertinggi mencapai



sebesar 98% hanya pada bulan Februari, Juni, Oktober tidak mencapai 98%. Jika dilihat dari curah dan hari hujan, Kota Samarinda memiliki curah hujan tertinggi dan hari hujan terbanyak pada bulan Januari.



Sumber: Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika, 2023
Gambar 4 Rata-rata Suhu Menurut Bulan di Kota Samarinda

Tabel 9 Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun
Metereologi APT Pranoto (Suhu dan Udara)

Bulan	Minimum Suhu	Suhu (oC)	Maksimal Suhu	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Januari	21,5	27,7	34,6	45	81,5	100
Februari	21,9	27,7	33	51	81,4	100
Maret	22,7	26,5	33	56	89	100
April	22	26,8	34,2	55	88,8	100
Mei	22,6	27,2	34,2	48	89	100
Juni	22,3	26,7	33,8	57	89,8	100
Juli	21,4	27,1	33,7	54	86,2	100
Agustus	22	27,6	34,8	50	82,6	99
September	22,2	27,6	34,8	49	82,2	99
Oktober	22,3	27,7	35,2	53	83,5	99



Bulan	Minimum Suhu	Suhu (oC)	Maksimal Suhu	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
November	21,8	27,3	35,4	46	86,1	100
Desember	23,2	27,6	34,4	47	84,7	98

Sumber: BPS Kota Samarinda, 2023

Tabel 10 Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Metereologi APT Pranoto (Kecepatan Angin dan Tekanan Udara)

Bulan	Kecepatan Angin (M/Det)	Minimum	Tekanan Udara (MB)	Maksimum	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Januari	3,6	27	1.001,8	1.006,5	1.011,8
Februari	3,7	13	1.003,2	1.006,7	1.010,8
Maret	2,6	11	1.003,1	1.007,8	1.013,3
April	2,5	16	1.001,9	1.006,6	1.011
Mei	2,5	15	1.000,7	1.007,6	1.013,4
Juni	2,5	11	1.003,9	1.007,5	1.010,8
Juli	3,3	12	1.004,5	1.008	1.011,5
Agustus	3,6	13	1.003,8	1.008,5	1.013
September	3,4	38	1.003,9	1.007,8	1.011,8
Oktober	2,7	15	1.003,8	1.008,4	1.012
November	2,4	13	1.002,2	1.007,2	1.010,9
Desember	2,8	16	1.003,3	1.007,4	1.012,2

Sumber: BPS Kota Samarinda, 2023



Tabel 11 Pengamatan Unsur Iklim dari Jumlah Curah Hujan

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Penyinaran Matahari (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Januari	144,4	21	5
Februari	152,8	19	7,2
Maret	232,1	25	4,5
April	303,3	20	4,9
Mei	176,6	21	5,4
Juni	229,8	23	4,4
Juli	71,8	11	4,5
Agustus	45	8	6
September	134,3	13	5,6
Oktober	110,7	16	5,5
November	282,8	19	4,9
Desember	158,7	22	5,1

Sumber: BPS Kota Samarinda, 2023

B. Wilayah Administratif Kota

Kota Samarinda memiliki 45 anggota DPRD yang berasal dari 10 partai politik. Partai politik yang menduduki kursi anggota DPRD terbanyak di Samarinda adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerindra.



Sumber: BPS Kota Samarinda, 2023

Gambar 5 Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda menurut Masa Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2023

Tabel 12 Jumlah Anggota DPRD Kota Samarinda menurut Masa Jabatan dan Jenis Kelamin Masa Jabatan Tahun 2019-2023

Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda menurut Masa Jabatan dan Jenis Kelamin Masa jabatan Tahun 2019-2024		
Usia	Laki-laki	Perempuan
20-29	1	1
30-39	7	2
40-49	15	2
50-59	13	2
60-69	2	0

Sumber: BPS Kota Samarinda, 2023

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Samarinda adalah 7.339 orang dengan 2.901 berjenis kelamin laki laki dan 4.438 perempuan. Tingkat pendidikan PNS di Kota Samarinda didominasi oleh lulusan sarjana diikuti lulusan Sarjana/ Doctor/Ph.D. Pegawai Negeri di Kota Samarinda paling banyak berada di golongan IIIA yaitu sebanyak 1.940 orang diikuti golongan IIID sebanyak 1.206 orang.



Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda, 2023

Gambar 6 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin



Tabel 13 Jumlah PNS menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Samarinda

Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)
SD	26	1
SMP	92	11
SMA	680	539
Diploma	288	819
Strata 1/S1	1,583	2,821
Strata 2/S2	226	245
Strata 3/S3	6	2
JUMLAH	2,901	4,438

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda, 2023

Tabel 14 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Jabatan dan Jenis Kelamin

Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kota Samarinda Tahun 2023			
Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	
Fungsional Tertentu	1,399	3,425	4,824
Fungsional Umum	1,028	732	1,760
Jumlah	2,427	4,157	6,584

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda, 2023





Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda, 2023

Gambar 7 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin

Tabel 15 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kota Samarinda

Pangkat/Golongan/Ruang	2023		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
I/a	0	0	0
I/b	4	0	4
I/c	10	0	10
I/d	11	3	14
II/a	52	16	68
II/b	48	17	65
II/c	161	138	299
II/d	332	313	645

Pangkat/Golongan/Ruang	2023		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
III/a	663	1,277	1,940
III/b	334	795	1,129
III/c	279	372	651
III/d	513	693	1,206
IV/a	379	677	1,056
IV/b	85	124	209
IV/c	29	13	42
IV/d	1	0	1
Jumlah	2,901	4,438	7,339

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda, 2023

4.2. GAMBARAN IPM, IPG, dan IGD

A. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator komposit yang mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia dalam suatu wilayah. IPM dibangun berdasarkan tiga dimensi dasar, yaitu: Umur panjang dan sehat, Pengetahuan, Standar hidup layak.

IPM dihitung berdasarkan beberapa indikator, seperti:

- 1. Angka harapan hidup saat kelahiran untuk mengukur kesehatan
- 2. Angka harapan sekolah dan angka rata-rata lama sekolah untuk mengukur pendidikan
- 3. Produk nasional bruto per kapita untuk mengukur standar hidup layak



Tabel 16 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Indikator di Kota Samarinda

Indikator IPM	[Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Indikator di Kota Samarinda					
	2021		2022		2023	
	Laki	Perempuan	Laki	Perempuan	Laki	Perempuan
Angka Harapan Hidup (AHH)	72.62	76.23	72.64	76.23	72.93	76.6
Harapan Lama Sekolah (HLS)	15	15.12	15.01	15.25	15.2	15.57
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	10.9	9.99	11.1	10.35	11.32	10.6
Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (000 Rp)	21.177	10.07	22.004	10.455	22.539	10.748
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	85.07	75.94	85.68	76.9	86.51	77.92

Sumber: BPS Kota Samarinda, 2023

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup dan menjadi indikator untuk menilai kesehatan penduduk dalam suatu daerah, sehingga berguna untuk menjadi alat evaluasi kinerja dalam meningkatkan kesejahteraan pada umumnya.

Angka harapan hidup dari 5 tahun terakhir terlihat kenaikan terus bertambah walaupun tidak begitu signifikan. diketahui angka harapan hidup Kota Samarinda pada tahun 2023 mencapai 74,68 tahun, dan menjadi nomor dua di Kalimantan Timur setelah Balikpapan yaitu 74,89 tahun.

Angka Harapan Lama Sekolah mengacu pada prediksi lama waktu sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan ditempuh oleh anak pada usia tertentu atau sesuai kondisi pendidikan di berbagai jenjang. Data menunjukkan tren positif HLS di Kota Samarinda, dari 15.1 tahun pada 2022 dan 15.39 tahun pada 2023.

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) mengukur total tahun pendidikan yang dijalani oleh masyarakat yang berusia 15 tahun ke atas. Data RLS juga menunjukkan peningkatan, yakni 10.71 tahun pada 2022 dan 10.93 tahun 2023

Pertumbuhan IPM tertinggi terjadi pada tahun 2022 -2023 yaitu 82.32 atau naik sekitar 1,01 Persen dari tahun sebelumnya rata-rata pertumbuhan IPM kota samarinda per tahun sebesar 1,00 persen.



B. Gambaran Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah ukuran keberhasilan pembangunan yang mempertimbangkan gender. IPG dihitung dengan membandingkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dengan IPM laki-laki.

IPG mengukur pembangunan manusia dari tiga dimensi, yaitu: Umur panjang dan hidup sehat, Pengetahuan, Standar hidup layak.

IPG dihitung menggunakan metodologi yang sama dengan Gender Development Index (GDI) dan Human Development Index (HDI) yang digunakan oleh UNDP.

Nilai IPG berkisar antara 0 (ketidaksetaraan sempurna) dan 1 (ketidaksetaraan nol). Hasil IPG dapat digunakan untuk menyusun laporan dan analisis kebijakan, serta merumuskan strategi pembangunan yang inklusif dan merata antara gender.

Tabel 17 Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender	Indeks Pembangunan Gender				
	2019	2020	2021	2022	2023
IPM Laki-Laki	84.42	84.34	85.07	85.68	86.51
IPM Perempuan	75.48	75.29	75.94	76.9	77.92
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89.41	89.27	89.27	89.75	90.07

Sumber: BPS Kota Samarinda, 2023

Angka harapan hidup dari 5 tahun terakhir terlihat kenaikan terus bertambah walaupun tidak begitu signifikan. diketahui angka harapan hidup Kota Samarinda pada tahun 2023 mencapai 74,68 tahun, dan menjadi nomor dua di Kalimantan Timur setelah Balikpapan yaitu 74,89 tahun.



Tabel 18 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Provinsi/Kabupaten /Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Samarinda	89.41	89.27	89.27	89.75	90.07

Sumber: BPS Kota Samarinda, 2023

C. Gambaran Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana perempuan dan laki-laki memiliki akses yang setara dalam berbagai bidang kehidupan. IDG mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik, seperti: Keterlibatan perempuan di parlemen, Perempuan sebagai tenaga profesional, Sumbangan pendapatan perempuan.

IDG merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pembangunan manusia berbasis gender di tingkat nasional. Indikator lainnya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG).

Indeks Pembangunan Gender (IPG) mengukur capaian kualitas pembangunan manusia terpisah gender dari sisi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. IPG menghitung perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik.

Komposit pembentuk IDG adalah (1) keterlibatan perempuan di parlemen, (2) perempuan sebagai tenaga profesional, dan (3) sumbangan pendapatan perempuan.

Tabel 19 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Dimensi Penyusunnya

Dimensi Penyusun Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Dimensi Penyusunnya			
	2020	2021	2022	2023
Keterwakilan di Parlemen	17.78	15.56	15.56	15.56
Perempuan sebagai Tenaga Profesional	45.08	41.27	46.76	45.26
Sumbangan Pendapatan Perempuan	30.95	31.16	30.96	30.93
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70.65	67.54	68.63	68.71

Sumber: BPS Kota Samarinda, 2023

Pada tabel 18 menunjukkan seberapa jauh perempuan dapat secara aktif berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan politik, mengingat IDG menitikberatkan pada partisipasi dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang partisipasi politik, pengambilan keputusan dan aksesibilitas terhadap sumber daya ekonomi.

Pada tugas perempuan di bidang politik dan pejabat publik sangat strategis dalam mengurangi kesenjangan pada tahun 2022 hingga 2023 tidak ada peningkatan krn masih dalam pemilihan baru demikian juga pada Perempuan sebagai tenaga profesional mengalami penurunan 46,76 pada tahun 2023 di angka 45,26 mengalami penurunan 1,03. Untuk Sumbangan Pendapatan Perempuan juga mengalami penurunan 0,3.





BAB V

DATA SATU GENDER





01

**Kualitas Hidup
Perempuan**

02

**Perlindungan
Perempuan**

03

**Kualitas
Keluarga**

04

**Pemenuhan
Hak Anak**

05

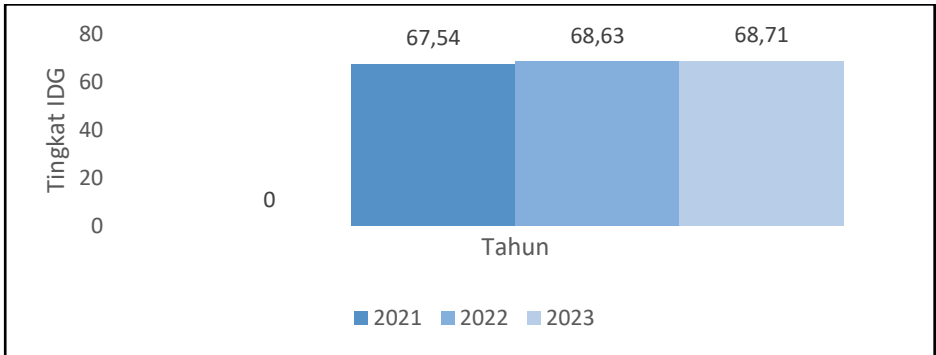
**Perlindungan
Khusus Anak**



BAB V DATA SATU GENDER

5.1 KUALITAS HIDUP PEREMPUAN

Kualitas Hidup Perempuan dilihat dari Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)



Sumber: BPS Kota Samarinda, 2023

Gambar 8 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) disusun berdasarkan tiga dimensi diantaranya yaitu keterwakilan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional, dan sumbangan pendapatan perempuan. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) terjadi kenaikan di tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2022. Selama satu tahun terjadi kenaikan indeks sebesar 0,08 sehingga dapat menjadi indikator atas terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan pengambilan keputusan dari proporsi jenis kelamin dalam parlemen.

A.1. Berdasarkan Kewenangan PPPA

A.1.1. Jumlah Kebijakan dalam Rangka Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif

Tabel 20 Jumlah Kebijakan dalam Rangka Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif

No.	Uraian	Jumlah	%
1	Jumlah kebijakan dalam rangka peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif	3	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, 2023

Kebijakan dalam rangka peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif terdiri dari Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak No 7 Tahun 2013 tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif; Undang-Undang Pemilu No 10 Tahun 2008 Pasal 52 dan Pasal 53; Peraturan Daerah Kota Samarinda No 2 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Daerah.



A.1.2. Jumlah Kebijakan Dalam Rangka Peningkatan Proporsi Perempuan Sebagai Pengambil Keputusan Di Lembaga Eksekutif

Tabel 21 Jumlah Kebijakan dalam Rangka Peningkatan Proporsi Perempuan sebagai Pengambil Keputusan di lembaga Eksekutif

No.	Uraian	Jumlah	%
1	Jumlah kebijakan dalam rangka peningkatan proporsi perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif	5	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, 2023

Kebijakan dalam rangka peningkatan proporsi perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif diatur dalam Undang-undang No 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan; Undang-undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Instruksi Presiden No 9 Tahun 2000 tentang Pembangunan Pengarusutamaan Gender; Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs); Peraturan Daerah Kota Samarinda No 2 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Daerah.

A.1.3. Jumlah Kebijakan dalam rangka Peningkatan Proporsi Perempuan di Posisi Manajerial

Tabel 22 Jumlah Kebijakan dalam Rangka Peningkatan Proporsi Perempuan di Posisi Manajerial

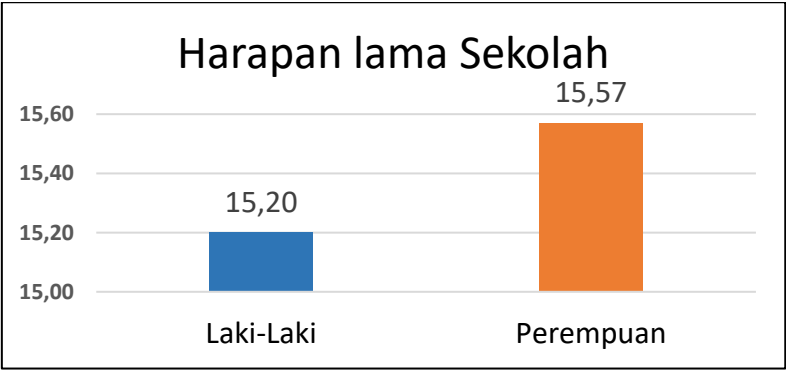
No.	Uraian	Jumlah	%
1	Jumlah kebijakan dalam rangka peningkatan proporsi perempuan di posisi manajerial	5	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, 2023

Kebijakan dalam rangka peningkatan proporsi perempuan di posisi manajerial diatur dalam Undang-undang No 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan; Undang-undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Instruksi Presiden No 9 Tahun 2000 tentang Pembangunan Pengarusutamaan Gender; Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs); Peraturan Daerah Kota Samarinda No 2 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Daerah.



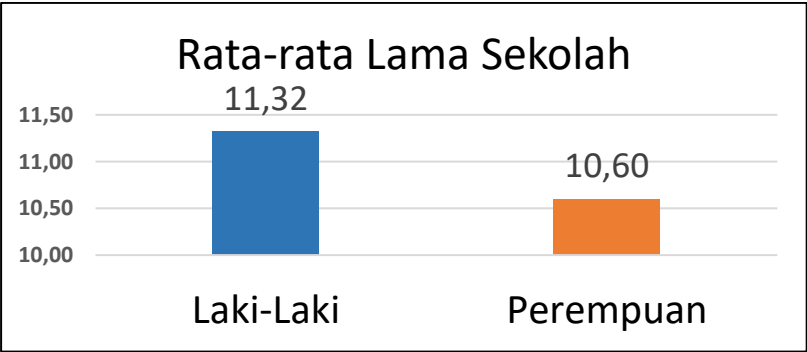
A.2 Kesetaraan Gender Bidang Pendidikan
A.2.1. Harapan Lama Sekolah



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, 2023

Gambar 9 Harapan Lama Sekolah (Tahun)

A.2.2. Rata-Rata Lama Sekolah



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, 2023

Gambar 10 Rata-rata Lama Sekolah (TLS) menurut Jenis Kelamin (Tahun)



A.2.3. Angka Partisipasi Sekolah (APS)



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda dan Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2023

Gambar 11 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin

Berdasarkan gambar 11, rentang Usia 5-6 tahun tidak ada partisipasi dalam pendidikan pada rentang usia ini baik untuk laki-laki maupun Perempuan sedangkan pada rentang Usia 7-12 tahun partisipasi pendidikan untuk kedua jenis kelamin sangat tinggi, dengan 98.73% untuk laki-laki dan 99.95% untuk perempuan. Pada usia 13-15 tahun partisipasi pendidikan tetap tinggi untuk kedua jenis kelamin, dengan 97.67% untuk laki-laki dan 100% untuk perempuan. Pada usia 16-18 tahun terjadi penurunan dalam partisipasi pendidikan pada rentang usia ini, meskipun masih tinggi. Untuk laki-laki, APS adalah 79.41%, sedangkan untuk perempuan adalah 89.01%. Hal yang sama terjadi di rentang Usia 19-24 tahun yaitu terjadinya penurunan yang lebih signifikan dalam partisipasi pendidikan pada rentang

usia ini. APS untuk laki-laki adalah 49.61%, sedangkan untuk perempuan adalah 54.67%.

A.2.4. Angka Partisipasi Murni (APM)



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda dan Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2023

Gambar 12 Angka Partisipasi Murni (APM) Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Persentase laki-laki yang menyelesaikan SD/MI adalah 98.73%, sedangkan untuk perempuan adalah 99.24%. Secara keseluruhan, 99.55% siswa menyelesaikan SD/MI pada tahun tersebut. Pada tingkat SMP/MTs (Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah) terdapat penurunan persentase pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, persentase laki-laki yang menyelesaikan SMP/MTs adalah 86.10%, sedangkan untuk perempuan adalah 81.17%. Pada tahun 2023, persentase laki-laki yang menyelesaikan SMA/SMK/MA adalah 71.78%, sedangkan untuk perempuan



adalah 76.21%. Ini menunjukkan bahwa lebih banyak perempuan yang menyelesaikan pendidikan menengah atas dibandingkan dengan laki-laki pada tahun tersebut. Pada tingkat Perguruan Tinggi persentase laki-laki yang melanjutkan ke perguruan tinggi adalah 39.15%, sedangkan untuk perempuan adalah 46.05%. Ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki tingkat partisipasi yang lebih tinggi dalam pendidikan tinggi dibandingkan dengan laki-laki pada tahun tersebut. Pada umumnya, data ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki tingkat partisipasi yang lebih tinggi dalam pendidikan menengah atas dan perguruan tinggi dibandingkan dengan laki-laki.

A.2.5. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Tabel 23 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Data	Laki-Laki	Perempuan
Angka Partisipasi Kasar PAUD	23,69	23,69
Angka Partisipasi Kasar SD	108,68	102,98
Angka Partisipasi Kasar SMP	88,03	86,57
Angka Partisipasi Kasar SM	95,92	91,20

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, 2023

A.2.6. Angka Putus Sekolah (APtS)

Tabel 24 Persentase Angka Putus Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik	Angka Putus Sekolah SMA	Angka Putus Sekolah SMK
Laki-laki	77	14
Perempuan	60	44

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, 2023

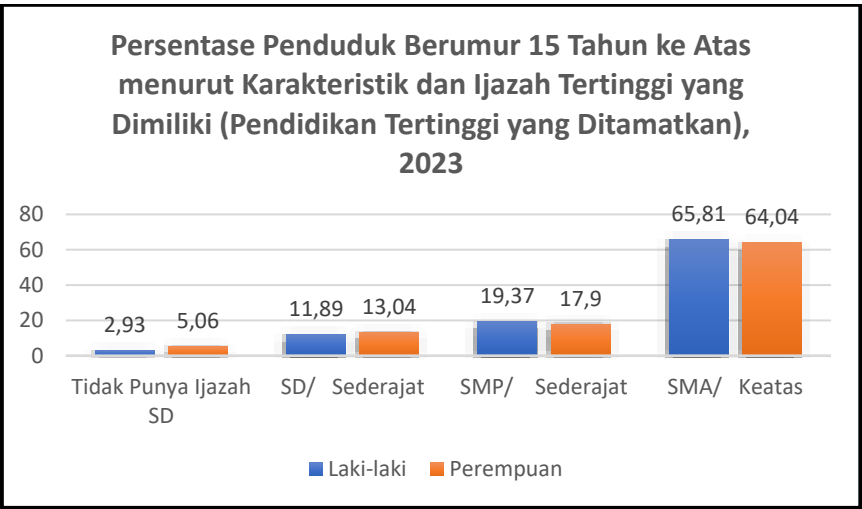


A.2.7. Persentase Penduduk Usia Kerja 15 tahun ke atas menurut Tingkat Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan

Tabel 25 Persentase Penduduk Usia Kerja 15 tahun ke atas menurut Tingkat Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan

Karakteristik	Tidak Punya Ijazah SD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Keatas
Laki-laki	2,93	11,89	19,37	65,81
Perempuan	5,06	13,04	17,90	64,04

Sumber: BPS Kota Samarinda, 2023



Sumber: BPS Kota Samarinda, 2023

Gambar 13 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun keatas menurut Karakteristik dan Ijazah Tertinggi yang Dimiliki



Tabel 24 menunjukkan karakteristik penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin. Data tersebut menggambarkan persentase laki-laki dan perempuan dalam berbagai kategori pendidikan, mulai dari tidak memiliki ijazah SD hingga mencapai tingkat pendidikan SMA/ke atas. Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi, seperti SMA/ke atas, persentase laki-laki dan perempuan cenderung lebih serupa. Ini menunjukkan bahwa, setidaknya dalam kategori ini, terdapat tingkat kesetaraan gender dalam mencapai pendidikan tinggi. Persentase laki-laki yang tidak memiliki ijazah SD adalah 2.93%, sedangkan untuk perempuan adalah 5.06%. Persentase laki-laki yang memiliki ijazah setara SD adalah 11.89%, sedangkan untuk perempuan adalah 13.04%. Persentase laki-laki yang memiliki ijazah setara SMP adalah 19.37%, sedangkan untuk perempuan adalah 17.90%. Persentase laki-laki yang memiliki ijazah setara SMA atau pendidikan yang lebih tinggi adalah 65.81%, sedangkan untuk perempuan adalah 64.04%.



Sumber: BPS Kota Samarinda, 2023

Gambar 14 Persentase Penduduk Usia 25 Tahun keatas dengan Pendidikan SMA keatas menurut Jenis Kelamin (Persen)

A.3. Kesenjangan Gender Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

A.3.1. Akses Penggunaan Internet Pada Perempuan

Tabel 26 Akses Penggunaan Internet pada Perempuan

No.	Uraian	Jumlah	%
1	Akses Penggunaan Internet Pada Perempuan	205 Orang	93,61

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda, 2023

Data pada tabel 25 informasi tentang akses penggunaan internet pada perempuan, di mana 205 orang dari total populasi memiliki akses tersebut. Persentasenya adalah 93,61%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan memiliki akses ke internet. Hal ini menunjukkan peningkatan akses perempuan terhadap teknologi dan potensi untuk inklusi digital yang lebih besar di kalangan perempuan.

A.3.2. Jumlah Perempuan menjadi Tenaga Pengajar/Guru

Tabel 27 Jumlah Perempuan menjadi Tenaga Pendidik/Guru

Kota Samarinda	Jumlah Tenaga Pendidik/Guru
Perempuan	1,642
Laki-Laki	1,163

Sumber: [siga.dkp3a.kaltimprov](https://siga.dkp3a.kaltimprov.go.id), 2023

Berdasarkan tabel 26 terdapat variasi jumlah penduduk antara kecamatan di Samarinda. Selain itu, terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah laki-laki dan perempuan di setiap kecamatan, yang mencerminkan dinamika demografis di wilayah tersebut. Dengan total keseluruhan penduduk sebanyak 9.975,



dengan 2.686 laki-laki dan 7.289 perempuan, menggambarkan bahwa jumlah perempuan jauh lebih tinggi daripada jumlah laki-laki secara keseluruhan, menunjukkan kecenderungan distribusi jenis kelamin dalam populasi di wilayah tersebut.

A.4. Kesetaraan Gender Bidang Kesehatan

A.4.1. Umur Harapan Hidup (UHH)



Sumber: BPS 2023

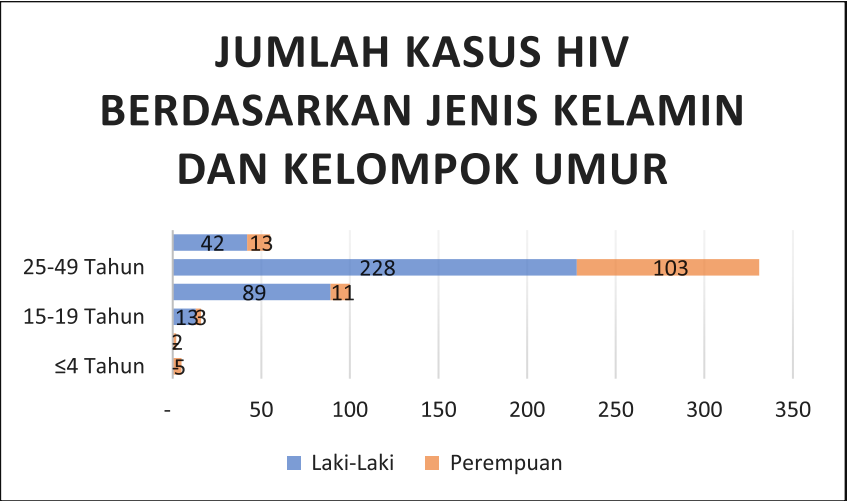
Gambar 15 Umur Harapan Hidup (UHH)

Indeks yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar (dimensi) yaitu umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak. Dimensi tersebut dihitung dalam indikator Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan Pengeluaran per kapita disesuaikan. Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dikelompokkan dalam empat kelompok, yaitu:

- 1. Kelompok "Sangat Tinggi": $IPM \geq 80$
- 2. Kelompok "Tinggi": $70 \leq IPM \leq 80$
- 3. Kelompok "Sedang": $60 \leq IPM \leq 70$
- 4. Kelompok "Rendah": $IPM < 60$

Pengelompokan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik.

A.4.2. Perempuan Penderita HIV/AIDS



Sumber:Dinas Kesehatan Kota Samarinda, 2023
Gambar 16 Perempuan Penderita HIV/AIDS

Gambar 16 memberikan gambaran tentang distribusi kasus HIV pada perempuan berdasarkan kelompok umur Jumlah kasus HIV perempuan cenderung meningkat seiring bertambahnya usia, dengan jumlah kasus tertinggi terjadi pada rentang usia 25-49 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa kelompok usia ini memiliki risiko yang lebih tinggi terkena HIV dibandingkan dengan



kelompok usia lainnya. Analisis seperti ini dapat membantu dalam merencanakan program pencegahan dan pengobatan yang lebih terarah sesuai dengan profil risiko berdasarkan kelompok umur.

A.4.3. Angka Kematian Ibu Melahirkan



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Samarinda, 2023

Gambar 17 Angka Kematian Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas di Kota Samarinda

Gambar 17 menggambarkan jumlah kematian ibu dalam berbagai tahapan proses kehamilan dan persalinan. Jumlah kematian ibu nifas (setelah melahirkan) memiliki jumlah yang paling tinggi, yang menunjukkan pentingnya perhatian dan perawatan yang tepat pasca persalinan untuk mengurangi risiko kematian ibu. Kematian ibu hamil dan bersalin yang terjadi menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan maternal di Kota Samarinda.

A.4.4. Jumlah Ibu Nifas yang Mendapatkan Vitamin A



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Samarinda, 2023

Gambar 18 Jumlah Ibu Nifas yang Mendapatkan Vitamin A

Gambar 18 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah ibu nifas yang mendapatkan vitamin A dari tahun 2022 ke tahun 2023. Pemberian vitamin A kepada ibu nifas merupakan salah satu langkah penting dalam upaya pencegahan terhadap masalah kesehatan ibu dan anak salah satunya membantu meningkatkan kesehatan ibu dan bayi yang baru lahir, serta mengurangi risiko komplikasi kesehatan yang terkait dengan kekurangan vitamin A, dan peningkatan ini bisa menjadi indikator positif dalam perbaikan pelayanan kesehatan maternal di Samarinda.

A.4.5. Persentase Pertolongan Persalinan di Kota Samarinda Tahun 2022-2023

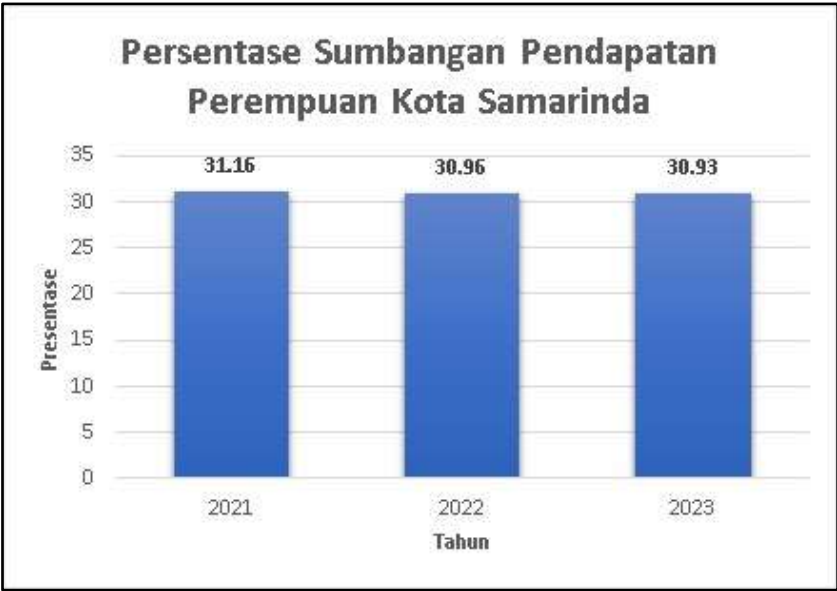


Sumber:Dinas Kesehatan Kota Samarinda, 2023

Gambar 19 Persentase Pertolongan Persalinan di Kota Samarinda

Gambar 19 menunjukkan terjadinya penurunan dari tahun 2022 ke tahun 2023 yaitu sebesar 1,17%, persentase pertolongan persalinan tetap tinggi, menunjukkan bahwa sebagian besar persalinan di Kota Samarinda mendapatkan pertolongan yang memadai dari tenaga kesehatan terlatih. Hal ini penting untuk memastikan keselamatan ibu dan bayi selama proses persalinan dan mengurangi risiko komplikasi yang dapat terjadi.

A.5. Kesetaraan Gender Bidang Ketenagakerjaan
A.5.1. Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja



Sumber:BPS Kota Samarinda, 2023

Gambar 20 Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan di Kota Samarinda

Pada gambar 20 menunjukkan persentase sumbangan pendapatan perempuan dari total pendapatan di Samarinda selama tiga tahun terakhir meskipun terjadi fluktuasi kecil dari tahun ke tahun, persentase tersebut tetap relatif stabil. Hal ini memberikan gambaran tentang kontribusi yang signifikan dalam perekonomian perempuan dalam konteks pendapatan rumah tangga di Samarinda.



A.5.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tabel 28 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Samarinda

Kota	2021	2022	2023
Samarinda	64.29	62.96	65.49

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Data 2018-2020 menggunakan Backcast dari Penimbang berbasis SUPAS 2015, 2023



Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Data 2018-2020 menggunakan Backcast dari Penimbang berbasis SUPAS 2015, 2023

Gambar 21 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Samarinda

Tren kenaikan persentase partisipasi angkatan kerja perempuan di Kota Samarinda pada tahun 2023, seperti yang ditunjukkan pada tabel diatas, merupakan hal yang positif. Peningkatan ini menunjukkan adanya peluang ekonomi yang lebih besar bagi perempuan di Samarinda. Partisipasi perempuan dalam angkatan

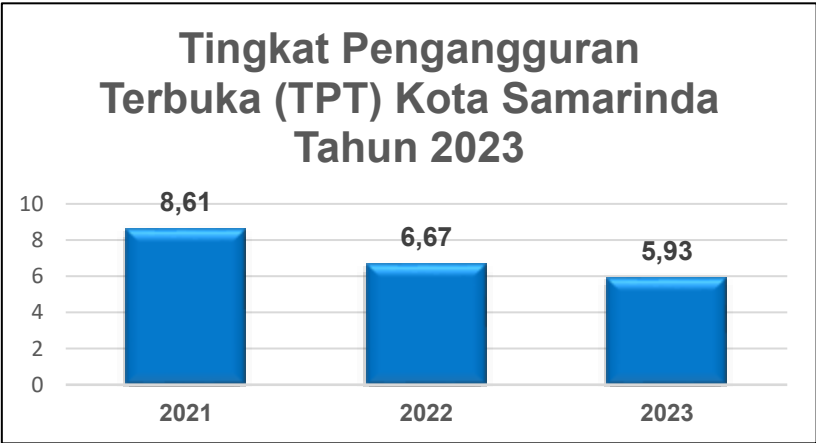
kerja memiliki banyak manfaat, termasuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan gender, dan memberikan kontribusi positif pada perkembangan sosial dan ekonomi. Hal ini juga dapat memperkuat posisi perempuan dalam rumah tangga dan masyarakat secara keseluruhan

A.5.3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tabel 29 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Samarinda Tahun 2023

Kota	2021	2022	2023
Samarinda	8,16	6,78	5,92

Sumber: BPS Kota Samarinda, 2023
<https://kaltim.bps.go.id/indicator/6/59/1/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-menurut-kabupaten-kota.html>



Sumber: BPS Kota Samarinda, 2023
Gambar 22 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Samarinda



Data pada gambar 22 menunjukkan persentase dari angkatan kerja yang tidak bekerja namun aktif mencari pekerjaan di Kota Samarinda selama tiga tahun terakhir. Tren penurunan tingkat pengangguran terbuka dari tahun 2021 ke tahun 2023 menunjukkan adanya perbaikan kondisi ketenagakerjaan di Samarinda Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka salah satunya mengindikasikan bahwa ekonomi sedang tumbuh dan peluang kerja semakin tersedia.

A.6. Kesetaraan Gender Bidang Politik
A.6.1. Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di Parlemen Tingkat Pusat dan Kota

Tabel 30 Anggota DPRD Berdasarkan Partai dan Jenis Kelamin

Partai Politik	Laki-Laki	Perempuan
Partai Golongan Karya	5	0
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	7	1
Partai Gerindra	8	0
Partai Demokrat	3	2
Partai Amanat Rakyat	3	1
Partai Persatuan Pembangunan	1	1
Partai Hati Nurani Rakyat	1	0
Partai Kebangkitan Bangsa	2	1
Partai Keadilan Sejahtera	5	0
Partai NasDem	3	1
Jumlah	38	7

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda, 2023



Data pada tabel 29 menunjukkan distribusi anggota DPRD berdasarkan partai politik dan jenis kelamin pada tahun 2023. Meskipun jumlah laki-laki masih lebih dominan daripada perempuan dalam anggota DPRD, terdapat beberapa partai yang memiliki perwakilan perempuan yang lebih signifikan dibandingkan dengan yang lain. Hal ini mencerminkan upaya untuk meningkatkan representasi perempuan dalam kelembagaan politik seperti DPRD.

A.6.2. Persentase Keterwakilan Perempuan sebagai Pengambilan Keputusan di Lembaga Eksekutif

Tabel 31 Jumlah Persentase Keterwakilan Perempuan sebagai Pengambilan Keputusan di Lembaga Eksekutif

No.	Uraian	Jumlah	%
1	Jumlah dan Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif.	7	100

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda, 2023

Tabel 30 menunjukkan bahwa dalam lembaga eksekutif yang dimaksud, terdapat 7 perempuan yang menjabat sebagai pengambil keputusan, dan keterwakilan perempuan tersebut mencapai 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam konteks lembaga eksekutif tersebut, terdapat upaya yang berhasil untuk mencapai keterwakilan gender yang seimbang atau bahkan mendekati kesetaraan gender dalam pengambilan keputusan.



A.7. Kesetaraan Gender Bidang Hukum

A.7.1. Jumlah Perempuan Menjabat Jaksa dan Pejabat Kejaksaan

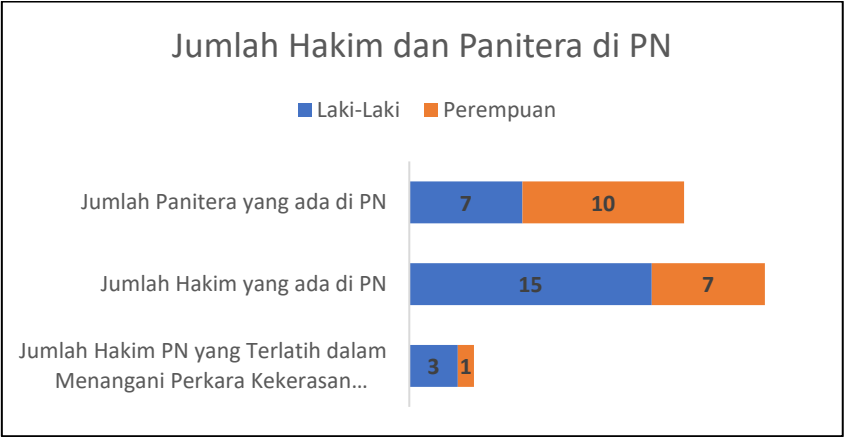


Sumber: Kejaksaan Negeri Samarinda, 2023

Gambar 23 Jumlah Jaksa di Kejaksaan Negeri Tahun 2023

Gambar 23 memberikan informasi jumlah Jaksa di Kejaksaan Negeri dengan jumlah jaksa laki-laki lebih banyak dari jaksa Perempuan. Selisih persentase antara jumlah jaksa laki-laki dan Perempuan di Kejaksaan Negeri adalah 30%.

A.7.2. Jumlah Perempuan Hakim, Panitera, dan Pejabat Pengadilan

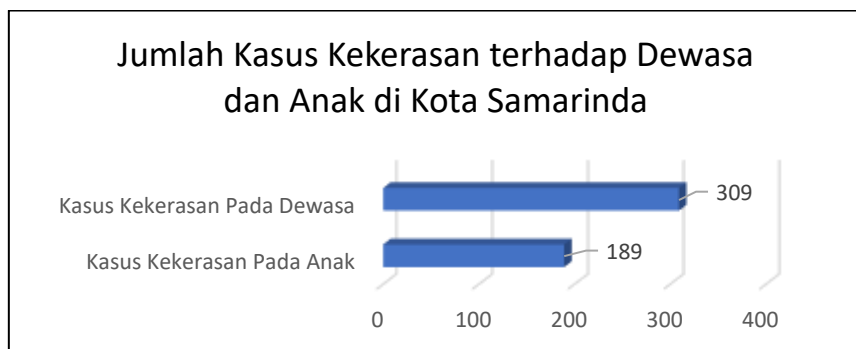


Sumber: Pengadilan Negeri Samarinda, 2023
Gambar 24 Jumlah Hakim dan Panitera di Pengadilan Negeri

Gambar 24 memberikan informasi bahwa jumlah Hakim Pengadilan Negeri yang terlatih dalam menangani perkara kekerasan terhadap Perempuan dan anak sebanyak 4 orang dari 21 jumlah Hakim yang ada di Pengadilan Negeri. Hal ini memberikan gambaran tentang proporsi hakim dan panitera berdasarkan jenis kelamin di Pengadilan Negeri, serta tingkat pelatihan dalam menangani perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak di kalangan Hakim.



A.7.3. Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Samarinda



Sumber: Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) Kota Samarinda, 2023

Gambar 25 Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Dewasa dan Anak di Kota Samarinda

Berdasarkan Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) Kota Samarinda terjadi peningkatan jumlah kasus kekerasan pada anak dan dewasa dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Peningkatan tertinggi di tahun 2023 untuk kasus kekerasan terhadap anak dan dewasa yaitu masing-masing sebanyak 189 kasus dan 309 kasus.

A.7.4. Jumlah Perempuan Pengurus dan Petugas Lapas



Sumber: Kanwil Kemenkumham Provinsi Kalimantan Timur,
2023

Gambar 26 Jumlah Perempuan Pengurus dan Petugas Lapas
Kota Samarinda Tahun 2023

Berdasarkan gambar 26 jumlah Perempuan pengurus dan petugas lapas berdasarkan jenis kelamin sebanyak 330 petugas Lapas. Dominasi petugas Lapas berjenis kelamin laki-laki sebanyak 88% atau sebanyak 291 petugas dan sisanya sebesar 12% atau 39 petugas Lapas.

A.8. Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi

A.8.1. Pengeluaran Per Kapita

Tabel 32 Persentase Penduduk menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan di Kota Samarinda

Golongan	2021	2022	2023
< 150.000	0	0	0
150.000 - 199.999	0	0	0
200.000 - 299.999	0	0	0
300.000 - 499.999	2.59	0	0
500.000 - 749.999	4.85	3.52	2.82
750.000 - 999.999	16.12	9.58	9.52
1000.000 - 1.499.999	34.3	26.62	29.16
> 1.500.000	42.15	60.28	58.5
Jumlah	100	100	100

Sumber: BPS Kota Samarinda dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), 2023

Tabel 31 menggambarkan persentase penduduk Kota Samarinda berdasarkan golongan pengeluaran per kapita sebulan dalam rentang waktu tiga tahun, yaitu 2021, 2022, dan 2023. Tidak ada penduduk yang masuk dalam golongan pengeluaran kurang dari Rp150.000,- per bulan hingga Rp299.999,-. Mayoritas penduduk berada dalam golongan pengeluaran yang lebih tinggi, dengan tren meningkat dari tahun ke tahun untuk golongan pengeluaran di atas Rp500.000,- per bulan. Golongan pengeluaran tertinggi (> Rp1.500.000,- per bulan) memiliki persentase yang cukup signifikan, meskipun mengalami sedikit penurunan dari tahun 2022 ke 2023. Peningkatan persentase pada golongan pengeluaran yang lebih tinggi dapat mengindikasikan pertumbuhan ekonomi atau pergeseran dalam distribusi pendapatan. Sementara itu, kurangnya data pada golongan pengeluaran yang lebih rendah bisa menjadi perhatian untuk pemantauan lebih lanjut terhadap



kesejahteraan ekonomi masyarakat yang lebih rentan.

A.8.2. Perempuan Anggota Koperasi

Tabel 33 Data Jumlah Anggota Koperasi berdasarkan jenis kelamin kota Samarinda Tahun 2023

No	Uraian	Jenis Kelamin	
		Laki	Perempuan
1	Data Jumlah Anggota Koperasi berdasarkan jenis kelamin kota Samarinda Tahun 2023	29.233	25.029
Jumlah		54.262	

Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda, 2023

Tabel 32 merupakan jumlah anggota koperasi berdasarkan jenis kelamin di Kota Samarinda pada tahun 2023. Dari jumlah total 54.262 anggota koperasi, sebanyak 29.233 adalah laki-laki dan 25.029 adalah perempuan. Data ini menunjukkan bahwa ada perbedaan jumlah anggota koperasi antara laki-laki dan perempuan di Kota Samarinda pada tahun tersebut, dengan jumlah anggota laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah anggota perempuan.

A.8.3. Perempuan Miskin Ekstrim

Tabel 34 Jumlah dan Persentase Perempuan Miskin Ekstrim yang Terbentuk

No.	Uraian	Jumlah	%
1	Jumlah dan Persentase Perempuan Miskin Ekstrim yang terbentuk	323	0,66

Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda, 2023



Pada tahun 2023, terdapat 323 perempuan miskin ekstrim yang terdeteksi, yang merupakan sekitar 0.66% dari populasi yang tercatat. Ini menunjukkan adanya tantangan dalam penanggulangan kemiskinan, terutama dalam hal kesenjangan gender.

A.9. Kesetaraan Gender Bidang Sosial Budaya

A.9.1. Perkawinan Anak

Tabel 35 Perkawinan Anak

No.	Uraian	Jumlah	%
1	Perkawinan Anak	116	2.22

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda, 2023

Data pada tabel 34 menunjukkan jumlah perkawinan anak yang terjadi. Pada tahun 2023 terdapat 25 laki-laki dan 91 wanita dari total 5,217 pernikahan. Rentang usia perkawinan <19 tahun sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 19 Tahun 2019 yang mengatur bahwa usia minimal menikah adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Persentase perkawinan anak sebesar 2,22 persen. Perkawinan anak merupakan masalah serius yang memerlukan tindakan pencegahan dan perlindungan bagi anak-anak yang terlibat.

A.9.2. Jumlah Fasilitas Kegiatan Budaya, Kreativitas dan Rekreatif

Tabel 36 Jumlah Fasilitas Kegiatan Budaya. Kreatifitas dan Rekreatif

No	Nama Destinasi	Jumlah dan Jenis Wisata	Sertifikat CHSE
1	Tebing Lonceng	Alam	√



No	Nama Destinasi	Jumlah dan Jenis Wisata	Sertifikat CHSE
2	Air Terjun Pinag Seribu	Alam	
3	Puncak Samarinda	Alam	
4	Arboretum Sempaja	Alam	
5	Wisata Susur Sungai Mahakam	Alam	
6	Tjius Palace	Buatan	√
7	Naureen Mini Garden	Buatan	√
8	Bumi Sempaja Waterpark	Buatan	√
9	Mahakam Lampion Garden	Buatan	√
10	Citra Niaga	Buatan	
11	Salma Shofa	Buatan	√
12	Teras Alam Ulin	Buatan	
13	Pemancingan Jukut Etam	Buatan	√
14	Rumah Ulin Arya	Buatan	√
15	Kebun Ndesa	Buatan	√
16	Pemandian Serayu	Buatan	√
17	Citraland Waterpark	Buatan	
18	Kawasan Kuliner Alaya	Buatan	
19	Kampung Tenun	Buatan	
20	Kampung Ketupat	Buatan	
21	Masjid Shiratal Mustaqim	Buatan	
22	Desa Budaya Pampang	Buatan	
23	Islamic Center	Buatan	
24	Makam Lamohang Daeng Mangkona	Buatan	
25	Buddhist Center	Buatan	

No	Nama Destinasi	Jumlah dan Jenis Wisata	Sertifikat CHSE
26	Klenteng Thien Le Kong	Buatan	
27	Gereja Katedral	Buatan	
28	Gereja Reformed Injil	Buatan	
29	Kapal Wisata Pesut Etam	Transportasi Wisata	√
30	Kapal Wisata Pesut Kita	Transportasi Wisata	√
31	Kapal Wisata Pesut Bentong	Transportasi Wisata	√
32	Kapal Wisata Pesut Mahakam	Transportasi Wisata	
33	Kapal Wisata Pesut Mahkota	Transportasi Wisata	√
34	Kapal Wisata Enggang Borneo	Transportasi Wisata	

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Samarinda, 2023

Tabel 35 menyajikan data 34 destinasi wisata diantaranya dengan jenis wisata alam, buatan, dan transportasi wisata. Sejumlah 14 destinasi wisata dari 34 destinasi telah tersertifikasi CHSE yang merupakan bukti bahwa tempat penyelenggara wisata telah memenuhi standar kebersihan, keamanan, dan Kesehatan yang ditetapkan. Sertifikasi ini juga merupakan salah satu daya tarik destinasi wisata. Kepemilikan sertifikasi ini harus ditingkatkan agar pengunjung lebih merasa aman dan nyaman saat berada di destinasi wisata terutama bagi destinasi wisata yang belum mengantongi sertifikat CHSE.



A.9.3. Jumlah Perempuan menjadi Kepala Keluarga

Tabel 37 Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin
Perkelurahan Kota Samarinda Tahun 2023

NO	KELURAHAN	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Palaran	3,645	22,071
2	Samarinda Seberang	4,708	21,881
3	Samarinda Ulu	9,621	44,853
4	Samarinda Ilir	5,329	23,393
5	Samarinda Utara	6,580	36,116
6	Sungai Kunjang	9,130	45,816
7	Sambutan	3,562	19,861
8	Sungai Pinang	7,581	36,630
9	Samarinda Kota	2,820	11,388
10	Loajanan Ilir	4,481	23,118
TOTAL		57,457	285,127
PERSENTASE		20.15	

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, 2023

Dari tabel 36 diperoleh bahwa jumlah total kepala keluarga di Kota Samarinda pada tahun 2023 sebanyak 57.457 Kepala Keluarga. Hal ini menyoroti pentingnya pengakuan peran dan kontribusi perempuan dalam kepemimpinan dan pengelolaan rumah tangga telah dmenjadi bagian dari perempuan.

A.10. Kelembagaan dan Pelembagaan PUG

Tabel 38 Jumlah dan Persentase Perangkat Daerah yang telah Melembagakan dan Melaksanakan PUG

No.	Uraian	Jumlah	%
1	Jumlah dan Persentase perangkat daerah yang telah melembagakan dan melaksanakan PUG	40	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, 2023

Tabel 37 menunjukkan bahwa sebanyak 40 perangkat daerah telah melembagakan dan melaksanakan PUG (Pengarusutamaan Gender). Persentase ini mencapai 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh perangkat daerah yang dimaksud telah mengadopsi dan mengimplementasikan PUG.

A.10.1. Jumlah Kebijakan dan Peraturan Perundangan tentang Pengarusutamaan Gender tingkat Nasional

Tabel 39 Jumlah Kebijakan dan Peraturan Perundangan tentang Pengarusutamaan Gender tingkat Nasional

No.	Uraian	Jumlah	%
1	Jumlah Kebijakan dan Peraturan Perundangan tentang Pengarusutamaan Gender tingkat Nasional	4	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, 2023



Kebijakan dapat dilihat pada Inpres No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dan permen PPPA RI No 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran yang responsive Gender untuk daerah dan surat edaran bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Strategi Nasional Pengarusutamaan Gender (PUG).

A.10.2. Jumlah Kebijakan dan Peraturan Perundangan tentang Pengarusutamaan Gender Tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota

Tabel 40 Jumlah Kebijakan dan Peraturan Perundangan tentang Pengarusutamaan Gender Tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota

No.	Uraian	Jumlah	%
1	Jumlah Kebijakan dan peraturan perundangan tentang Pengarusutamaan gender tingkat provinsi dan kabupaten kota	3	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, 2023

Tabel 39 menunjukkan bahwa terdapat 3 kebijakan dan peraturan perundangan tentang pengarusutamaan gender yang dihasilkan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Persentase keberadaan kebijakan ini mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa di tingkat provinsi dan kabupaten/kota telah ada upaya untuk mengembangkan kebijakan dan peraturan yang bertujuan untuk memprioritaskan penerapan pengarusutamaan gender.



A.10.3.Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai rencana Pencapaian PUG yang disahkan dengan Keputusan atau Edaran Sekretaris Daerah atau Kepala Badan yang Membidangi Urusan Penunjang Perencanaan

Tabel 41 Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai rencana pencapaian PUG

No.	Uraian	Jumlah	%
1	Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai rencana pencapaian PUG yang disahkan dengan Keputusan atau Edaran Sekretaris Daerah atau Kepala Badan yang membidangi urusan penunjang perencanaan	1	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, 2023

Tabel 40 menunjukkan bahwa terdapat 1 provinsi atau kabupaten/kota yang memiliki rencana pencapaian Pengarusutamaan Gender (PUG) yang disahkan melalui Keputusan atau Edaran dari Sekretaris Daerah atau Kepala Badan yang membidangi urusan penunjang perencanaan. Persentase keberadaan rencana pencapaian ini adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa satu wilayah telah mengambil langkah konkret dalam merencanakan pencapaian penggunaan PUG melalui instrumen kebijakan yang resmi.



A.10.4. Jumlah Kelompok Kerja (POKJA) PUG di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Terbentuk

Tabel 42 Jumlah Kelompok Kerja (POKJA) PUG di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Terbentuk

No.	Uraian	Jumlah	%
1	Jumlah Kelompok Kerja (POKJA) PUG di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terbentuk	1	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, 2023

Tabel 41 menunjukkan bahwa terdapat 1 Kelompok Kerja (POKJA) Pengarusutamaan Gender (PUG) yang terbentuk di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan bahwa satu kelompok telah dibentuk untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan terkait dengan penerapan PUG di tingkat tersebut.

A.10.5. Jumlah Kelompok Kerja (POKJA) PUG di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Aktif

Tabel 43 Jumlah Kelompok Kerja (POKJA) PUG di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Aktif

No.	Uraian	Jumlah	%
1	Jumlah Kelompok Kerja (POKJA) PUG di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang aktif	1	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, 2023

Tabel 42 menunjukkan bahwa terdapat 1 Kelompok Kerja (POKJA) Pengarusutamaan Gender (PUG) yang aktif di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Persentase keaktifan POKJA ini adalah 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa satu kelompok telah secara aktif terlibat dalam koordinasi dan pelaksanaan kegiatan terkait dengan penerapan PUG di tingkat tersebut.

A.10.6. Persentase Perangkat Daerah yang Terwakili dalam Kelompok Kerja (POKJA) PUG di Provinsi dan Kabupaten/Kota

Tabel 44 Jumlah dan Persentase Perangkat Daerah yang terwakili dalam Kelompok Kerja (POKJA) PUG di Provinsi dan Kabupaten/Kota

No.	Uraian	Jumlah	%
1	Jumlah dan Persentase Perangkat Daerah yang terwakili dalam Kelompok Kerja (POKJA) PUG di Provinsi dan Kabupaten/Kota	40	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, 2023

Tabel 43 menunjukkan bahwa sebanyak 40 perangkat daerah terwakili dalam Kelompok Kerja (POKJA) Pengarusutamaan Gender (PUG) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Persentase perwakilan perangkat daerah dalam POKJA ini adalah 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa semua perangkat daerah yang dimaksud telah memiliki perwakilan yang aktif dalam kelompok kerja untuk memfasilitasi penerapan PUG di tingkat tersebut.



A.10.7. Persentase Focal Point Perangkat Daerah

Tabel 45 Jumlah Dan Persentase Focal Point Perangkat Daerah

No.	Uraian	Jumlah	%
1	Jumlah Dan Persentase Focal Point Perangkat Daerah	40	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, 2023

Tabel 44 menunjukkan bahwa sebanyak 40 perangkat daerah memiliki focal point yang ditunjuk dalam konteks Pengarusutamaan Gender (PUG). Persentase perangkat daerah yang memiliki focal point ini adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap perangkat daerah yang terlibat telah menetapkan satu atau lebih orang yang bertanggung jawab sebagai *focal point* dalam mengoordinasikan implementasi PUG di tingkat tersebut.

A.10.8. Persentase Perencana Perangkat Daerah yang Terlatih dan Tersertifikasi untuk Melaksanakan PPRG

Tabel 46 Jumlah dan Persentase perencana perangkat daerah yang terlatih dan tersertifikasi untuk melaksanakan PPRG

No.	Uraian	Jumlah	%
1	Jumlah dan Persentase perencana perangkat daerah yang terlatih dan tersertifikasi untuk melaksanakan PPRG	32	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, 2023



Tabel 45 menunjukkan bahwa sebanyak 32 perencana dari perangkat daerah telah terlatih dan tersertifikasi untuk melaksanakan Penyusunan Program Pengarusutamaan Gender (PPRG). Persentase perencana perangkat daerah yang telah terlatih dan tersertifikasi ini adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa semua perencana yang terlibat telah mengikuti pelatihan dan memperoleh sertifikasi yang diperlukan untuk memfasilitasi penyusunan PPRG dengan memperhatikan aspek pengarusutamaan gender.

A.10.9. Jumlah SDM (Inspektur Pembantu dan Auditor) pada Inspektorat yang sudah Terlatih PUG

Tabel 47 Jumlah SDM (inspektur pembantu dan auditor) pada Inspektorat yang sudah terlatih PUG

No.	Uraian	Jumlah	%
1	Jumlah SDM (inspektur pembantu dan auditor) pada Inspektorat yang sudah terlatih PUG	5	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, 2023

Tabel 46 menunjukkan bahwa dari total SDM (inspektur pembantu dan auditor) yang ada pada Inspektorat, sebanyak 5 orang telah menjalani pelatihan Pengarusutamaan Gender (PUG). Persentase SDM yang telah terlatih dalam PUG ini adalah 100%. Hal ini menandakan bahwa semua SDM tersebut telah mengikuti pelatihan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang penerapan PUG sesuai tugas.



A.10.10. Jumlah Fasilitator PUG yang telah Mendapat Sertifikat Pelatihan sebagai Fasilitator

Tabel 48 Jumlah fasilitator PUG yang telah mendapat Sertifikat Pelatihan sebagai Fasilitator

No.	Uraian	Jumlah	%
1	Jumlah fasilitator PUG yang telah mendapat sertifikat pelatihan sebagai fasilitator	30	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, 2023

Tabel 47 menunjukkan bahwa jumlah total fasilitator Pengarusutamaan Gender (PUG) yang telah mendapatkan sertifikat pelatihan sebagai fasilitator adalah sebanyak 30 orang. Persentase fasilitator yang telah mendapatkan sertifikasi pelatihan ini adalah 100%. Ini menandakan bahwa semua fasilitator tersebut telah sukses menyelesaikan pelatihan yang diperlukan dan telah memperoleh sertifikasi sebagai fasilitator PUG.

A.10.11. Jumlah Gender Champion di Kabupaten/ Kota

Tabel 49 Jumlah Gender Champion di Kabupaten/ Kota

No.	Uraian	Jumlah	%
1	Jumlah Gender Champion di Kabupaten/ Kota	20	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, 2023

Tabel 48 menunjukkan bahwa jumlah total Gender Champion di Kabupaten/Kota adalah sebanyak 20 orang. Persentase Gender Champion ini mencapai 100%. Ini menandakan bahwa



Kabupaten/Kota memiliki 20 orang yang ditunjuk sebagai Gender Champion, yang bertanggung jawab dalam mempromosikan dan mendorong implementasi pengarusutamaan gender.

A.10.12. Persentase Alokasi Anggaran Dinas PPPA atau Sejenisnya untuk Fasilitas PUG

Tabel 50 Jumlah dan Persentase alokasi anggaran Dinas PPPA atau sejenisnya untuk Fasilitas PUG

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah dan Persentase alokasi anggaran Dinas PPPA atau sejenisnya untuk Fasilitas PUG	Rp3.871.522.260,-

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, 2023

Tabel 49 menunjukkan bahwa alokasi anggaran Dinas PPPA atau instansi sejenisnya untuk fasilitas Pengarusutamaan Gender (PUG) sebesar Rp3.871.522.260,- Persentase alokasi anggaran ini adalah 100%. Ini menandakan bahwa seluruh anggaran yang dialokasikan oleh Dinas PPPA atau instansi serupa tersebut digunakan untuk mendukung dan memfasilitasi implementasi PUG.



A.10.16.Persentase perangkat daerah (diluar lembaga drivers) Kabupaten/Kota yang sudah memiliki alokasi anggaran untuk kegiatan pelebagaan PUG (sosialisasi, Advokasi, KIE, Bimbingan eknis ARG, dll)

Tabel 51 Persentase Perangkat Daerah (diluar lembaga drivers) Kabupaten/Kota yang sudah memiliki alokasi anggaran untuk Kegiatan Pelebagaan PUG

No.	Uraian	Jumlah	%
1	Jumlah dan Persentase perangkat daerah (diluar lembaga drivers) Kabupaten/Kota yang sudah memiliki alokasi anggaran untuk kegiatan pelebagaan PUG (sosialisasi, Advokasi, KIE, Bimbingan teknis ARG, dll	24	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, 2023

Dari tabel 50 disimpulkan bahwa 24 perangkat daerah di luar lembaga drivers di Kabupaten/Kota telah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pelebagaan Pedoman Umum Ejaan dan Tata Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (PUG), seperti sosialisasi, advokasi, KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi), serta bimbingan teknis ARG (Analisis Risiko Gender). Persentase perangkat daerah yang telah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan tersebut adalah 100%. Hal ini menunjukkan komitmen dari perangkat daerah dalam memfasilitasi implementasi PUG melalui berbagai kegiatan yang mendukung.



A.10.17. Jumlah Lembaga Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha yang termasuk dalam Pokja PUG

Tabel 52 Jumlah Lembaga Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha yang termasuk dalam Pokja PUG

No.	Uraian	Jumlah	%
1	Jumlah Lembaga Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha yang termasuk dalam Pokja PUG	1	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, 2023

Data tabel 51 menunjukkan bahwa terdapat 1 lembaga masyarakat, perguruan tinggi, dan dunia usaha yang termasuk dalam Pokja PUG (Kelompok Kerja Pedoman Umum Ejaan dan Tata Bahasa Indonesia yang Disempurnakan). Persentase lembaga ini yang terlibat dalam Pokja PUG adalah 100%. Hal ini menandakan bahwa satu lembaga tersebut telah aktif berpartisipasi dalam kelompok kerja untuk mendukung implementasi PUG.

A.10.18. Jumlah Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat (PUSPA) yang Terbentuk dan di Sahkan

Tabel 53 Jumlah Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat (PUSPA) yang Terbentuk dan di Sahkan

No.	Uraian	Jumlah	%
1	Jumlah Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat (PUSPA) yang terbentuk dan di sahkan	1	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, 2023



Dari tabel 52 menunjukkan bahwa telah terbentuk dan disahkan 1 Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Ibu dan Anak (PUSPA) Bungah Gerecek Kota Samarinda. Persentase ini adalah 100%. Ini menandakan bahwa satu Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Ibu dan Anak telah berhasil didirikan dan disahkan untuk memfasilitasi koordinasi dan kerjasama antara lembaga masyarakat dalam konteks penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG).

A.10.19. Jumlah Lembaga Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha yang Terlibat dalam Kegiatan PUG dan PPPA

Tabel 54 Jumlah Lembaga Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha yang terlibat dalam kegiatan PUG dan PPPA

No.	Uraian	Jumlah	%
1	Jumlah Lembaga Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha yang terlibat dalam kegiatan PUG dan PPPA	2	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, 2023

Dari tabel 53 menunjukkan bahwa terdapat 1 lembaga masyarakat, perguruan tinggi, dan dunia usaha yang terlibat dalam kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pembangunan Keluarga Berencana (PPPA). Persentase lembaga ini yang terlibat dalam kedua kegiatan tersebut adalah 100%. Hal ini menandakan bahwa satu lembaga telah aktif berpartisipasi dalam kegiatan yang mendukung implementasi PUG dan PPPA secara bersamaan.



3.1 PERLINDUNGAN PEREMPUAN

B.1. Berdasarkan Kewenangan PPPA

B.1.1. Jumlah Kebijakan dalam Rangka untuk Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan

Kebijakan dalam rangka untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan berjumlah 2 kebijakan, yaitu:

1. Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor: 400.2.3/193/HK-KS/V/2024 tentang Pembentukan Forum Peduli Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) (Perum Perkasa) Kota Samarinda Tahun 2024
2. Surat Edaran Walikota Provinsi Kalimantan Timur Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor: 400.2.3/193/HK-KS/V/2024 tentang Pembentukan Forum Peduli Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) (Perum Perkasa) Kota Samarinda Tahun 2024



B.1.2. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan, TPPO, dan Pelanggaran Hak-Hak Perempuan Lainnya yang Melapor ke Lembaga Layanan



Sumber: Sistem Informasi Online Perempuan dan Perlindungan Anak (Simfoni PPA), 2023

Gambar 27 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan, TPPO, dan Pelanggaran Hak-Hak Perempuan Lainnya yang Melapor ke Lembaga Layanan

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perempuan dan Perlindungan Anak (Simfoni PPA) jumlah korban lebih sedikit dari bentuk kekerasan (fisik, psikis, seksual, eksploitasi, trafficking, penelantaran, dan lainnya) dikarenakan satu korban bisa mengalami beberapa bentuk kekerasan.



B.1.3. Persentase Perempuan Korban Kekerasan, TPPO, dan Pelanggaran Hak-Hak Perempuan Lainnya yang Mendapat Layanan sesuai Standar

Tabel 55 Korban Perempuan dan Anak Perempuan UPTD

Keterangan	Usia		
	Perempuan Dewasa	Perempuan Anak	Jumlah
Korban Perempuan dan Anak Perempuan UPTD	8	21	29
Korban Perempuan dan Anak perempuan Simfoni PPA	307	137	444

Sumber: Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), 2023

Jumlah Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan penanganan dan pendampingan secara komprehensif (sesuai standar pelayanan minimal dan kebutuhannya) pada periode waktu tertentu dibagi jumlah perempuan dan anak perempuan korban kekerasan dan TPPO pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) maka didapatkan persentase perhitungan sebagai berikut

$$\begin{aligned} \text{Persentase} &= \frac{\text{Korban Perempuan dan anak Perempuan UPTD}}{\text{Korban Perempuan dan Anak Perempuan Simfoni}} \times 100\% \\ \text{Persentase} &= \frac{29}{444} \times 100\% \\ \text{Persentase} &= 6.53\% \end{aligned}$$



B.2. Perlindungan Hak Perempuan

B.2.1. Jumlah Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)/trafficking



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, 2023

Gambar 28 Jumlah Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)/trafficking



3.2 KUALITAS KELUARGA

C. 1. Berdasarkan Kewenangan PPPA

C.1.1. Angka Perceraian

Tabel 56 Angka Perceraian

No	Kecamatan	Jumlah	Persentase
1	Palaran	1,166	6
2	Samarinda Seberang	1,380	8
3	Samarinda Ulu	3,044	17
4	Samarinda Ilir	1,631	9
5	Samarinda Utara	2,010	11
6	Sungai Kunjang	3,041	17
7	Sambutan	1,347	7
8	Sungai Pinang	2,434	13
9	Samarinda Kota	854	5
10	Loa Janan Ilir	1,257	7
Jumlah		18,164	100%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, 2023

Berdasarkan tabel 55 angka perceraian tertinggi di Samarinda terdapat di dua kecamatan Samarinda Ulu dan Sungai Kunjang serta untuk angka perceraian terendah ada di Samarinda Kota.





Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, 2023

Gambar 29 Jumlah Data Perceraian per Kecamatan di Kota Samarinda

C.2. Kualitas Legalitas dan Struktur

C.2.1. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Buku Nikah

Tabel 57 Jumlah Surat Nikah /Buku Nikah yang Dikeluarkan menurut Kecamatan di Kota Samarinda

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan
Palaran	9,750	9,693
Samarinda Sberang	9,729	9,597
Samarinda Ulu	19,649	19,609
Samarinda Ilir	11,057	10,890
Samarinda Utara	16,614	16,565
Sungai Kunjang	18,956	18,880
Sambutan	10,280	10,120
Sungai Pinang	15,385	15,276
Samarinda Kota	4,395	4,363

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan
Loa Janan Ilir	10,205	10,096
TOTAL	126,020	125,089

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, 2023

C.2.2. Persentase Penduduk Usia 0-18 (Kurang 1 hari) Tahun yang memiliki Akte Kelahiran



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, 2023

Gambar 30 Persentase Penduduk Usia 0-18 Tahun (Kurang 1 Hari) per Kecamatan yang Memiliki Akte Kelahiran

C.3. Kualitas Ketahanan Fisik

C.3.1. Jumlah Balita Gizi Buruk



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Samarinda, 2023

Gambar 31 Jumlah Balita Gizi Buruk Tahun 2023

Pada gambar 31 terdapat persentase gizi buruk di tahun 2023 sebanyak 201 Orang atau 1.3 persen dari jumlah balita yang diukur yaitu sebanyak 15,285 bayi.

C.3.2. Persentase Rumah Tidak Layak Huni

Tabel 58 Jumlah dan Presentasi Rumah Tidak Layak Huni Samarinda

No	Uraian	Jumlah (Unit)	%
1	Presentasi Rumah Tidak Layak Huni	21.471	15,14%
Jumlah		21.471	15,14%

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda, 2023

Pada tabel 57 ada sebanyak 21.471 Unit rumah tidak layak huni di Kota Samarinda atau sebesar 15,14% dari rumah hunian yang ada dikota samarinda



C.4. Kualitas Ketahanan Ekonomi

C.4.1. Pengeluaran Per Kapita

Tabel 59 Persentase Penduduk menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan di Kota Samarinda

Golongan	2023
< 150.000	0
150.000 - 199.999	0
200.000 - 299.999	0
300.000 - 499.999	0
500.000 - 749.999	2.82
750.000 - 999.999	9.52
1000.000 - 1.499.999	29.16
> 1.500.000	58.5
Jumlah	100.00

Sumber: BPS Kota Samarinda, 2023

Pada Tabel 58 Terlihat Persentase Penduduk menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan di Kota Samarinda di angka 500.000 - 749.999 sebanyak 2.82%, pada golongan 750.000 - 999.999 sebanyak 9.52%, dan di golongan 1.000.000 - 1.499.999 senilai 29.16% dan > 1.500.000 senilai 58.5%



Sumber: BPS Kota Samarinda, 2023
Gambar 32 Persentase Penduduk menurut Golongan
Pengeluaran Per Kapita Sebulan di Kota Samarinda

C.4.2. Jumlah Penduduk Miskin



Sumber: BPS Kota Samarinda, 2023
Gambar 33 Persentase Penduduk Miskin di Kota Samarinda

Presentase Penduduk miskin di kota Samarinda mengalami penurunan dari tahun 2022, terlihat sejumlah 41,95% penduduk miskin tahun 2022, kemudian ditahun 2023 sebanyak 41,89%

Tabel 60 Indikator Kemiskinan di Kota Samarinda

Indikator Kemiskinan di Kota Samarinda			
Kemiskinan	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	42.84	41.95	41.89
Persentase Penduduk Miskin (P0)	4.99	4.85	4.81
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1.07	0.59	0.75
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0.32	0.13	0.16
Garis Kemiskinan (Rupiah)	750.055.00	784.198.00	850.842.00

Sumber: BPS Kota Samarinda dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), 2023

C.4.3. Persentase Kepala Rumah Tangga dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah

Tabel 61 Persentase Kepala Rumah Tangga dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah Tahun 2023

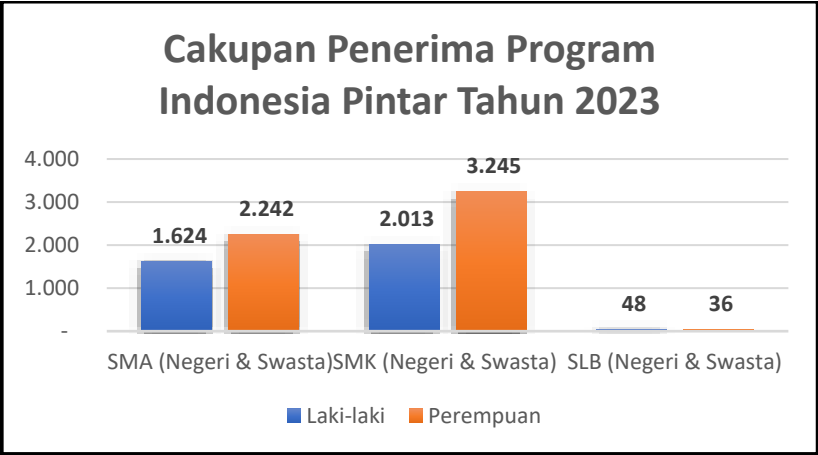
No	Uraian	Jumlah (Unit)	%
1	Persentase Kepala Rumah Tangga dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah	74.364	8,74%
Jumlah		74.364	8,74%

Sumber: BPS Kota Samarinda dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), 2023

Jumlah penduduk Kota Samarinda tahun 2023 sebanyak 861,876 Jiwa, dan presentase Kepala Rumah Tangga dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah sejumlah 74.364 atau sebanyak 8,74%.



C.4.5. Cakupan Penerima Program Indonesia Pintar



Sumber: BPS Kota Samarinda dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), 2023

Gambar 34 Cakupan Penerima Program Indonesia Pintar Tahun 2023

Pada gambar 34 terlihat cakupan program Indonesia masih mendominasi perempuan yang angkanya mulai SMA, SMK dibandingkan pria.

C.4.6. Cakupan Penerima Program Indonesia Sehat

Tabel 62 Cakupan Penerima Program Indonesia Sehat

No.	Uraian	Jumlah
1	Cakupan Penerima Program Indonesia Sehat	111,446

Sumber: BPS Kota Samarinda dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), 2023



C.5. Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi

C.5.1 Perempuan Pernah Kawin yang Menikah Sebelum Usia 19 Tahun

Tabel 63 Pernikahan Dengan Usia <19 TH per Kecamatan

No	Kecamatan	Pria <19 th	Wanita <19 th
1	Loa Janan Ilir	0	7
2	Palaran	0	10
3	Samarinda Ilir	1	9
4	Samarinda Kota	0	3
5	Samarinda Seberang	4	8
6	Samarinda Ulu	6	17
7	Samarinda Utara	4	10
8	Sambutan	1	8
9	Sungai Kunjang	2	11
10	Sungai Pinang	7	8
	TOTAL	25	91

Sumber: BPS Kota Samarinda, 2023

Pada tabel 62 Perempuan Pernah Kawin yang Menikah Sebelum Usia 19 Tahun berdasarkan kecamatan terlihat 17 Orang pada Kecamatan Samarinda Utara. Dan untuk Pria terdapat pada Sungai Pinang.





Sumber: BPS Kota Samarinda dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), 2023

Gambar 35 Pernikahan dengan Usia <19 Th per Kecamatan Kota Samarinda

C.6. Kualitas Ketahanan Sosial Budaya

C.6.1. Persentase Lansia Terlantar

Tabel 64 Jumlah dan Persentase Lansia Terlantar

No.	Uraian	Jumlah	%
1	Jumlah dan Persentase Lansia Terlantar (Angka)	349	1,5%

Sumber: Dinas Sosial Kota Samarinda, 2023

3.3 PEMENUHAN HAK ANAK

D.1. Berdasarkan Kewenangan PPPA

**D.1.1. Jumlah Kebijakan Afirmatif dalam Pelembagaan
PHA**

a. Peraturan Perundangan/Perda terkait PHA

Tabel 65 Peraturan Perundangan/Perda terkait PHA

No	Uraian	Keterangan
Jumlah Kebijakan Afirmatif dalam Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA)		
a	Peraturan Perundangan/Perda Terkait PHA	Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak
a		Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Layak Anak
		Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
		Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Perusahaan
		Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
		Peraturan Daerah No. 07 Tahun 2013 tentang Pencegahan & Penanganan Korban Perdagangan Orang
		Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2023 tentang



No	Uraian	Keterangan
		Perubahan atas Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak
		Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2014 tentang RTRW
		Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2015 tentang Zona Bebas Pekerja Anak
		Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perum Kumuh dan Permukiman Kumuh
		Peraturan Daerah No. 07 Tahun 2017 tentang Pengemis, Anjal & Gelandangan
		Peraturan Daerah No. 08 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok
		Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2017 tentang Perlindungan & Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas
		Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2018 tentang Perlindungan Hukum terhadap Pendidikan dan Tenaga Kependidikan dalam Penyelenggaraan Pendidikan
		Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2020 tentang

No	Uraian	Keterangan
		Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah
		Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya
		Peraturan Wali Kota Samarinda No. 02 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
		Peraturan Wali Kota Samarinda No. 102 Tahun 2021 tentang Penurunan Stunting di Kota Samarinda
		Surat Keputusan Wali Kota Samarinda tentang Pembentukan Sekolah Ramah Anak dan Responsif Gender
		Surat Keputusan Wali Kota Samarinda tentang Kelompok Kerja Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Samarinda Tahun 2021
		Surat Keputusan Wali Kota Samarinda tentang Pengangkatan Kader



No	Uraian	Keterangan
		Pembangunan Manusia Kelurahan

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, 2023

b. Kebijakan teknis (perencanaan dan penganggaran) PHA

Tabel 66 Kebijakan teknis (perencanaan dan penganggaran) PHA

No	Klaster	Indikator	Jumlah	
			APBD	Sumber Lain
1	Kelembagaan	1.a. Anggaran untuk rapat koordinasi gugus tugas KLA secara berkala	2,880,000.00	-
		1.b. Anggaran untuk promosi dan sosialisasi KLA	66,457,500.00	-
		1.c. Anggaran untuk Bimtek KHA	20,130,000.00	-
		1.d. Anggaran untuk pemantauan dan evaluasi KLA	2,880,000.00	-
2	Klaster I	2.a. Anggaran untuk memfasilitasi percepatan anak yang diregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran	620,467,000.00	-

No	Klaster	Indikator	Jumlah	
			APBD	Sumber Lain
		2.b. Anggaran untuk memfasilitasi AMPK yang diregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran	620,467,000.00	-
		2.c. Anggaran untuk fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)	6,030,060,000.00	-
		2.d. Anggaran untuk terlembaganya partisipasi anak	19,480,000.00	-
		2.e. Anggaran untuk terlembaganya perlindungan bagi Forum Anak yang menjalankan peran 2P	11,100,000.00	-
3	Klaster II	3.a. Anggaran untuk pencegahan dan penanganan perkawinan anak	149,461,000.00	-
		3.b. Anggaran untuk lembaga konsultasi keluarga	425,385,000.00	306,945,000.00



No	Klaster	Indikator	Jumlah	
			APBD	Sumber Lain
		(PUSAPAGA, LK3, BKB,PPKS)		
		3.c. Anggaran untuk pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)	8,863,751,800.00	-
		3.d. Anggaran untuk lembaga pengasuhan alternatif terstandarisasi	30,000,000.00	-
		3.e. Anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait dengan RBRA	872,155,390.00	-
		3.f. Anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait dengan RASS	558,870,000.00	-
4	Klaster III	4.a. Anggaran untuk persalinan di	29,553,635,856.00	-

No	Klaster	Indikator	Jumlah	
			APBD	Sumber Lain
		Fasilitas Pelayanan Kesehatan		
		4.b. Anggaran untuk program gizi balita	238,827,000.00	306,945,000.00
		4.c. Anggaran untuk pemberian makan bayi dan anak (PMBIA) usia dibawah 2 tahun	121,390,000.00	-
		4.d. Anggaran untuk fasilitas pelayanan kesehatan dengan pelayanan ramah anak	10,317,828,500.00	4,384,993,832.00
		4.e. Anggaran untuk rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak	62,694,000.00	-
		4.f. Anggaran untuk kawasan tanpa rokok (KTR) dan tidak ada iklan, promosi, dan Sponsor rokok	169,846,000.00	-



No	Klaster	Indikator	Jumlah	
			APBD	Sumber Lain
5	Klaster IV	5.a. Anggaran untuk wajib belajar 12 tahun	37,763,610,000.00	-
		5.b. Anggaran untuk satuan pendidikan ramah anak (SRA)	20,355,139,250.00	8,195,032,850.00
		5.c. Anggaran untuk fasilitas kegiatan budaya, kreatifitas, dan rekreatif yang ramah anak	1,354,210,800.00	1,522,659,300.00
6	Klaster V	6.a. Anggaran untuk pencegahan dalam perlindungan khusus (pencegahan premier, terseier, dan sekunder)	93,472,500.00	261,156,000.00
		6.b. Aggaran untuk pelayanan bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi	93,472,500.00	261,156,000.00
		6.c. Anggaran untuk anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-bentuk pekerjaan	32,769,650.00	-

No	Klaster	Indikator	Jumlah	
			APBD	Sumber Lain
		terburuk untuk anak (BPTA)		
		6.d. Anggaran untuk pelayanan bagi anak korban pornografi, NAPZA, dan terinfeksi HIV/AIDS	-	189,570,000.00
		6.e. Anggaran untuk pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik	240,000,000.00	-
		6.f. Anggaran untuk pelayanan bagi anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi	215,560,227,045.00	-
		6.g. Anggaran untuk pelayanan bagi anak dengan Perilaku Sosial menyimpang (PSM)	-	261,156,000.00
		6.h. Anggaran untuk penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum	-	76,260,000.00



No	Klaster	Indikator	Jumlah	
			APBD	Sumber Lain
		(ABH) melalui diversi (khusus pelaku)		
		6.i. Anggaran untuk pelayanan bagi anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya	93,472,500.00	261,156,000.00

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, 2023



- c. Kebijakan terkait SDM dan pengorganisasian PHA (pokja, gugus tugas dsb)

Tabel 67 Jumlah Kebijakan SDM dan Pengorganisasian PHA

No	Uraian	Tahun
1	Surat Keputusan Wali Kota Samarinda tentang Pengangkatan Kader Pembangunan Manusia Kelurahan	2022
2	Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Sekolah Ramah Anak (SRA) Tahun 2022	2022
3	Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda tentang Sekretariat Bersama UKS - Adiwiyata - SRA - SSK	2022
4	Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda tentang Penetapan dan Penunjukan Sekolah Inklusi Se-Kota Samarinda	2022
5	Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP)	2022
6	Surat Keputusan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) Tingkat Kota Samarinda tentang Pembentukan Sekretariat TP Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) Kota Samarinda Tahun 2021	2021



No	Uraian	Tahun
7	Surat Keputusan Wali Kota Samarinda tentang Kelompok Kerja Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Samarinda Tahun 2021	2021
8	Surat Keputusan Wali Kota Samarinda tentang Tim Pelayanan Doctor On Call untuk Kasus Kegawatdaruratan Medis	2021
9	Surat Keputusan Wali Kota Samarinda tentang Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan dan Pencegahan dan Penanganan Stunting Tingkat Kota Samarinda Masa Bhaktik 2019-2024	2019
10	Surat Keputusan Wali Kota Samarinda tentang Pembentukan Forum Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Tingkat Kota Samarinda Masa Bhakti 2019-2024	2019
11	Revisi Peraturan Daerah No 3 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No 10 Tentang Perlindungan Anak	2023

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, 2023



d. Kebijakan Partisipasi Anak, Masyarakat, Dunia Usaha dan Media dalam PHA

Tabel 68 Kebijakan Partisipasi Anak, Masyarakat, Dunia Usaha dan Media dalam PHA

No	Uraian	Tahun
1	Surat Keputusan Pengurus APSAI (Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia) Pusat Nomor: 028/SK-PPA/II/2024 tentang Pengesahan Pengurus Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kota Samarinda - Kalimantan Timur	2024
2	Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Nomor: 463/3976/100.22/SK/PHA.3.1 tentang Penunjukan Pusat Kreatifitas Anak (PKA) Kota Samarinda	2023
3	Surat Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor: 400.2.4-05/369/HK-KS/VIII/2023 tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Kota Samarinda Periode Tahun 2023-2025	2023
4	Surat Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor: 406/034/HK-KS/I/2021 tentang Taman Cerdas Kota Samarinda Menjadi Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)	2021
5	Surat Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor: 264/654/HK-KS/XII/2022 tentang Pusat Informasi Sahabat Anak Kota Samarinda	2022
6	Surat Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor: 264/168/HK-KS/III/2022 tentang Penunjukkan Masjid Ramah Anak di Kota Samarinda Tahun 2021	2021



N o	Uraian	Tahun
7	Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda Nomor: 195 Tahun 2021 tentang Penunjukkan Masjid Kota Samarinda sebagai Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA)	2021

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, 2023

D.1.2. Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak sesuai Standar

Tabel 69 Jumlah dan Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak sesuai Standar

No	Uraian	Jumlah	%
Jumlah dan Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak sesuai Standar			
1	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Samarinda	1	100%
2	Puspaga Cinta Syejati Kota Samarinda	1	100%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, 2023

D.2. Kelembagaan

D.2.1. Jumlah Peraturan/Kebijakan Daerah Tentang Kabupaten/Kota Layak Anak

1. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.
2. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak

D.2.2. Jumlah Gugus Tugas KLA yang Terbentuk

Tabel 70 Jumlah Gugus Tugas Kota Layak Anak yang Terbentuk

No	Uraian	Jumlah	%
Jumlah Gugus Tugas Kota Layak Anak yang Terbentuk			
1	Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Samarinda	1	100%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, 2023

D.2.3. Jumlah Gugus Tugas KLA yang Aktif

Tabel 71 Jumlah Gugus Tugas Kota Layak Anak yang Aktif

No	Uraian	Jumlah	%
Jumlah Gugus Tugas Kota Layak Anak yang Aktif			
1	Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Samarinda	1	100%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, 2023

D.2.4. Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah Menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA

Tabel 72 Jumlah Kota yang telah menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA

No	Uraian	Jumlah	%
Jumlah Kota yang telah menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA			
1	Kota Samarinda	1	100%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, 2023



D.2.5. Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki Data dan Informasi Profil Anak

Tabel 73 Jumlah Kota yang memiliki Data dan Informasi Profil Anak

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
Jumlah Kota yang memiliki Data dan Informasi Profil Anak			
1	Kota Samarinda	1	Buku Profil Gender & Anak Kota Samarinda

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, 2023

D.2.6. Jumlah Kecamatan Layak Anak (KELANA)

Tabel 74 Jumlah Kecamatan Layak Anak (KELANA)

No	Kecamatan	Keterangan
Jumlah Kecamatan Layak Anak (KELANA)		
1	Samarinda Kota	Kecamatan Layak Anak
2	Samarinda Ilir	Kecamatan Layak Anak
3	Samarinda Ulu	Kecamatan Layak Anak
4	Samarinda Utara	Kecamatan Layak Anak
5	Sambutan	Kecamatan Layak Anak
6	Sungai Pinang	Kecamatan Layak Anak
7	Sungai Kunjang	Kecamatan Layak Anak
8	Samarinda Seberang	Kecamatan Layak Anak
9	Loa Janan Ilir	Kecamatan Layak Anak
10	Palaran	Kecamatan Layak Anak

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, 2023



D.2.7. Jumlah Desa/Kelurahan Layan Anak (DEKELA)

Tabel 75 Jumlah Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELA)

No	Kecamatan	Keterangan
Jumlah Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELA)		
Kecamatan Palaran		
1	Kelurahan Rawa Makmur	Desa/Kelurahan Layak Anak
2	Kelurahan Handil Bakti	Desa/Kelurahan Layak Anak
3	Kelurahan Bukuan	Desa/Kelurahan Layak Anak
4	Kelurahan Simpang Pasir	Desa/Kelurahan Layak Anak
5	Kelurahan Bukuan	Desa/Kelurahan Layak Anak
Kecamatan Samarinda Seberang		
1	Kecamatan Sungai Keledang	Desa/Kelurahan Layak Anak
2	Kelurahan Baqa	Desa/Kelurahan Layak Anak
3	Kelurahan Mesjid	Desa/Kelurahan Layak Anak
4	Kelurahan Mangkupelas	Desa/Kelurahan Layak Anak
5	Kelurahan Tenun Samarinda	Desa/Kelurahan Layak Anak
6	Kelurahan Gunung Panjang	Desa/Kelurahan Layak Anak
Kecamatan Samarinda Ulu		
1	Kelurahan Teluk Lerong Ilir	Desa/Kelurahan Layak Anak
2	Kelurahan Jawa	Desa/Kelurahan Layak Anak
3	Kelurahan Air Putih	Desa/Kelurahan Layak Anak
4	Kelurahan Sidodadi	Desa/Kelurahan Layak Anak
5	Kelurahan Dadi Mulya	Desa/Kelurahan Layak Anak
6	Kelurahan Gunung Kelua	Desa/Kelurahan Layak Anak
7	Kelurahan Bukit Pinang	Desa/Kelurahan Layak Anak
8	Kelurahan Air Hitam	Desa/Kelurahan Layak Anak
Kecamatan Samarinda Ilir		
1	Kelurahan Selili	Desa/Kelurahan Layak Anak
2	Kelurahan Sungai Dama	Desa/Kelurahan Layak Anak
3	Kelurahan Sidomulyo	Desa/Kelurahan Layak Anak
4	Kelurahan Sidodamai	Desa/Kelurahan Layak Anak
5	Kelurahan Pelita	Desa/Kelurahan Layak Anak

No	Kecamatan	Keterangan
Jumlah Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELA)		
Kecamatan Samarinda Utara		
1	Kelurahan Sempaja Selatan	Desa/Kelurahan Layak Anak
2	Kelurahan Lempake	Desa/Kelurahan Layak Anak
3	Kelurahan Sungai Siring	Desa/Kelurahan Layak Anak
4	Kelurahan Sempaja Utara	Desa/Kelurahan Layak Anak
5	Kelurahan Tanah Merah	Desa/Kelurahan Layak Anak
6	Kelurahan Sempaja Barat	Desa/Kelurahan Layak Anak
7	Kelurahan Sempaja Timur	Desa/Kelurahan Layak Anak
8	Kelurahan Budaya Pampang	Desa/Kelurahan Layak Anak
Kecamatan Sungai Kunjang		
1	Kelurahan Loa Bakung	Desa/Kelurahan Layak Anak
2	Kelurahan Loa Buah	Desa/Kelurahan Layak Anak
3	Kelurahan Karang Asam Ulu	Desa/Kelurahan Layak Anak
4	Kelurahan Lok Bahu	Desa/Kelurahan Layak Anak
5	Kelurahan Teluk Lerong Ilir	Desa/Kelurahan Layak Anak
6	Kelurahan Karang Asam Ilir	Desa/Kelurahan Layak Anak
7	Kelurahan Karang Anyar	Desa/Kelurahan Layak Anak
Kecamatan Sambutan		
1	Kelurahan Sungai Kapih	Desa/Kelurahan Layak Anak
2	Kelurahan Sambutan	Desa/Kelurahan Layak Anak
3	Kelurahan Makroman	Desa/Kelurahan Layak Anak
4	Kelurahan Sindang Sari	Desa/Kelurahan Layak Anak
5	Kelurahan Pulau Atas	Desa/Kelurahan Layak Anak
Kecamatan Sungai Pinang		
1	Kelurahan Temindung Permai	Desa/Kelurahan Layak Anak
2	Kelurahan Sungai Pinang Dalam	Desa/Kelurahan Layak Anak
3	Kelurahan Gunung Lingai	Desa/Kelurahan Layak Anak
4	Kelurahan Mugirejo	Desa/Kelurahan Layak Anak

No	Kecamatan	Keterangan
Jumlah Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELA)		
5	Kelurahan Bandara	Desa/Kelurahan Layak Anak
Kecamatan Samarinda Kota		
1	Kelurahan Karang Mumus	Desa/Kelurahan Layak Anak
2	Kelurahan Pelabuhan	Desa/Kelurahan Layak Anak
3	Kelurahan Pasar Pagi	Desa/Kelurahan Layak Anak
4	Kelurahan Bugis	Desa/Kelurahan Layak Anak
5	Kelurahan Sungai Pinang Luar	Desa/Kelurahan Layak Anak
Kecamatan Loa Janan Ilir		
1	Kelurahan Simpang Tiga	Desa/Kelurahan Layak Anak
2	Kelurahan Tani Aman	Desa/Kelurahan Layak Anak
3	Kelurahan Sengkotek	Desa/Kelurahan Layak Anak
4	Kelurahan Rapak Dalam	Desa/Kelurahan Layak Anak
5	Kelurahan Harapan Baru	Desa/Kelurahan Layak Anak

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, 2023

D.2.8. Persentase Desa/Kelurahan yang Melaksanakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)

Tabel 76 Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)

No	Kecamatan	Keterangan
Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)		
Kecamatan Palaran		
1	Kelurahan Rawa Makmur	Sudah Terbentuk
2	Kelurahan Handil Bakti	Sudah Terbentuk
3	Kelurahan Bukuan	Sudah Terbentuk
4	Kelurahan Simpang Pasir	Belum Terbentuk



No	Kecamatan	Keterangan
Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)		
5	Kelurahan Bantuas	Belum Terbentuk
Kecamatan Samarinda Seberang		
1	Kecamatan Sungai Keledang	Sudah Terbentuk
2	Kelurahan Baqa	Sudah Terbentuk
3	Kelurahan Mesjid	Sudah Terbentuk
4	Kelurahan Mangkupelas	Sudah Terbentuk
5	Kelurahan Tenun Samarinda	Sudah Terbentuk
6	Kelurahan Gunung Panjang	Sudah Terbentuk
Kecamatan Samarinda Ulu		
1	Kelurahan Teluk Lerong Ilir	Belum Terbentuk
2	Kelurahan Jawa	Sudah Terbentuk
3	Kelurahan Air Putih	Belum Terbentuk
4	Kelurahan Sidodadi	Belum Terbentuk
5	Kelurahan Dadi Mulya	Belum Terbentuk
6	Kelurahan Gunung Kelua	Belum Terbentuk
7	Kelurahan Bukit Pinang	Belum Terbentuk
8	Kelurahan Air Hitam	Belum Terbentuk
Kecamatan Samarinda Ilir		
1	Kelurahan Selili	Sudah Terbentuk
2	Kelurahan Sungai Dama	Belum Terbentuk
3	Kelurahan Sidomulyo	Belum Terbentuk
4	Kelurahan Sidodamai	Belum Terbentuk
5	Kelurahan Pelita	Sudah Terbentuk
Kecamatan Samarinda Utara		
1	Kelurahan Sempaja Selatan	Belum Terbentuk

No	Kecamatan	Keterangan
Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)		
2	Kelurahan Lempake	Belum Terbentuk
3	Kelurahan Sungai Siring	Belum Terbentuk
4	Kelurahan Sempaja Utara	Belum Terbentuk
5	Kelurahan Tanah Merah	Belum Terbentuk
6	Kelurahan Sempaja Barat	Belum Terbentuk
7	Kelurahan Sempaja Timur	Belum Terbentuk
8	Kelurahan Budaya Pampang	Belum Terbentuk
Kecamatan Sungai Kunjang		
1	Kelurahan Loa Bakung	Sudah Terbentuk
2	Kelurahan Loa Buah	Belum Terbentuk
3	Kelurahan Karang Asam Ulu	Sudah Terbentuk
4	Kelurahan Lok Bahu	Belum Terbentuk
5	Kelurahan Teluk Lerong Ilir	Belum Terbentuk
6	Kelurahan Karang Asam Ilir	Sudah Terbentuk
7	Kelurahan Karang Anyar	Belum Terbentuk
Kecamatan Sambutan		
1	Kelurahan Sungai Kapih	Belum Terbentuk
2	Kelurahan Sambutan	Sudah Terbentuk
3	Kelurahan Makroman	Sudah Terbentuk
4	Kelurahan Sindang Sari	Sudah Terbentuk
5	Kelurahan Pulau Atas	Belum Terbentuk
Kecamatan Sungai Pinang		
1	Kelurahan Temindung Permai	Sudah Terbentuk
2	Kelurahan Sungai Pinang Dalam	Sudah Terbentuk



No	Kecamatan	Keterangan
Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)		
3	Kelurahan Gunung Lingai	Belum Terbentuk
4	Kelurahan Mugirejo	Belum Terbentuk
5	Kelurahan Bandara	Sudah Terbentuk
Kecamatan Samarinda Kota		
1	Kelurahan Karang Mumus	Belum Terbentuk
2	Kelurahan Pelabuhan	Belum Terbentuk
3	Kelurahan Pasar Pagi	Belum Terbentuk
4	Kelurahan Bugis	Belum Terbentuk
5	Kelurahan Sungai Pinang Luar	Belum Terbentuk
Kecamatan Loa Janan Ilir		
1	Kelurahan Simpang Tiga	Belum Terbentuk
2	Kelurahan Tani Aman	Belum Terbentuk
3	Kelurahan Sengkotek	Sudah Terbentuk
4	Kelurahan Rapak Dalam	Belum Terbentuk
5	Kelurahan Harapan Baru	Sudah Terbentuk

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, 2023



D.2.9. Jumlah Media Promosi tentang KLA

Tabel 77 Jumlah Media Promosi tentang Kota Layak Anak

No	Media	Keterangan
Jumlah Media Promosi tentang Kota Layak Anak		
Media Cetak		
1	Koran Kaltim Post tanggal 20 Juni 2022	Pemerintah Kota Samarinda Gelar Rakor KLA 2022
2	Koran Kaltim Post tanggal 06 Juli 2022	Samarinda Menuju Kota Layak Anak
3	Koran Kaltim Post tanggal 07 Juli 2022	Samarinda Kejar Status Nindya - Gelar Pertemuan Tindak Lanjut Hasil VLK Evaluasi KLA
4	Koran Kaltim Post tanggal 02 Agustus 2022	Semarak Puncak Peringatan Hari Anak Nasional
5	Leaflet	Tentang Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kota Layak Anak
Media Elektronik		
1	Acara Ngapeh di TVRI Kaltim tanggal 12 Juli 2022	Apakah Kota Samarinda sudah layak menjadi Kota Layak Anak?
2	Acara Ngapeh di TVRI Kaltim tanggal 30 Januari 2023	Perlindungan Khusus Anak dalam Kebijakan Penyelenggaraan Kota Layak Anak
3	Acara Halo Kaltim di Radio RRI Samarinda tanggal 04 Agustus 2022	Peringatan Hari Anak Nasional "Anak Terlindungi Indonesia Maju"
Media Sosial		
1	Website Diskominfo tanggal 20 Juni 2022	Target Naik Kelas, Wawali Buka Rakor Persiapan Verlap KLA 2022



No	Media	Keterangan
Jumlah Media Promosi tentang Kota Layak Anak		
2	Website Diskominfo tanggal 23 Juli 2022	Samarinda Kembali Peroleh Predikat Madya dalam Penghargaan KLA
3	Website Diskominfo tanggal 27 Juli 2022	Pemkot Samarinda Gelar Gebyar Hari Anak Nasional 2022
4	Website Diskominfo tanggal 01 Agustus 2022	Hari Anak Nasional 2022, Walikota Pesan Jaga Tumbuh Kembang Anak Tanpa Diskriminasi
5	Facebook Pemerintah Kota Samarinda tanggal 02 Agustus 2022	Peringatan Hari Anak Nasional
6	Instagram Pemerintah Kota Samarinda tanggal 02 Agustus 2022	Peringatan Hari Anak Nasional
7	Website Samarinda Pos tanggal 15 Februari 2023	Bersinergi dalam Memenuhi KLA, Ciptakan Satu Kelurahan-Satu Playground
8	Website Diskominfo Prov. Kaltim tanggal 15 Maret 2023	Terus Bersinergi, Pemprov Kaltim Tekankan KLA di Seluruh Kabupaten Kota
Media Luar Ruang		
1	Baliho Perlindungan Khusus Anak dalam Kebijakan Penyelenggaraan KLA	Terpasang di Lingkungan SMP Negeri 22 Samarinda
2	Baliho Perlindungan Khusus Anak dalam Kebijakan Penyelenggaraan KLA	Terpasang di Lingkungan Museum Samarinda dan Taman Samarendah

No	Media	Keterangan
Jumlah Media Promosi tentang Kota Layak Anak		
3	Baliho Dukungan Pemprov dan DPRD Prov. Kaltim untuk Hari Anak Sedunia	Terpasang di Kantor Gubernur, Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kaltim dan Taman Samarendah
Kampanye Massal		
1	Kegiatan Sosialisasi tanggal 10 Oktober 2022	Perlindungan Anak dalam Lingkungan RT

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, 2023

D.2.10. Jumlah Lembaga Masyarakat (LM) yang berperan dalam mewujudkan KLA

Tabel 78 Jumlah Lembaga Masyarakat (LM) yang berperan dalam mewujudkan Kota

No	Lembaga Masyarakat	Keterangan
Jumlah Lembaga Masyarakat (LM) yang berperan dalam mewujudkan Kota Layak Anak		
Kluster I		
1	Forum Anak	Seluruh Kegiatan dilibatkan dari Kluster I s/d V
2	PKK Kota Samarinda	10 Program PKK dalam Pergerakan Pemberdayaan Keluarga
3	Posyandu	Pengasuhan Alternatif Bina Keluarga Balita
Kluster II		
1	Forum Anak	Seluruh Kegiatan dilibatkan dari Kluster I s/d V
2	Forum Perkasa	Berkaitan dengan Forum Peduli Kekerasan Dalam Rumah Tangga



No	Lembaga Masyarakat	Keterangan
Jumlah Lembaga Masyarakat (LM) yang berperan dalam mewujudkan Kota Layak Anak		
3	PATBM	Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Anak di 23 Kelurahan
4	PAUD-HI	Pengasuhan Alternatif yang terintegrasi dengan kegiatan Posyandu
5	PKK Kota Samarinda	10 Program PKK dalam Pergerakan Pemberdayaan Keluarga
6	Posyandu	Pengasuhan Alternatif Bina Keluarga Balita
Kluster III		
1	Forum Anak	Seluruh Kegiatan dilibatkan dari Kluster I s/d V
2	PKK Kota Samarinda	Melibatkan 10 Program PKK dalam Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
3	Posyandu	Melibatkan 10 Program PKK dalam Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
Kluster IV		
1	Forum Anak	Seluruh Kegiatan dilibatkan dari Kluster I s/d V
2	PATBM	Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Anak di 23 Kelurahan
3	PAUD-HI	Pengasuhan Alternatif yang terintegrasi dengan kegiatan Posyandu

No	Lembaga Masyarakat	Keterangan
Jumlah Lembaga Masyarakat (LM) yang berperan dalam mewujudkan Kota Layak Anak		
4	PKK Kota Samarinda	Keterlibatan dalam penyediaan Taman Edukasi Holtikultura, Pojok 3R dan Perpustakaan di Pusat Kreatifitas Anak (PKA) Taman Cerdas
5	UPTD PPA Kota Samarinda	Keterlibatan dalam Edukasi tentang Penanganan dan Pengaduan Kekerasan di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Anak Sekolah
Kluster V		
1	Forum Anak	Seluruh Kegiatan dilibatkan dari Kluster I s/d V
2	Forum Perkasa	Berkaitan dengan forum peduli KDRT di 59 kelurahan
3	PATBM	Pencegahan dan penanganan kasus kekerasan anak di 23 kelurahan
4	Puspaga	Pendampingan Anak Dengan Perilaku Menyimpang, Perebutan hak Asuh Anak

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, 2023



D.2.11. Jumlah Dunia Usaha (DU) yang berperan dalam mewujudkan KLA Pemberdayaan

Tabel 79 Jumlah Dunia Usaha (DU) yang berperan dalam Mewujudkan Kota Layak Anak

No	Dunia Usaha	Nama	Jabatan
Jumlah Dunia Usaha (DU) yang berperan dalam Mewujudkan Kota Layak Anak			
1	PT. United Tractors Samarinda	Eko Raeza Permana, A.Md	Ketua Umum
2	Hotel Aston Samarinda	Triwahyu Nizar	Wakil Ketua
3	Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda	Meylina Kurniawati, MM	Sekretaris
4	PT. Eramart Lembuswana	Uli Ratna Mulia Sari	Wakil Sekretaris
5	PT. BPR Bank Samarinda	Anindya Ayuning Tyas, S.Pd	Bendahara
6	PT. BPD Bankaltim Kaltara Samarinda	Lusianah, SE	Wakil Bendahara
7	Samarinda Central Plaza	Gita Lidya, S.Pd	Ketua Publikasi dan Informasi
8	Big Mall Samarinda	Faradina Celly VA, S.Psi	Anggota
9	Apotik XZ Mart	Jamaliadi	Anggota
10	PT. Penerbit Erlangga	Hakulyakin Hulu, S.Pd, MM	Anggota
11	Hotel Mercure Samarinda	Muhammad Alfesyahri Fahlefi, S.Psi	Ketua Kemitraan dan Penguatan Jaringan
12	Hotel Bumi Senyur dan Puri Senyur Samarinda	Caroline Yevado Tohjoyo, S.Ikon	Anggota



No	Dunia Usaha	Nama	Jabatan
Jumlah Dunia Usaha (DU) yang berperan dalam Mewujudkan Kota Layak Anak			
13	PT. Sewu Segar Nusantara	Dessy Purnama Sari, A.Md	Anggota
14	PT. Penerbit Erlangga	Ravael Y. Sitanggang, S.Kom	Anggota
15	PT. Penerbit Erlangga	Hermawan Catur Nugroho, A.Md	Ketua Bidang Program dan Kegiatan
16	PT. Hexindo Samarinda	Andi Surning Sakti, S.S	Anggota
17	Hotel Harris Samarinda	Titi Maria Niasty Hia, S.KM	Anggota
18	PT. Kimia Farma Samarinda	Apt. Charles Nursalim S. Farm	Ketua Bidang Kemasyarakatan
19	Hotel Swissbell Borneo	Mayzalyan Syafrul Khair, S.Tp	Anggota
20	Hotel Grand Sawit Samarinda	Mukhlis	Anggota
21	PT. United Tractors Samarinda	Haryadi Santoso, Amk	Anggota

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, 2023



D.2.12. Jumlah Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Daerah yang Terbentuk

Tabel 80 Jumlah Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Daerah yang terbentuk

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
Jumlah Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Daerah yang terbentuk			
1	Apsai Kota Samarinda	1	Terbentuk Tahun 2024 melalui SK Pengurus Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Pusat No. 028/SK-PPA/II/2024 tentang Pengesahan Pengurus Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kota Samarinda - Kalimantan Timur

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, 2023

C.2.13. Jumlah Media yang Berperan dalam Mewujudkan KLA Pemberdayaan

Tabel 81 Jumlah Media yang Berperan dalam Mewujudkan Kota Layak Anak

No	Media	Keterangan
Jumlah Media yang Berperan dalam Mewujudkan Kota Layak Anak		
Media Cetak		
1	Koran Kaltim Post tanggal 20 Juni 2022	Pemerintah Kota Samarinda Gelar Rakor KLA 2022
2	Koran Kaltim Post tanggal 06 Juli 2022	Samarinda Menuju Kota Layak Anak



No	Media	Keterangan
Jumlah Media yang Berperan dalam Mewujudkan Kota Layak Anak		
3	Koran Kaltim Post tanggal 07 Juli 2022	Samarinda Kejar Status Nindya - Gelar Pertemuan Tindak Lanjut Hasil VLK Evaluasi KLA
4	Koran Kaltim Post tanggal 02 Agustus 2022	Semarak Puncak Peringatan Hari Anak Nasional
5	Leaflet	Tentang Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kota Layak Anak
Media Elektronik		
1	Acara Ngapeh di TVRI Kaltim tanggal 12 Juli 2022	Apakah Kota Samarinda sudah layak menjadi Kota Layak Anak?
2	Acara Ngapeh di TVRI Kaltim tanggal 30 Januari 2023	Perlindungan Khusus Anak dalam Kebijakan Penyelenggaraan Kota Layak Anak
3	Acara Halo Kaltim di Radio RRI Samarinda tanggal 04 Agustus 2022	Peringatan Hari Anak Nasional "Anak Terlindungi Indonesia Maju"
Media Sosial		
1	Website Diskominfo tanggal 20 Juni 2022	Target Naik Kelas, Wawali Buka Rakor Persiapan Verlap KLA 2022
2	Website Diskominfo tanggal 23 Juli 2022	Samarinda Kembali Peroleh Predikat Madya dalam Penghargaan KLA
3	Website Diskominfo tanggal 27 Juli 2022	Pemkot Samarinda Gelar Gebyar Hari Anak Nasional 2022
4	Website Diskominfo tanggal 01 Agustus 2022	Hari Anak Nasional 2022, Walikota Pesan Jaga Tumbuh Kembang Anak Tanpa Diskriminasi
5	Facebook Pemerintah Kota Samarinda tanggal 02 Agustus 2022	Peringatan Hari Anak Nasional
6	Instagram Pemerintah Kota Samarinda tanggal 02 Agustus 2022	Peringatan Hari Anak Nasional



No	Media	Keterangan
Jumlah Media yang Berperan dalam Mewujudkan Kota Layak Anak		
7	Website Samarinda Pos tanggal 15 Februari 2023	Bersinergi dalam Memenuhi KLA, Ciptakan Satu Kelurahan-Satu Playground
8	Website Diskominfo Prov. Kaltim tanggal 15 Maret 2023	Terus Bersinergi, Pemprov Kaltim Tekankan KLA di Seluruh Kabupaten Kota
Media Luar Ruang		
1	Baliho Perlindungan Khusus Anak dalam Kebijakan Penyelenggaraan KLA	Terpasang di Lingkungan SMP Negeri 22 Samarinda
2	Baliho Perlindungan Khusus Anak dalam Kebijakan Penyelenggaraan KLA	Terpasang di Lingkungan Museum Samarinda dan Taman Samarendah
3	Baliho Dukungan Pemprov dan DPRD Prov. Kaltim untuk Hari Anak Sedunia	Terpasang di Kantor Gubernur, Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kaltim dan Taman Samarendah
Kampanye Massal		
1	Kegiatan Sosialisasi tanggal 10 Oktober 2022	Perlindungan Anak dalam Lingkungan RT

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, 2023

D.3. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan

D.3.1. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran

Tabel 82 Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran

Kecamatan	Jumlah	Persentase	
		Memiliki	Tidak Memiliki
Palaran	20,283	7.75	7.48
Samarinda Seberang	20,690	7.71	11.33
Samarinda Ulu	39,878	15.44	10.96
Samarinda Ilir	21,137	8.04	8.54
Samarinda Utara	34,046	12.89	14.87
Sungai Kunjang	42,830	16.39	15.37
Sambutan	19,246	7.35	7.12
Sungai Pinang	33,474	12.73	13.64
Samarinda Kota	8.818	3.35	3.57
Loa Janan Ilir	21.683	8.33	7.12
	262,085	100,00	100,00

Sumber: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, 2023



Sumber: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, 2023

Gambar 36 Persentase Kepemilikan Akta Lahir

Dari tabel 81 dapat dilihat bahwa presentase kepemilikan kutipan akta kelahiran pada kecamatan di Kota Samarinda, dari jumlah 249,018 orang terdapat 48.7 persen memiliki kepemilikan kutipan akta kelahiran dan selebihnya 49.51 persen tidak memiliki akta kelahiran, tertinggi kecamatan yang telah memiliki akta kelahiran adalah kecamatan Sungai Kunjang sebanyak 16.39 persen yang ini disimpulkan bahwa adanya tingkat pemahaman dan kepedulian terhadap kewajiban dalam pembuatan akta pada anak.

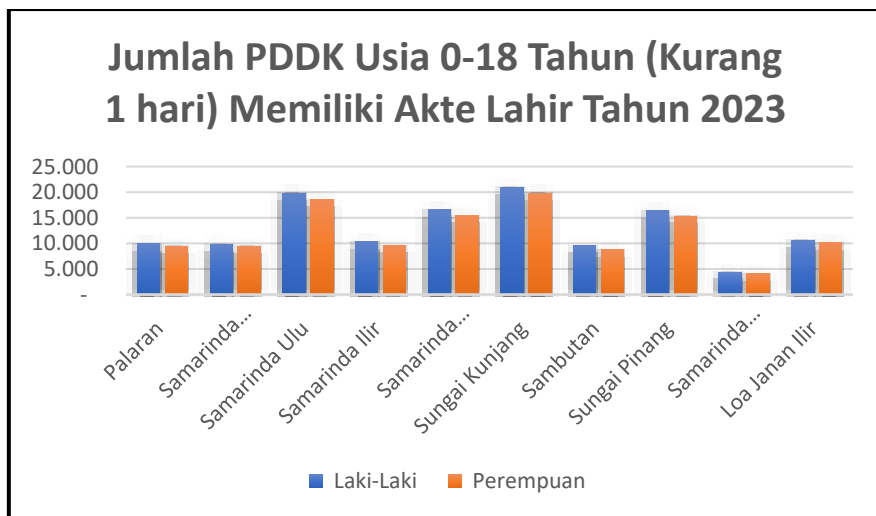
D.3.2. Cakupan Anak Usia 0-17 Tahun yang mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran

Tabel 83 Jumlah PDDK Usia 0-18 Tahun (Kurang 1 hari) Memiliki Akte Lahir Tahun 2023

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan
Palaran	9,938	9,368
Samarinda Seberang	9,871	9,338
Samarinda Ulu	19,833	18,613
Samarinda Ilir	10,410	9,611
Samarinda Utara	16,596	15,507
Sungai Kunjang	20,994	19,828
Sambutan	9,504	8,811
Sungai Pinang	16,352	15,340
Samarinda Kota	4,314	4,038
Loa Janan Ilir	10,591	10,161
TOTAL	128,403	120,615

Sumber: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, 2023





Sumber: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, 2023

Gambar 37 Jumlah PDDK Usia 0-18 Tahun

D.3.3. Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)

Tabel 84 Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)

No	Uraian	Lokasi	Produk Hukum	Keterangan
Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)				
1	Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) Samarinda	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda	Surat Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor : 264/654/HK-KS/XII/2022 tentang Pusat Informasi	Belum Terstandarisasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

			Sahabt Anak Kota Samarinda	Anak Republik Indonesia
--	--	--	-------------------------------	----------------------------

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, 2023

D.3.4. Jumlah Forum Anak tingkat Kabupaten/ Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan yang Terbentuk

Tabel 85 Jumlah Forum Anak Menurut Kecamatan/Kelurahan

No	Kecamatan	Keterangan
Jumlah Forum Anak Menurut Kecamatan/Kelurahan		
Kecamatan Palaran		
1	Kelurahan Rawa Makmur	Sudah Terbentuk dan Aktif
2	Kelurahan Handil Bakti	Sudah Terbentuk dan Aktif
3	Kelurahan Bukuan	Sudah Terbentuk dan Aktif
4	Kelurahan Simpang Pasir	Sudah Terbentuk dan Aktif
5	Kelurahan Bantuas	Sudah Terbentuk dan Aktif
Kecamatan Samarinda Seberang		
1	Kecamatan Sungai Keledang	Sudah Terbentuk dan Aktif
2	Kelurahan Baqa	Sudah Terbentuk dan Aktif
3	Kelurahan Mesjid	Sudah Terbentuk dan Aktif
4	Kelurahan Mangkupelas	Sudah Terbentuk dan Aktif
5	Kelurahan Tenun Samarinda	Sudah Terbentuk dan Aktif
6	Kelurahan Gunung Panjang	Sudah Terbentuk dan Aktif
Kecamatan Samarinda Ulu		
1	Kelurahan Teluk Lerong Ilir	Sudah Terbentuk dan Aktif
2	Kelurahan Jawa	Sudah Terbentuk dan Aktif
3	Kelurahan Air Putih	Sudah Terbentuk dan Aktif
4	Kelurahan Sidodadi	Sudah Terbentuk dan Aktif
5	Kelurahan Dadi Mulya	Sudah Terbentuk dan Aktif
6	Kelurahan Gunung Kelua	Sudah Terbentuk dan Aktif

No	Kecamatan	Keterangan
Jumlah Forum Anak Menurut Kecamatan/Kelurahan		
7	Kelurahan Bukit Pinang	Sudah Terbentuk dan Aktif
8	Kelurahan Air Hitam	Sudah Terbentuk dan Aktif
Kecamatan Samarinda Ilir		
1	Kelurahan Selili	Sudah Terbentuk dan Aktif
2	Kelurahan Sungai Dama	Sudah Terbentuk dan Aktif
3	Kelurahan Sidomulyo	Sudah Terbentuk dan Aktif
4	Kelurahan Sidodamai	Sudah Terbentuk dan Aktif
5	Kelurahan Pelita	Sudah Terbentuk dan Aktif
Kecamatan Samarinda Utara		
1	Kelurahan Sempaja Selatan	Sudah Terbentuk dan Aktif
2	Kelurahan Lempake	Sudah Terbentuk dan Aktif
3	Kelurahan Sungai Siring	Sudah Terbentuk dan Aktif
4	Kelurahan Sempaja Utara	Sudah Terbentuk dan Aktif
5	Kelurahan Tanah Merah	Sudah Terbentuk dan Aktif
6	Kelurahan Sempaja Barat	Sudah Terbentuk dan Aktif
7	Kelurahan Sempaja Timur	Sudah Terbentuk dan Aktif
8	Kelurahan Budaya Pampang	Sudah Terbentuk dan Aktif
Kecamatan Sungai Kunjang		
1	Kelurahan Loa Bakung	Sudah Terbentuk dan Aktif
2	Kelurahan Loa Buah	Sudah Terbentuk dan Aktif
3	Kelurahan Karang Asam Ulu	Sudah Terbentuk dan Aktif
4	Kelurahan Lok Bahu	Sudah Terbentuk dan Aktif
5	Kelurahan Teluk Lerong Ilir	Sudah Terbentuk dan Aktif
6	Kelurahan Karang Asam Ilir	Sudah Terbentuk dan Aktif
7	Kelurahan Karang Anyar	Sudah Terbentuk dan Aktif
Kecamatan Sambutan		
1	Kelurahan Sungai Kapih	Sudah Terbentuk dan Aktif
2	Kelurahan Sambutan	Sudah Terbentuk dan Aktif
3	Kelurahan Makroman	Sudah Terbentuk dan Aktif

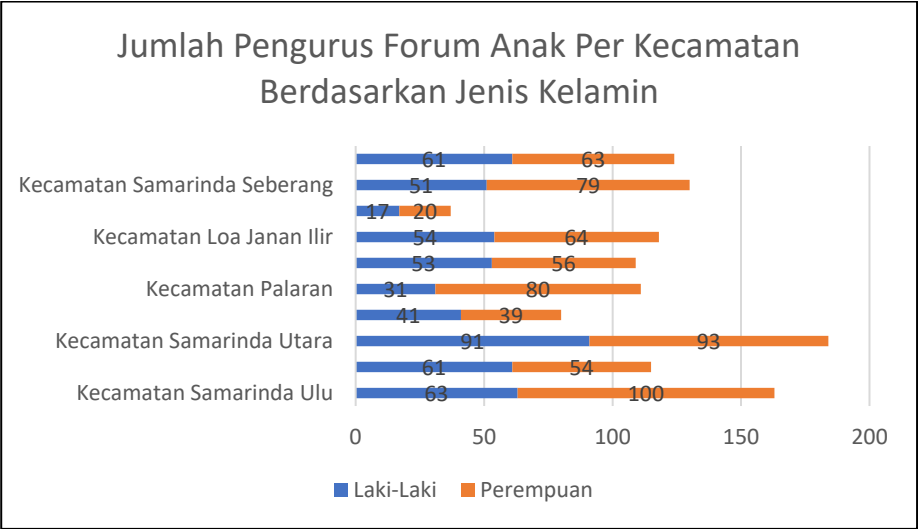


No	Kecamatan	Keterangan
Jumlah Forum Anak Menurut Kecamatan/Kelurahan		
4	Kelurahan Sindang Sari	Sudah Terbentuk dan Aktif
5	Kelurahan Pulau Atas	Sudah Terbentuk dan Aktif
Kecamatan Sungai Pinang		
1	Kelurahan Temindung Permai	Sudah Terbentuk dan Aktif
2	Kelurahan Sungai Pinang Dalam	Sudah Terbentuk dan Aktif
3	Kelurahan Gunung Lingai	Sudah Terbentuk dan Aktif
4	Kelurahan Mugirejo	Sudah Terbentuk dan Aktif
5	Kelurahan Bandara	Sudah Terbentuk dan Aktif
Kecamatan Samarinda Kota		
1	Kelurahan Karang Mumus	Sudah Terbentuk dan Aktif
2	Kelurahan Pelabuhan	Sudah Terbentuk dan Aktif
3	Kelurahan Pasar Pagi	Sudah Terbentuk dan Aktif
4	Kelurahan Bugis	Sudah Terbentuk dan Aktif
5	Kelurahan Sungai Pinang Luar	Sudah Terbentuk dan Aktif
Kecamatan Loa Janan Ilir		
1	Kelurahan Simpang Tiga	Sudah Terbentuk dan Aktif
2	Kelurahan Tani Aman	Sudah Terbentuk dan Aktif
3	Kelurahan Sengkotek	Sudah Terbentuk dan Aktif
4	Kelurahan Rapak Dalam	Sudah Terbentuk dan Aktif
5	Kelurahan Harapan Baru	Sudah Terbentuk dan Aktif

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, 2023



3.5. Jumlah Forum Anak tingkat Kota Samarinda, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan yang Aktif



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, 2023

Gambar 38 Jumlah Pengurus Forum Anak Berdasarkan Jenis Kelamin per Kecamatan

D.4. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

D.4.1. Persentase Perkawinan Anak

Tabel 86 Persentase Perkawinan Anak

No.	Uraian	Jumlah	%
1	Persentase Perkawinan Anak	116	2.22

Sumber: Kementerian Agama Kota Samarinda, 2023

D.4.2. Persentase Anak Perempuan Usia 15-19 Tahun yang telah Menikah

Tabel 87 Persentase Anak Perempuan Usia 15-19 Tahun yang telah Menikah

Kecamatan	Pria <19 th	%	Wanita <19 th	%
Loa Janan Ilir	0	0%	7	8%
Palaran	0	0%	10	11%
Samarinda Ilir	1	4%	9	10%
Samarinda Kota	0	0%	3	3%
Samarinda Seberang	4	16%	8	9%
Samarinda Ulu	6	24%	17	19%
Samarinda Utara	4	16%	10	11%
Sambutan	1	4%	8	9%
Sungai Kunjang	2	8%	11	12%
Sungai Pinang	7	28%	8	9%
TOTAL	25	100%	91	100%

Sumber: Kantor Kementrian Agama Kota Samarinda, 2023

Terlihat pada tabel 86 Jumlah Wanita <19 tahun sejumlah 92 orang dibandingkan jumlah pria <19 sekitar 25 orang, kecamatan/kota tetinggi ada di Samarinda ulu sekitar 17 Orang atau 19%, dan untuk laki-laki sendiri sejumlah 7 orang dan 28 persen



D.4.3. Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memiliki PUSPAGA atau (Pusat Pembelajaran Keluarga)

Tabel 88 Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memiliki PUSPAGA atau (Pusat Pembelajaran Keluarga)

No.	Uraian	Jumlah	%
1	Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memiliki PUSPAGA atau (Pusat Pembelajaran Keluarga)	1	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, 2023

D.4.4. Jumlah SDM pada PUSPAGA, LK3, LPKS, PPKS, BKB/BKR/sejenisnya telah dilatih Konvensi Hak Anak

Tabel 89 Jumlah SDM pada Puspaga, LK3, LPKS, PPKS, BKB/BKR/Sejenisnya telah dilatih Konvensi Hak Anak

No	Uraian	SDM yang Terlatih
Jumlah SDM pada Puspaga, LK3, LPKS, PPKS, BKB/BKR/Sejenisnya telah dilatih Konvensi Hak Anak		
1	Puspaga Cinta Syejati	5 Orang
2	DP2KB	1 Orang
3	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Orang
4	LKSA	2 Orang
5	Sekolah Berasrama (Pesantren)	141 Orang
6	Pesantren	130 Orang
7	PPKS/Pusyangatra	6 Orang
8	LK3	2 Orang

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, 2023



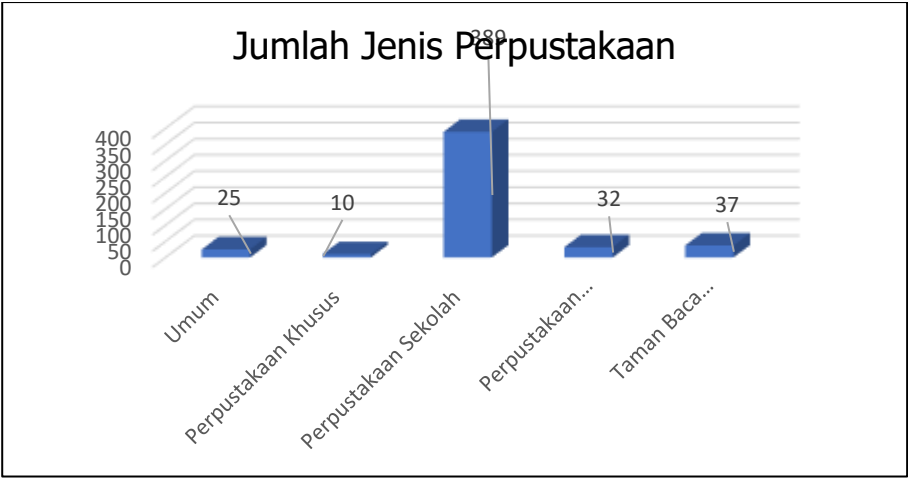
D.4.5. Jumlah Ketersediaan Perpustakaan Kampung di Kabupaten/Kota

Tabel 90 Data Perpustakaan dan TBM Kota Samarinda Tahun 2024

No	Jenis Perpustakaan	Jumlah	Keterangan
1	Umum	25 Unit	Perpustakaan kecamatan 1 Unit Perpustakaan Kelurahan 24 Unit
2	Perpustakaan Khusus	10 Unit	
3	Perpustakaan Sekolah	389 Unit	Perpustakaan SD 226 Unit Perpustakaan MI 5 Unit Perpustakaan SMP 90 Unit Perpustakaan MTS 10 Unit Perpustakaan SMA 32 Unit Perpustakaan MA 5 Unit Perpustakaan SMK 21 Unit
4	Perpustakaan Perguruan Tinggi	32 Unit	
5	Taman Baca Masyarakat (TBM)	37 Unit	

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda, 2023





Sumber Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda, 2023
Gambar 39 Jumlah Perpustakaan di Kota Samarinda

Jumlah ketersediaan perpustakaan di kota Samarinda sebanyak 493 yang terdiri dari perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, dan taman baca Masyarakat. Persentase taman baca masyarakat sebesar 7.5 persen.

D.4.6. Jumlah Ketersediaan taman kota dengan akses wifi di Kota Samarinda Tahun 2023

Tabel 91 Jumlah Ketersediaan Taman Kota Dengan Akses Wifi Di Kota Samarinda Tahun 2023

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Ketersediaan Taman Kota Dengan Akses Wifi Di Kota Samarinda Tahun 2023	2 Taman

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda, 2023

Berdasarkan tabel 90 terdapat dua taman yaitu Taman Bebaya dan Taman cerdas. Taman Bebaya merupakan salah satu taman yang terletak di Tepian Mahakam, Jalan Slamet Riyadi, Kota Samarinda. Taman Cerdas Samarinda terletak di Jalan S Parman, Gunung Kalua, Kecamatan Samarinda, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

D.4.7. Persentase Sekolah yang memiliki Rute Aman dan Selamat ke dan dari Sekolah (RASS)

Tabel 92 Jumlah dan Persentase sekolah yang memiliki rute aman dan selamat (RASS) di Kota Samarinda Tahun 2023

No.	Uraian	Jumlah	%
1	Jumlah dan Persentase sekolah yang memiliki rute aman dan selamat (RASS) di Kota Samarinda Tahun 2023	12 Sekolah	4,46

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, 2023

D.4.8. Jumlah Ketersediaan Titik Zona Selamat Sekolah di Kota Samarinda

Tabel 93 Jumlah Ketersediaan Titik Zona Selamat di sekolah

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah ketersediaan Titik Zona Selamat di sekolah	12 Titik

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, 2023



D.5. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
D.5.1. Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Samarinda, 2023
Gambar 40 Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan di Kota Samarinda

D.5.2. Angka Kematian Bayi
Jumlah Kematian Bayi tahun 2023



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Samarinda, 2023
Gambar 41 Jumlah Kematian Bayi Tahun 2023

Jumlah Kematian Neonatal tahun 2023



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Samarinda, 2023

Gambar 42 Jumlah Kematian Neonatal Tahun 2023

Jumlah Kematian Post Neonatal tahun 2023



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Samarinda, 2023

Gambar 43 Jumlah Kematian Post Neonatal Tahun 2023



D.5.3. Angka Kematian Balita



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Samarinda, 2023
Gambar 44 Jumlah Kematian Balita 2023

D.5.4. Prevalensi Status Gizi Balita



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Samarinda, 2023
Gambar 45 Prevalensi Balita-Balita Berat Badan Kurang pada Puskesmas Kota Samarinda

D.5.5. Prevalensi Stunting

Tabel 94 Jumlah Bayi (0-59) yang Diukur untuk Data Stunting Tahun 2023

NO	Kecamatan	Jumlah Bayi Diukur	Persentase
1	Palaran	1,163	8
2	Samarinda Seberang	1,071	7
3	Loa Janan Ilir	1,756	11
4	Sungai Kunjang	2,899	19
5	Samarinda Ulu	3,139	21
6	Samarinda Kota	668	4
7	Samarinda Ilir	442	3
8	Sambutan	1,152	8
9	Samarinda Utara	1,903	12
10	Sungai Pinang	1,089	7
		15,282	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Samarinda, 2023



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Samarinda, 2023



Gambar 46 Jumlah Bayi (0-59) yang Diukur untuk Data Stunting

Jumlah yang diukur dari 10 Kecamatan 26 Puskesmas Sekitar 15.282 yang telah diukur balita 0-59 Cm Stunting di kota samarinda terdapat Prevalensi Stunting pada angka 2.256 Orang atau 14,8%. Prevalensi Balita Berat badan Kurang Pada Puskesmas Kota Samarinda Tahun 2023 Jumlah yang tertimbang 16.401.

D.5.6. Persentase ASI Eksklusif pada Bayi Usia di Bawah 6 Bulan



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Samarinda, 2023

Gambar 47 Pemberian ASI Eksklusif pada Bayi Usia < 6 Bulan



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Samarinda, 2023

Gambar 48 Presentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan IMD (Inisiasi Menyusui Dini)

D.5.7. Persentase Anak yang Merokok

Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Merokok Tembakau selama Sebulan Terakhir dan Rata-Rata Jumlah Batang Rokok yang Dihisap per Minggu menurut Karakteristik, 2023

Tabel 95 Persentase Anak yang Merokok

Karasteristik	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Merokok Tembakau selama Sebulan Terakhir	Rata-Rata Jumlah Batang Rokok yang Dihisap per Minggu
SD Kebawah	17,67	86,01
SMP Ke Atas	19,08	83,07

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, 2023



D.5.8. Persentase Puskesmas Ramah Anak

Tabel 96 Data Puskesmas Ramah Anak Kab/ Kota

No.	Nama Puskesmas	No. SK	Jumlah
1	Palaran	SK. Wali Kota Samarinda Nomor : 264/167/HK- KS/III/2022, Tanggal 17 Maret 2022 Tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat Ramah Anak Tahun 2021	
2	Baqa		
3	Trauma Center		
4	Wonorejo		
5	Lok Bahu		
6	Karang Asam		
7	Pasundan		
8	Air Putih		15 Puskesmas
9	Sempaja		
10	Lempaka		
11	Bengkuring		
12	Temindung		
13	Sidomulyo		
14	Samarinda Kota		
15	Sambutan		

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, 2023

D.5.9. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum yang Layak

Tabel 97 Presentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum

No	Uraian	Jumlah	%
1	Jumlah dan Presentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum yang Layak	253,913	89.97
	JUMLAH	253,913	89.97

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda, 2023



D.5.10. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi yang Layak

Tabel 98 Jumlah Presentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi yang Layak Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah	%
1	Jumlah dan Presentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi yang Layak	221,239	78.4
JUMLAH		221,239	78.4

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda, 2023

D.6. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

D.6.1. Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA)

Tabel 99 Jumlah Presentase Sekolah Ramah Anak (SRA) Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah	%
1	Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA)	174	78.4
JUMLAH		174	78.4

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, 2023



3.4 Perlindungan Khusus Anak

E.1. Berdasarkan Kewenangan PPPA

E.1.1. Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Terlayani sesuai Standar



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, 2023

Gambar 49 Jumlah Kasus dan Korban pada Anak yang Memerlukan Perlindungan yang Terlayani sesuai Standar

Berdasarkan gambar 49 jumlah kasus dan korban pada anak yang memerlukan perlindungan yang terlayani sesuai standar Jumlah korban perempuan sebanyak 137 korban lebih banyak dibandingkan laki-laki 93 Korban pada tahun 2023.



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Samarinda, 2023

Gambar 50 Jumlah Kasus dan Korban Kekerasan Perlakuan Salah
Lainnya

E.2. Klaster Perlindungan Khusus Anak

E.2.1. Prevalensi Kekerasan Seksual pada Anak

Tabel 100 Jumlah Kasus dan Korban Kekerasan Seksual pada Anak

Jumlah Kasus	Jumlah Korban Berdasarkan Bentuk Kekerasan Seksual		
	Laki-laki	Perempuan	Total
70	3	70	73
Persentase	4,1%	95,89%	100%

Sumber data: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Samarinda, 2023

Jumlah kasus bisa berbeda dengan jumlah korban (korban) karena
satu korban bisa mengalami lebih dari satu bentuk kekerasan.





Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, 2023

Gambar 51 Jumlah Kasus dan Korban Kekerasan Seksual pada Anak

Dari tabel 99 jumlah kasus dan korban pada anak Jumlah korban anak perempuan sebanyak 70 korban lebih banyak dibandingkan anak laki-laki 3 Korban pada tahun 2023, dari jumlah korban berdasarkan bentuk kekerasan seksual ini untuk anak laki-laki sebanyak 4,1% signifikan jauh dari korban anak perempuan yang mencapai 95,89% dari total korban, faktor yang menyebabkan anak perempuan lebih rentan menjadi korban kekerasan dibanding anak laki-laki, salah satunya bahwa asumsi atau konstruksi sosial masyarakat yang menganggap perempuan lebih lemah. Jumlah Kasus sebanyak 70 Kasus dan Korban berbeda karena satu kasus bisa terdiri dari beberapa korban.

E.2.2. Prevalensi Kekerasan Fisik pada Anak

Tabel 101 Jumlah Kasus dan Korban Kekerasan Fisik pada Anak

Jumlah Kasus	Jumlah Korban Berdasarkan Bentuk Kekerasan Fisik		
	Laki-laki	Perempuan	Total
89	59	41	100
Persentase	59%	41%	100%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, 2023



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, 2023

Gambar 52 Jumlah Kasus dan Korban Kekerasan Fisik pada Anak

Dari tabel 100 jumlah kasus dan korban Kekerasan Fisik pada anak tercatat pada Sistem Informasi Online Perempuan dan Perlindungan Anak (Simfoni PPA) bahwa jumlah korban anak perempuan sebanyak 41 korban lebih sedikit dibandingkan anak laki-laki sebanyak 59 Korban pada tahun 2023. Pada jumlah korban berdasarkan bentuk kekerasan fisik ini untuk anak laki-laki sebanyak 59% dari korban anak perempuan yang mencapai 41% dari total korban, Anak-anak yang tinggal dalam lingkup keluarga yang mengalami KDRT memiliki resiko



yang tinggi mengalami kekerasan atau menjadi korban langsung; namun juga bisa menyaksikan kekerasan atau korban tidak langsung. Baik korban langsung dan korban tidak langsung mengalami dampak negatif kekerasan yang merusak. Kemampuan otak manusia memproses informasi dari apa yang dilihatnya (mirroring), membuat korban tidak langsung memproses pengalaman luka di otak, sama seakan-akan ia yang mengalaminya sendiri. Jumlah Kasus sebanyak 89 Kasus dan Korban sebanyak 100 berbeda karena satu kasus bisa terdiri dari beberapa korban.

E.2.3. Prevalensi Kekerasan Emosional pada Anak

Tabel 102 Jumlah Kasus dan Korban Kekerasan Emosional pada Anak

Jumlah Kasus	Jumlah Korban Berdasarkan Bentuk Emosional anak		
	Laki-laki	Perempuan	Total
30	26	29	55
Persentase	47,27%	52,72%	100%

Sumber data: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, 2023





Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, 2023

Gambar 53 Jumlah Kasus dan Korban Kekerasan Psikis (Emosional) pada Anak

Dari tabel 101 jumlah kasus dan korban Kekerasan emosional pada anak tercatat pada Sistem Informasi Online Perempuan dan Perlindungan Anak (Simfoni PPA) bahwa jumlah korban anak perempuan sebanyak 29 korban lebih banyak dibandingkan anak laki-laki sebanyak 26 Korban pada tahun 2023. Pada jumlah korban berdasarkan bentuk kekerasan emosional anak untuk anak laki-laki sebesar 47,27 % dari korban anak perempuan yang mencapai 52,72 % dari total korban, jumlah Kasus sebanyak 30 Kasus dan Korban sebanyak 55 berbeda karena satu kasus bisa terdiri dari beberapa korban.

E.2.4. Jumlah Kasus Pengaduan Kekerasan Anak

Tabel 103 Jumlah Kasus Pengaduan Kekerasan Anak

Jumlah Kasus	Jumlah kasus Pengaduan Kekerasan Anak		
	Laki-laki	Perempuan	Total
189	93	137	230
Persentase	40,43%	59,57%	100%

Sumber data: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, 2023

Dari tabel 102 jumlah kasus Pengaduan Kekerasan Anak pada anak terlihat Jumlah korban anak perempuan sebanyak 137 korban lebih banyak dibandingkan anak laki-laki sebanyak 93 korban pada tahun 2023.



Sumber data: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, 2023

Gambar 54 Jumlah Kasus dan Korban Pengaduan Kekerasan Anak

Pada jumlah korban berdasarkan pada Sistem Informasi Online Perempuan dan Perlindungan Anak (Simfoni PPA) bahwa bentuk Pengaduan Kekerasan Anak untuk anak laki-laki sebesar 40,43% dari korban anak perempuan yang mencapai 59,57 % dari total korban.



Sumber data: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, 2023

Gambar 55 Jumlah Laporan Pengaduan Anak Korban Kekerasan Ditindak Lanjuti

Jumlah korban kekerasan sudah mulai peduli terhadap setiap kasus yang dialami. Hal ini dibuktikan dengan adanya kenaikan angka pada penanganan pengaduan di tahun 2021, 2022 dan 2023 sesuai data di Sistem Informasi Online Perempuan dan Perlindungan Anak (Simfoni PPA). Menurut data tersebut pengaduan di tahun 2020 sebanyak 161 kasus, tahun 2021 sebanyak 146 Kasus, tahun 2022 sebanyak 188 kasus dan di tahun 2023 sebanyak 230 kasus.

E.2.5. Persentase Anak Korban Penelantaran

Tabel 104 Persentase Anak Korban Penelantaran

No.	Uraian	Jumlah	%
1	Jumlah dan Persentase Anak Korban Penelantaran (Angka)	8	4.2%

Sumber data: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, 2023

Dari tabel 103 Persentase Anak Korban Penelantaran berdasarkan Sistem Informasi Online Perempuan dan Perlindungan Anak (Simfoni PPA) terdapat korban anak penelantaran dengan persentase 4.2 persen dari total jumlah korban penelantaran anak yaitu sebanyak 8 orang (laki-laki sebanyak 7 orang dan perempuan sebanyak 1 orang).

E.2.6. Persentase Anak Penyandang Disabilitas yang Terlayani

Tabel 105 Persentase Anak Penyandang Disabilitas yang Terlayani

No.	Uraian	Jumlah	%
1	Jumlah dan Persentase Anak Penyandang Disabilitas yang Terlayani	723	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, 2023

Dari tabel 104 Jumlah disabilitas fisik sebanyak 24 atau 3.32 persen, disabilitas Netra sebanyak 36 orang atau 4.98 persen, disabilitas rungu/wicara sebanyak 105 orang atau 14.52 persen, disabilitas mental/jiwa sebanyak 544 orang atau sebesar 75.24 persen, dan disabilitas fisik dan mental sebanyak 1 orang atau sebesar 0,14 persen, dan disabilitas lainnya sebanyak 13 orang atau sebesar 1.80 persen.

E.2.7. Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika Pelajar dan Mahasiswa

Tabel 106 Jumlah Klien Balai Rehabilitas Tanah Merah Berdasarkan Jenis Kelamin Per Kecamatan

No	Kecamatan	0-18 (Anak)		>18 (Dewasa)	
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
1	Samarinda Kota	0	0	1	0
2	Samarinda Ulu	0	0	5	0
3	Samarinda Ilir	0	0	13	0
4	Samarinda Utara	0	0	3	0



No	Kecamatan	0-18 (Anak)		>18 (Dewasa)	
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
5	Samarinda Seberang	0	0	3	2
6	Sungai Kunjang	2	0	7	0
7	Sungai Pinang	1	0	4	1
8	Sambutan	0	0	2	0
9	Palaran	0	0	0	0
10	Loa Janan Ilir	1	0	3	0
JUMLAH		4	0	41	3

Sumber: Balai Rehabilitasi Tanah Merah Kota Samarinda, 2023

Pada table 105 terlihat angka pengguna anak dibawah <18 Tahun sebanyak 4 Orang kesemuanya adalah laki-laki, sedangkan pada dewasa >18 sebanyak 41 Orang yang menjalani rehabilitas, sekitar 41 Orang berjenis kelamin laki-laki dan 3 orang Perempuan.

E.2.8. Persentase Anak Korban NAPZA yang Terlayani

Tabel 107 Jumlah dan Persentase pengguna NAPZA Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023

Usia	Laki-Laki	Perempuan
Anak (0-18)	0	0
Dewasa (>18)	88	11
Presentase	88,9 %	11,1 %

Sumber: Badan Narkotika Nasional RI Kota Samarinda, 2023

Pada tabel 106 Jumlah dan Persentase pengguna NAPZA Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023 terlihat anak-anak usia 0-18 tahun baik laki-laki maupun perempuan tidak terdapat kasus yang terlayani. Sedangkan pada dewasa >18 terdapat laki-laki 88 Orang dengan presentase 88,9% dan perempuan sebanyak 11,1% atau 11 orang.



Tabel 108 Jumlah dan Persentase pengguna NAPZA Berdasarkan Usia

Usia	<16	16-19	20-24	25-29	>30
Anak	0	0	0	0	0
Dewasa	0	4	22	30	43
Presentase	0%	4,04%	22,22%	30,30%	43,43%

Sumber: Badan Narkotika Nasional RI Kota Samarinda, 2023

Pada table 107 Jumlah dan Persentase pengguna NAPZA Berdasarkan Usia, terlihat anak-anak usia mulai dari umur <16, 16-19 Tahun, 20-24 Tahun 25-29 Tahun dan >30 tidak terdapat pengguna NAPZA. Kemudian Usia Dewasa dari umur <16 tidak terdapat pengguna NAPZA, pada usia 16-19 terdapat 4 orang atau 4,04%, Usia Dewasa dari umur 20-24 terdapat pengguna NAPZA 22 orang atau 22,22% jumlah presentasinya, kemudian usia 25-29 sebanyak 30 orang atau 30,30% dan pada usia >30 terdapat 43 orang atau 43,43 orang.

E.2.9. Persentase Anak Berkonflik Dengan Hukum

Tabel 109 Anak Berkonflik Dengan Hukum Tahun 2023

No.	Uraian	Perempuan	Jumlah
1	0-18 Tahun	16	35
	Persentase	45.71%	100%

Sumber: Pengadilan Negeri Samarinda, 2023

Pada table 108 menyajikan jumlah dan Persentase Anak Berkonflik Dengan Hukum sebanyak 35 Orang atau sebanyak 100% Untuk Anak perempuan Berkonflik Dengan Hukum Tahun 2023 sebanyak 16 Orang.



E.2.10. Persentase Narapidana Anak



Sumber: Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kaltim, 2023
Gambar 56 Persentase Narapidana Anak Kota Samarinda

Dari gambar 56 disajikan bahwa data narapidana anak di kota Samarinda sebanyak 94% dari narapidana anak, dan terdapat 4 Orang narapidana anak atau 6% dari total 63 Narapidana anak.

E.2.11. Persentase Tahanan Anak



Sumber: Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kaltim, 2023
Gambar 57 Persentase Tahanan Anak Kota Samarinda



E.2.12. Persentase Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) (khusus pelaku) yang Terselesaikan melalui Diversi

Tabel 110 Persentase Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) (khusus pelaku) yang Terselesaikan

	Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) (khusus pelaku) yang Terselesaikan		
	Laki-laki	Perempuan	Total
	16	58	74
Persentase	21,62%	78,38%	100%

Sumber Data: Pengadilan Negeri Kota Samarinda

Terlihat pada tabel 108 persentase Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) (khusus pelaku) yang Terselesaikan melalui Diversi sebanyak 21,62% atau 16 Kasus pada Laki-laki dan sebanyak 78,38% atau sebanyak 58 Kasus yang telah terselesaikan dari 74 Total kasus yang di selesaikan tahun 2023.

E.2.13. Presentase Angka Korban Penculikan Penjualan, dan/atau Perdagangan

Tabel 111 Presentase Angka Korban Penculikan, Penjualan, dan/atau Perdagangan

No	Usia	Jumlah	%
1	Anak usia 0 - 18 tahun	4	0.04%
2	Dewasa	0	0
JUMLAH		4	0.04%

Sumber: Polresta Kota Samarinda



Dari table 110 Jumlah Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)/ Trafficking di Kepolisian Tahun 2023sebanyak anak usia 0-18 tahun sejumlah 4 atau 0,04%.

E.2.14. Presentase Anak Dengan Perilaku Sosial Menyimpang

Tabel 112 Persentase Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang

No	Usia	Jumlah	%
1	Anak usia 0 - 18 tahun	6	100%
JUMLAH		6	100%

Sumber: Polresta Kota Samarinda

Tabel 111 menyajikan jumlah dan Persentase anak dengan perilaku sosial menyimpang Tahun 2023 untuk anak usia 0-18 tahun sebanyak 6 orang.





BAB VI

KESIMPULAN

DAN

SARAN



BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. KESIMPULAN

1. Kualitas hidup perempuan memperlihatkan bahwa terjadi kenaikan pada beberapa indikator diantaranya kenaikan IDG yang merupakan salah satu indikator atas terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender.
2. Data perlindungan perempuan minim data diantaranya tentang cakupan kekerasan fisik yang dilakukan oleh pasangandan selain pasangan, cakupan kekerasan seksualoleh pasangan dan selain pasangan, cakupan kekerasan ekonomi oleh pasangan, cakupan kekerasan emosional (psikis) oleh pasangan, dan cakupan kekerasan pembatasan aktivitas oleh pasangan.
3. Data kualitas keluarga terwakili dengan penurunan penduduk miskin dari tahun sebelumnya dan perlunya melengkapi/ menyediakan data mengenai keluarga Sejahtera
4. Data pemenuhan hak anak telah didukung dengan beberapa kebijakan SDM dan pengorganisasian PHA sehingga dalam masa Pembangunan mampu menjadi standarisasi dalam pemenuhan hak anak sesuai peraturan di Kota Samarinda
5. Data perlindungan khusus anak belum memilah data terkait lansian dan penyandang disabilitas sehingga belum tersusunnya program Pembangunan Kota Samarinda yang berpihak pada lansia dan penyandang disabilitas

6.2. SARAN

1. Perlunya Menyusun kebijakan khusus tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kota Samarinda dalam bentuk peraturan daerah yang dapat dijadikan komitmen pemerintah Kota Samarinda dalam menyediakan data terpisah dan anggaran gender.



2. Adanya platform/aplikasi yang memudahkan integrasi data satu pintu antar dinas sehingga memudahkan para pengguna data untuk mendapatkan data terkait data gender.
3. Data gender yang belum tersedia khususnya di Data Perlindungan Perempuan diharapkan jadi perhatian lebih bagi Dinas Perberdayaan Perempuan dan Anak untuk dijadikan bahan kajian sehingga data tersebut dapat digunakan dalam Menyusun profil gender dan anak Kota Samarinda tahun berikutnya meskipun data tersebut release di pusat.



Daftar Pustaka

- Afandi, A. (2019). Bentuk-Bentuk Perilaku Bias Gender. *Lentera : Journal Of Gender And Children Studies*, 1(1), 1-18. Retrieved 11 December 2021, from <https://journal.unesa.ac.id/index.php/JOFC/article/view/681>.
- Badan Pusat Statistik Kota Samarinda. (2023). Kota Samarinda dalam Angka 2023. Badan Pusat Statistik Kota Samarinda.
- Badan Pusat Statistik Kota Samarinda. (2024). Kota Samarinda dalam Angka 2024. Badan Pusat Statistik Kota Samarinda.
- BAPPENAS. (2012). Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). Bappenas.
- Dewi, R. (2020). Kedudukan Perempuan dalam Islam dan Problem Ketidakadilan Gender. *Noura: Jurnal Kajian Gender*, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.32923/nou.v4i1.1430>
- Elaine Showalter. (1989). *Speaking of Gender*. Published by: Rocky Mountain Modern Language Association.
- Silawati. Hartian. (2006). Pengarusutamaan Gender: Mulai Dari Mana?, *Jurnal Perempuan Pengarusutamaan Gender*. Jakarta, 2006, vol. 50, hal. 20.
- Survei Sosial Ekonomi Nasional. (2023) <https://samarindakota.bps.go.id/indicator/28/204/1/angka-partisipasi-sekolah-aps-.html>
- Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
- United Nations. (2023). *Gender Equality*.
- Wood J.T. (2001). *Gendered Lives, Communication, Gender, and Culture*. Wadsworth, UK.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dan untuk mewujudkan tata kelola serta ketersediaan data gender dan data anak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Satu Data Gender dan Anak

Inpres nomor 9/2000 tentang Pengarusutamaan gender (PUG)

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Satu Data Gender Dan Anak dan Permen Nomor 03 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Permendagri No. 67 Tahun 2011 mengenai Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Satu Data Gender Dan Anak.

Permen PPPA bahwa Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Satu Data Gender Dan Anak, meliputi, kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, pemenuhan hak anak; dan perlindungan khusus anak.





LAMPIRAN





AKTIVITAS Januari 2023



DP2PA Kota Samarinda melakukan Koordinasi dan Advokasi dengan Dinas Kesehatan perihal Percepatan Pembentukan Puskesmas Ramah Anak dalam rangka mendukung terwujudnya Kota Layak Anak Kota Samarinda Samarinda, 17 Januari 2023



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Melakukan Kunjungan Kerja dan *Best Practice* Sekolah Ramah Anak (SRA) di SD Kemala Bhayangkari Balikpapan dalam rangka percepatan SRA untuk Samarinda Menuju Kota Layak Anak Samarinda, 18 Januari 2023



Menghadiri undangan “Malam Penganugerahan Pro Bebaya Award Serta ASN dan NON ASN Award 2023” dan Selamat untuk Plt. Kadis DP2PA Kota Samarinda Atas Penganugerahan Sebagai PEJABAT ADMINISTRATOR INSPIRATIF yang telah di terima, Jum’at, 27 Januari 2023



Dinas DP2PA Kota Samarinda Melaksanakan Bimtek Sekolah Ramah Anak (SRA) yang di Hadiri Langsung Oleh Asisten I, KA Bappedalitbang, KA Disdikbud, dan KA Kemenag Kota Samarinda, Samarinda, 01 Februari 2023





AKTIVITAS Februari 2023



Kunjungan Kerja terkait proses Standarisasi Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP) dan Standarisasi Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) dalam rangka Percepatan Mewujudkan Kota Samarinda Menuju Kota Layak Anak (KLA), 2 februari 2023



Rapat Hasil Keputusan Audir dan Ruang bermain Anak (RBA) taman cerdas kota Samarinda, dan penandatanganan berita acara kegiatan, Samarinda 17 Februari 2023





AKTIVITAS Maret 2023



Pelatihan dan Bimbingan Teknis pengisian Borang Sekolah Ramah Anak (SRA) terkait standarisasi SRA, dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda diwakili oleh plt. Kepala Dinas Ibu drg. Deasy Evriyani, M.Si, Samarinda, 1 Maret 2023,



Pelatihan E-Learning Konvensi Hak Anak yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda bidang Pemenuhan Hak Anak. Kegiatan Pelatihan ini diikuti Pendidik, Tenaga Kependidikan, Peserta Didik, Samarinda, 03 Maret 2023.



Pelantikan Bapak Dr. Ibnu Araby, MM.Pd sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda pada Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.





Menghadiri Kegiatan Advokasi dan Evaluasi pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Se-Kalimantan Timur yang dilaksanakan oleh DKP3PA Provinsi Kalimantan Timur, bertempat di Grand Jatra Hotel Balikpapan. Balikpapan, 13-14 Maret 2023



Kegiatan Pertemuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dengan Forum Anak Kota Samarinda. Samarinda, 31 Maret 2023..





AKTIVITAS April 2023



Final Penginputan Evaluasi Mandiri Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2023. Alhamdulillah poin terakhir penginputan EM KLA 2023 mencapai 881,3 (kategori utama) pada pukul 00:35 WITA





AKTIVITAS Mei 2023



DP2PA Kota Samarinda Mendorong Pembentukan Aktivis PATBM Kelurahan di Kecamatan Palaran.





AKTIVITAS Juni 2023



DP2PA Kota Samarinda terus gencar lakukan Kegiatan Pembinaan Pemenuhan Hak Anak di Setiap Kecamatan guna Tercapainya Samarinda menuju Kota Layak Anak





AKTIVITAS Juli

2023





**PEMERINTAH
KOTA SAMARINDA**

BerAKHLAK #bangga
melayani
bangsa



**Andi Harun Restui Terbentuknya KPAI
Kota Samarinda, Siap Dukung Anggaran di APBD**



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA



WWW.SAMARINDAKOTA.GO.ID





Peringatan Hari Anak Nasional ke-39 Tahun 2023, di Kota Semarang, 22 Juli 2023

Kota Samarinda menerima trofi penghargaan KLA Tahun 2023 dengan kategori NINDYA dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI I Gusti Bintang Darmawati Puspayoga di Hotel Padma Semarang





Peringatan JAMBORE Hari Anak Nasional 24-25 Juli 2023 di Palaran







AKTIVITAS Agustus 2023



Peringatan Puncak Hari Anak Nasional Tahun 2023, di Auditorium Education Center SMAN 10 Kota Samarinda, 9 Agustus 2023



Rakor Forum Perkasa (Peduli KDRT) se Kota Samarinda, Penyerahan Rompi dan Deklarasi Perlindungan Perempuan di Aula Graha Ruhui Rahayu Jalan Juanda Samarinda, 03 Agustus 2023



Pengarusutamaan Gender bersama Komunitas Guru Berbagi di SDN 003 Samarinda Utara



Sosialisasi Perlindungan Anak Di Palaran 3 Agustus 2023



BIMTEK Keluarga Berintegritas Di swiss Bell Hotel Tanggal 23 Agustus 2023



**Bimtek KPK RI,
Walikota Minta Seluruh Pejabat Pemkot Bangun Nilai
Anti Korupsi Bersama Keluarga**

   **PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  **WWW.SAMARINDAKOTA.GO.ID**



31 Agustus 2023

Ajak Forum Anak Samarinda,
DP2PA Kota Samarinda terus lakukan
Kegiatan Pembinaan Pemenuhan Hak Anak
di Setiap Kecamatan Se-Kota Samarinda,
demi tercapainya Samarinda menuju Kota Layak Anak



Pemerintah Kota Samarinda
(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
Kota Samarinda
Jalan Dharma Kompleks Balakarya No. 51 Kalimantan Tengah
Bontomatene Samarinda Kota
Telp. (0846) 748007 Email PIA 1022
Samarinda - Kalimantan Tengah

31 Agustus 2023

Cegah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
DP2PA Kota Samarinda Lakukan FGD Penanganan Manajemen
Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan bagi
Kader Forum Perkasa



Pemerintah Kota Samarinda
(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
Kota Samarinda
Jalan Dharma Kompleks Balakarya No. 51 Kalimantan Tengah
Bontomatene Samarinda Kota
Telp. (0846) 748007 Email PIA 1022
Samarinda - Kalimantan Tengah

**Implementasi PUG di Kecamatan Sungai Kunjang Kelurahan
Loa Buah (LOA KUMBAR)**

DP2PA
Kota Samarinda

#

bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK

BERAKHLAK
BERSAMA SAMA MELAKSANAKAN TRANSFORMASI



"Capai Target Pembangunan Bertahap di Loa Kumbar dengan Kesetaraan Gender" DP2PA Lakukan Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Loa Kumbar dalam meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan, Perlindungan Perempuan, Perlindungan Khusus Anak, dan Pemenuhan Hak Anak



06 September 2023

Pemerintah Kota Samarinda
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Samarinda
Jalan Dekda Kompleks Balai Kota No. 22 Kalimantan Tengah
Kecamatan Samarinda Kota
Telp. (0541) 746207 Kode Pos 75221
Samarinda - Kalimantan Timur



Profil Gender dan Anak Kota Samarinda | 243



**TIM STUDY TIRU IMPLEMENTASI PISA GUGUS TUGAS KLA
KOTA SAMARINDA DI PEMERINTAH KOTA BONTANG
KALIMANTAN TIMUR**



egiatan Penyusunan RAD KLA ini dilaksanakan di Ruang Rapat Lt. 2 Kantor Bappedalitbang Samarinda dan dihadiri oleh beberapa Stakeholder terkait seperti OPD, Masyarakat, Media Massa dan Dunia Usaha yang mendukung Kota Layak Anak.



Capai target Nindya pada Evaluasi PUG melalui Anugerah Parahita Ekapraya (APE), DP2PA lakukan Rapat Pemantauan dan Evaluasi PUG Kota Samarinda





AKTIVITAS September 2023



Menuju Kota Layak Anak Kategori Utama Tahun 2024, DP2PA lakukan Kegiatan Up-Grading bagi Forum Anak Samarinda.Kegiatan ini dilakukan di Ruang Rapat Lt. 2 Yen's Delight Jalan Juanda 6, Samarinda dan diikuti oleh Fasilitator Forum Anak dan Seluruh Forum Anak Samarinda Periode 2023-2025.



Kegiatan Penyusunan RAD KLA ini dilaksanakan di Ruang Rapat Lt. 2 Kantor Bappedalitbang Samarinda dan dihadiri oleh beberapa Stakeholder terkait seperti OPD, Masyarakat, Media Massa dan Dunia Usaha yang mendukung Kota Layak Anak.



Study Tiru Implementasi Gugus Tugas KLA Kota Samarinda di Pemerintah Kota Bontang Kalimantan Timur.19 September 2023







AKTIVITAS Oktober 2023



Kegiatan Pelatihan Manajemen Penanganan Kasus Kekerasan Keluarga bersama Forum Perkasa (Forum Peduli KDRT) di Yen's DeLight.” Tgl 11



Wujudkan Rumah Ibadah yang Ramah Anak di Kota Samarinda, DP2PA Lakukan Kegiatan Sosialisasi Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) menuju “Kota Layak Anak Kategori Utama di Tahun 2024”. Kegiatan ini dilakukan di Ruang Rapat Mangkupelas Lt. 2 Gedung Balai Kota Samarinda, Jalan Dahlia dan dihadiri oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Samarinda



Pemerintah Kota Samarinda dalam Penyelenggaraan Pengarustamaan Gender (PUG) di Kota Samarinda melalui Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dapat naik kelas dari Pratama yang sebelumnya diraih. Puspaga Cinta Syejati and Uptd Ppa Samarinda at Ruang Rapat Utama Lantai II Balaikota Samarinda.



Kegiatan Pembinaan Pemenuhan Hak Anak di Setiap Kecamatan guna Tercapainya Samarinda menuju Kota Layak Anak Kategori Utama di Tahun 2024 Kegiatan dilakukan di Kecamatan Samarinda Utara, hadir ASN di Kelurahan Kecamatan Samarinda Utara



DP2PA Kota Samarinda mengadakan Rapat koordinasi dan sinkronisasi pada Senin (16 Oktober 2023) pagi di Ruang Mangkupelas Lt. 2 Balai kota Samarinda dengan mengundang segenap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda





AKTIVITAS November 2023



Rapat Koordinasi Kota Layak Anak (KLA) diadakan di Hotel Grand Sawit Samarinda 13 Nov 2023



Verifikasi Lapangan kunjungan Evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Anugerah Paranita Ekapraja (APE) kota Samarinda di Ruang Rapat Gedung Balaikota Lt 3



Bimbingan Tehnis Konvensi Hak Anak (KHA) Ruang Rapat Utama Lantai II Balaikota Samarinda.



Jambore Forum Anak Dan OCD (Outdoor Classroom Day) Taman Salma Shofa 12 November 2023



Pelatihan Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Kota Samarinda Tahun 2023 di Ballroom 1 Midtown Hotel Samarinda, 21 - 22 November 2023..



Rakor Gender Champion & Perempuan Berjasa Tahun 2023, 29 November 2023.



Sosialisasi Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kota Samarinda, 30 November 2023.



Advokasi & Sosialisasi Kebijakan KLA (Kluster Kesehatan Dasar & Kesejahteraan) untuk Tenaga Kesehatan Puskesmas se Kota Samarinda, 30 November 2023.





AKTIVITAS Desember 2023



Puncak Peringatan Dirgahayu Dharma Wanita Persatuan ke-24 Kota Samarinda Tahun 2023, 14 Desember 2023..



Rapat Koordinasi Pemantapan Panitia pd Rangkaian Peringatan Hari Ibu ke-95 Tahun 2023 Kota Samarinda, 15 Desember 2023..



Pemerintah Kota Samarinda menerima Penghargaan Tematik PHA utk Layanan RBRA (Taman Cerdas Samarinda) & Layanan PUSPAGA (Puspaga Cinta Syejati) Kategori PUSPAGA NINDYA yg telah sesuai dg Standarisasi KLA dr Menteri PPPA RI di Gedung Perpustakaan Nasional RI Jakarta. tgl.18 Desember 2023,



Puncak PHI ke 95 Kota Samarinda, Walikota memberikan penghargaan Genser Champion dan Perempuan berjasa Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Samarinda di Hotel Bumi Senyur, Kamis (21/12/2023)



Family Gathering Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tgl 30 Desember 2023 di Coconut Beach, Samboja





DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA



IKAPI
INSTITUT KEMAJUAN
ANAK INDONESIA

CV. Tahta Media Group
Surakarta, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.com
Ig : tahtamedigroup
Telp/WA : +62 896-5427-3996



62-415-7735-135